

TESIS

PETANI DAN KEMISKINAN

**Studi Tentang Kemiskinan dan Strategi
Mempertahankan Kelangsungan Hidup Petani Miskin
Di Daerah Tadah Hujan Desa Pemongkong, Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat**



SAMA'AN

**PROGRAM STUDI ILMU - ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

PETANI DAN KEMISKINAN

**Studi Tentang Kemiskinan dan Strategi
Mempertahankan Kelangsungan Hidup Petani Miskin
Di Daerah Tadah Hujan Desa Pemongkong, Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh :

**SAMA'AN
Nim : 099712727 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

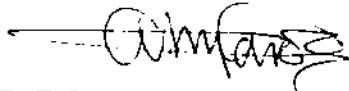
LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal : 31 Desember 1999

Oleh :

Pembimbing



DR. HOTMAN M. SIAHAAN
NIP. 130701134

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



DR. LAURENTIUS DYSON P. MA.
NIP. 130937724

Telah diuji

Pada tanggal : 18 Desember 1999

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Laurentius Dyson P., MA

Anggota : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Dr. Hotman M. Siahaan

Daniel Theodore Sparringa, MA., Ph.D

Drs. Doddy S. Singgih, MS

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat Nya lah sehingga dalam keadaan yang serba terbatas ini peneliti masih diberi kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini.

Peneliti sadar bahwa untuk menyelesaikan tesis ini sesungguhnya banyak bantuan moril maupun materiil telah peneliti terima dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Meskipun tidak mungkin memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini, beberapa dari mereka patut disampaikan ucapan terima kasih sedalam dalamnya.

Terima kasih kepada Pemerintah RI c.q. Menteri dan mantan Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN yang telah memberikan bantuan finansial sehingga meringankan beban peneliti dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih juga kepada Kakanwil BKKBN Prov. NTB., Kakan. BKKBN dan mantan Kakan. BKKBN Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada peneliti untuk melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih juga kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof.dr. Soedarto,Ph.D. yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada peneliti untuk mengikuti Program Magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kepada Direktur Program Pascasarjana, Prof.Dr.H.Soedijono,dr. beserta staf, juga disampaikan terima kasih atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan untuk mengikuti Program Magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kepada Dr.Hotman M. Siahaan selaku pembimbing yang dengan profesionalisme yang tinggi secara bijak dan penuh perhatian telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini. Rasa terima kasih yang dalam disampaikan kepadanya.

Kepada Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,MPA., Daniel Theodore Sparringa,Ph.D., Dr. Laurentius Dyson P., MA., Suhargo Prayitno, Drs..MA., dan Drs. Doddy S.Singgih MS., baik sebagai tim penilai usulan penelitian maupun tim penguji tesis juga terima kasih atas masukannya bagi penyempurnaan tesis ini.

Kepada Bapak Drs. Sugianto, figur yang tak mampu peneliti lukiskan keberadaannya selama peneliti mengikuti studi di Surabaya. Rasa hormat dan terima kasih yang paling dalam peneliti khaturkan kepadanya.

Kepada saudara Moh. Said, atas bantuan informasinya selama peneliti mengumpulkan data di lapangan, terima kasih atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala desa Pemongkong beserta staf, kepala dusun, ketua RT, pemimpin informal dan para responden atas informasinya yang sangat bermamfaat sehingga tesis ini terselesaikan.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan sesama mahasiswa Program Pascasarjana khususnya bidang ilmu sosial atas masukannya dalam penyelesaian tesis ini.

Kepada Mas Hanafi, Fadillah, Ivan, Mbak Anik di Warung Internet Kalidami yang mengetik tesis ini dengan baik. Kesabaran dan kesungguhannya menyelesaikan pengetikan bahkan sampai larut malam benar-benar harus dihargai.

Akhirnya, kepada Ayah dan Ibunda yang selalu menabur doa dengan tulus, dan istri tercinta Sri Nurlaila serta anak-anak tersayang Ryan Reza Falupi dan Hardika Nanda Pratiwi yang telah banyak memberikan pengertian, semangat dan pengorbanan yang sangat besar dalam penyelesaian studi ini, kiranya tidak cukup disampaikan kata-kata terima kasih saja. Sesungguhnya kepada merekalah tesis ini dipersembahkan.

Surabaya, Desember 1999

Sama'an

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
RINGKASAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
Latar Belakang Masalah.....	1
Masalah Penelitian.....	12
Tujuan Penelitian.....	12
Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 14
Petani dan Kehidupannya.....	14
Konsep Tentang Kemiskinan.....	19
Paradigma Pembangunan Orde Baru.....	28
Petani Miskin dan Strategi Mempertahankan Kelangsungan Hidup.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 42
Definisi Operasional.....	42
Lokasi Penelitian.....	44
Penentuan Responden.....	45
Pengumpulan Data.....	46
Analisis Data.....	49
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 51
Kondisi Geografis.....	51
Kondisi Demografis.....	53
Pendidikan.....	55
Mata Pencarian.....	56
Kondisi Rumah dan Akses Terhadap Fasilitas Publik.....	58
Kondisi Sektor Pertanian dan Masalah Kemiskinan.....	62

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
Karakteristik Sosial Ekonomi Responden	69
Strategi Mempertahankan Kelangsungan Hidup	80
Peran Negara/Pemerintah Dalam Program Bantuan Peningkatan Pendapatan ...	106
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	116
Kesimpulan	116
Implikasi	120
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Luas Wilayah Desa Pemongkong Menurut Jenis Pemanfaatan Tanah	53
2. Jumlah Penduduk Desa Pemongkong Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	54
3. Distribusi Pemilikan Tanah Di Desa Pemongkong	57
4. Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Di Desa Pemongkong Menurut Jenisnya	59
5. Produktifitas Lahan Per Jenis Tanaman Pertanian di Desa Pemongkong Dan Kecamatan Keruak.....	65
6. Umur Responden	70
7. Tingkat Pendidikan Responden	70
8. Bentuk Keluarga Responden	72
9. Kondisi Rumah Responden	75
10. Pemilikan Benda-Benda Ekonomis	76
11. Pemilikan Hewan Ternak	77
12. Penghasilan Keluarga Responden.....	78
13. Cara Responden Menambah Penghasilan	81
14. Jenis Usaha/Pekerjaan Sampingan Responden	82
15. Anggota Keluarga Yang Dimanfaatkan Mencari Tambahan Penghasilan ...	89
16. Cara Pengetatan Konsumsi Sehari-hari	93
17. Pihak Yang Sering Diminta Bantuannya oleh Responden.....	98

18. Pihak Yang Sering Menjadi Tempat Berutang	101
19. Pemanfaatan Pranata Tradisional	103
20. Jenis Barang Yang Pernah Dijual	106
21. Cara Menggerakkan Petani Miskin Dalam Program Bantuan Peningkatan Pendapatan	107
22. Sikap Responden Terhadap Program Bantuan Peningkatan Pendapatan	110
23. Kondisi Ekonomi Keluarga Responden Setelah Memperoleh Bantuan Peningkatan Pendapatan	113

RINGKASAN

Meskipun cukup banyak penelitian untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah kehidupan petani, namun masih jarang yang memusatkan perhatian kepada ikhwal strategi kelangsungan hidup petani miskin --khususnya di daerah tadah hujan (lahan kering). Penelitian ini mencoba memahami kondisi sosial ekonomi serta berbagai masalah yang dihadapi petani miskin. Lebih jauh lagi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi yang kembangkan petani miskin di daerah lahan kering untuk menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari termasuk bagaimana mengatasi masa-masa krisis serta bagaimana peran negara / pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani di daerah lahan kering.

Penelitian ini dilakukan di desa Pemongkong, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 responden yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilengkapi kuesioner terstruktur dilanjutkan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dengan beberapa informan dan responden terpilih. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menyajikan data secara terinci serta melakukan interpretasi teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) adalah golongan petani yang serba kekurangan, bukan hanya kurang penghasilan (di bawah cukupan), melainkan juga kurang pendidikan (pendidikannya rendah), tidak berdaya, tidak dimilikinya aset produksi yang memadai dan kondisi perumahan yang kurang layak. Untuk menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari rumah tangga petani miskin mengembangkan strategi yaitu mendiversifikasikan usaha / pekerjaan antara lain : berkebun, kerja serabutan, beternak, nelayan, dagang, tukang, industri kecil, dan jasa. Selain itu mereka juga mencari kerja ke luar desa. Upaya menambah pendapatan keluarga juga dilakukan dengan mendayagunakan anggota keluarga yang ada : istri, anak, bahkan orang tua atau saudara. Di saat-saat krisis dan kebutuhan yang mendesak upaya rumah tangga petani agar tetap survive adalah dengan strategi pengetatan ikat pinggang, baik dalam hal pangan, sandang, proses produksi, maupun mengabaikan kewajiban-kewajiban seremonial. Rumah tangga petani juga mengembangkan jaringan sosial dan memanfaatkan pranata tradisional "banjar". Bila strategi ini tidak mencukupi maka mereka akan melepas barang-barang yang masih tersisa dalam rumah tangga.

Temuan lain penelitian ini bahwa program bantuan peningkatan pendapatan belum mampu memodifikasikan kepentingan masyarakat (petani miskin) dengan negara / pemerintah karena pelaksanaannya lebih bersifat mobilisasi dan perencanaan secara top down. Hal ini tidak selalu mendapat respon positif dari petani dan belum memberikan hasil yang nyata bagi perbaikan ekonomi keluarga petani. Kegagalan ini sesungguhnya akibat dari kondisi struktural dan natural di daerah penelitian.

BAB I

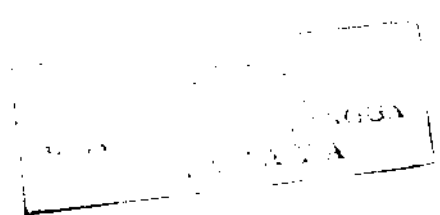
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dan pembaharuan yang berencana menuju pada tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebagai suatu proses pada dasarnya pembangunan akan membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat dan proses akumulasi yang berimplikasi pada peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan.¹

Pembangunan sektor pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri mengandung harapan agar membawa perubahan ekonomi yang dapat menciptakan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan khususnya petani kemudian hasilnya akan dinikmati secara merata.

Pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru mulai sejak Pelita I menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, dan merupakan awal revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau yang mengacu pada



¹ Gunawan Sumodiningrat, "Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Pedesaan", *Perencanaan Pembangunan*, No. 10/des.1997, h. 31.

program intensifikasi pertanian mengantarkan beberapa teknologi baru dalam teknik pertanian. Sejak awal tujuan dari program ini adalah meningkatkan produksi tanaman padi, dan umumnya di lahan sawah.²

Target produksi merupakan sasaran yang harus dipenuhi tanpa harus memperhatikan secara utuh bagaimana produksi itu di hasilkan, atau dengan kata lain, siapa dan golongan petani mana yang memanfaatkan dan menikmati program tersebut tidak terlalu dipermasalahkan. Pendekatan dasarnya adalah agricultural growth, atau produksi harus naik, sedangkan persoalan pembagian hasil pada gilirannya akan diatur oleh kekuatan atau mekanisme pasar.³

Akan tetapi harapan besar revolusi hijau yang menekankan agricultural growth dengan asumsi dapat menimbulkan equity dalam masyarakat petani, kenyataannya tidak tercapai. Ironisnya, kendala itu timbul justru karena pendekatan dasar pembangunan pertanian yang berorientasi pada agricultural growth. Demi peningkatan produksi, sistem pertanian menunjukkan kearah uniformitas. Agar investasi di bidang pertanian dapat segera kembali, bantuan investasi cenderung ditujukan pada petani besar yang memiliki sawah luas. Akibatnya jenis petani inilah yang dapat menikmati bantuan-bantuan yang disediakan pemerintah untuk

² Soediono M.P. Tjondronegoro, "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa", *Prisma*, No.2, 1990, h.3 ; lihat juga Gunawan Sumodiningrat dan Mudrajad Kuncoro, "Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri : Mencari Pola Simbiosis," *Prisma*, Idem, h. 44.

³ Tjondronegoro, idem; lihat juga Soekartawi, "Reorientasi Pendekatan Pembangunan Pertanian : Antisipasi Pembangunan Jangka Panjang II," *Prisma*, No.11, Nopember 1991, h.7

memodernisasikan pertanian, sementara petani kecil semakin banyak menjadi penonton pembangunan pertanian tersebut.⁴

Berbagai studi menunjukkan bahwa revolusi hijau hanya mungkin dilakukan secara menguntungkan apabila petani menguasai sawah yang cukup luas. Ini berarti bahwa peluang ekonomi di sektor pertanian jauh lebih besar dibandingkan golongan petani kecil. Di luar sektor pertanianpun peluang ekonomi tetap lebih besar bagi petani besar karena golongan ini memiliki relatif surplus produksi pertanian sebagai sumber modal. Jelas di sini gejala kemiskinan menunjuk pada ketimpangan antar golongan petani dalam hal akses peran serta terhadap proses dan hasil pembangunan pertanian.

Jika dilihat secara keseluruhan, revolusi hijau memang menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perubahan perekonomian Indonesia. Keberhasilan ini antara lain dapat dilihat dari meningkatnya produksi beras. Pada periode 1969 – 1989, produksi beras perkapita berhasil ditingkatkan sekitar 46 persen sehingga pada tahun 1984 swasembada pangan (baca=beras) tercapai. Hal ini berimplikasi sangat luas terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk pengurangan penduduk miskin.⁵

⁴Loekman Sutrisno, "Problema Pertanian di Indonesia dan Sumbangan Organisasi Swasta Untuk Memecahkannya," dalam Hagul, P, Ed, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Jakarta : Rajawali, 1992) h. 20-25.

⁵Soetatwo Hadiwigeno, dn Agus Pakpahan, "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia," Prisma, No.3, th. XII, 1993, h.31-32.

Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun secara keseluruhan masih tersisa relatif besar. Penduduk miskin yang tersisa dewasa ini pada umumnya memiliki kemampuan yang paling rendah. Mereka ini terpusat di kantong-kantong kemiskinan, yaitu satu diantaranya adalah di daerah tadah hujan atau lahan kering dengan kualitas sumber daya yang rendah.⁶

Lahan kering yang produktivitasnya rendah cenderung mengakibatkan kesulitan bagi penduduknya terutama bagi petani miskin yang memanfaatkan satu-satunya lahan kering sebagai sumber penghasilan. Kemampuan mereka sangat terbatas hanya pada pemanfaatan sumber daya tersebut tanpa mampu meningkatkan kelestarian produktivitasnya karena melakukan kegiatan pertaniannya hanya pada musim hujan.

Gambaran seperti di atas, mencerminkan pula kondisi masyarakat desa Pemongkong di Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Pemongkong merupakan daerah tadah hujan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan kering berupa tanah tegalan dan tanah persawahan non teknis dengan sendirinya mempengaruhi produktivitas sumberdaya yang secara implisit berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan bagi penduduknya yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Meskipun berbagai program pembangunan pertanian-misalnya bantuan bibit unggul tanaman palawija-telah dikembangkan di desa tersebut namun

⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan IDEA, 1998), h.31, lihat juga Achmad Suryanadan Effendi Pasandaran, "Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan : Penanggulangan Petani Miskin dan Kemiskinan," *Prisma*, No.3, 1993, h.59.

hasilnya tidak berkesinambungan karena masih tergantung pada faktor alam (musim).

Dalam kondisi seperti itu tentu saja mereka (petani) akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi rendahnya pendapatan akibat faktor alam yang tidak menguntungkan, upaya mana merupakan strategi bagi mereka untuk tetap bertahan pada tingkat aman subsistensi demi kelangsungan hidupnya.

Petani bukan masyarakat yang statis, akan tetapi mereka dinamis, artinya mereka memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Bertahannya rumah tangga petani miskin dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik – sosialnya. Mereka memiliki pola-pola, mekanisme, norma dan pranata sosial budaya yang digunakan untuk menyikapi keadaan lingkungan sosialnya dalam menjawab kebutuhan hidup.

Fenomena ini menurut penulis masih tetap perlu dikaji, meskipun studi semacam ini bukan merupakan tema yang baru. Namun untuk memahami kehidupan kaum miskin, termasuk petani miskin terdapat aspek yang berbeda-beda di dalamnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Chambers,⁷ bahwa keliru bila menganggap kaum miskin sebagai golongan yang homogen dan seragam di mana-mana, termasuk strategi mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam suatu daerah yang kecil sekalipun di dapatkan strategi yang jauh berbeda.

⁷ Robert Chambers, Pembangunan Desa : Mulai Dari Belakang, (Jakarta : LP3ES, 1987), h.181.

Studi mengenai aspek kehidupan petani di pedesaan terutama mengenai kemiskinan telah berulang kali dikaji oleh para ahli. Sejauh yang dapat dicatat, ada beberapa studi yang mengungkapkan hal itu, namun periode dan sudut pandangnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Boeke, dalam kajiannya mempelajari cara-cara masyarakat petani (khususnya di Jawa) menghadapi kemiskinan sebagai akibat dari tekanan penduduk. Menurut hasil studi ini, ketika tekanan penduduk di Jawa meningkat telah terjadi penurunan luas tanah pertanian di setiap keluarga yang berimplikasi pada kemiskinan di pedesaan. Ketika hal ini terjadi pada petani Jawa, maka mereka menempuh ekspansi statis (static expansion), yaitu memperluas daerah pertanian namun tetap dengan teknologi semula. Pemukiman dan pertanian baru dibuka secukupnya untuk memenuhi suatu tingkat hidup sederhana dan bila komunitas baru ini sudah terisi penuh akibat tekanan penduduk, ekspansi statis serupa berulang.⁸

Geertz, dengan penekanan yang sama dengan Boeke, melakukan kajian lapangan di pedesaan Jawa juga mempelajari bagaimana petani menanggulangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Berdasarkan hasil kajiannya, Geertz menyimpulkan meningkatnya jumlah penduduk yang begitu pesat, sementara luas tanah tidak bertambah membawa dampak terhadap penduduk (petani) di pedesaan yaitu besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor pertanian. Untuk mengatasi kemelut ini, petani tidak lagi melakukan pola perilaku static

* J. H. Boeke, Dari Empat Juta Menjadi Empat Puluh Empat Juta (Jakarta : Bhratara, 1974).

expansion— seperti yang ditemukan Boeke karena tanah Jawa tak lagi memberikan kemungkinan bagi penduduknya untuk meneruskan pola tersebut - melainkan beradaptasi yang diarahkan ke dinamika internal komunitas yang pada akhirnya menyebabkan involusi pertanian (agricultural involution). Dengan konsep involusi ini Geertz menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat diserap oleh persawahan yang sudah sempit sehingga struktur yang tercipta semakin rumit ke dalam. Meskipun produktivitas pertanian di Jawa mengalami kenaikan, namun karena pertumbuhan penduduk yang besar sekali, kenaikan itu tidak nyata tercapai, bahkan pada akhirnya mengalami kemerosotan. Dalam kondisi involusi demikian masyarakat atau petani Jawa tidak terbelah menjadi golongan tuan tanah dan tunakisma melainkan mempertahankan homogenitas sosial ekonominya dengan cara “berbagi kemiskinan” (shared poverty), yaitu membagi-bagi rezeki yang ada sehingga bagian yang diperoleh masing-masing anggota masyarakat makin lama makin sedikit.⁹

Pada tahun 1970 Singarimbun dan Penny melakukan penelitian di Sriharjo, Yogyakarta. Mereka meneliti tentang kemiskinan petani karena kekurangan tanah pertanian yang digarap sebagai akibat jumlah penduduk yang tinggi. Dalam laporan penelitiannya, disimpulkan di desa Sriharjo telah terjadi hubungan yang timpang antara petani dan tanah pertanian yang semakin lama semakin buruk, sehingga kecenderungan kehidupan petani semakin susah. Di desa itu kurang sekali tanah pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang begitu

⁹ Clifford Geertz, Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1983).

berlebihan, sementara kesempatan untuk bertani kurang sekali sehingga golongan terbesar penduduk (mencapai dua pertiga) tidak memperoleh tingkat pendapatan yang cukup. Meskipun mereka telah berusaha memanfaatkan berbagai metode pertanian modern, beralih ke tanaman komersial, penghematan sumber-sumber yang ada, namun pendapatan yang diperoleh belum memungkinkan untuk hidup "cukupan".¹⁰

Penelitian Hardjono juga mempelajari efek-efek dari tekanan kepadatan penduduk pada sumber tanah. Penelitian Hardjono yang dilakukan di RK (Rukun Keluarga) Sukahaji Kabupaten Bandung ini dalam temuannya melihat bagaimana pertumbuhan penduduk yang tinggi menekan sumber-sumber tanah kemudian berefek pada mengecilnya luas tanah yang dimiliki banyak keluarga akibat pewarisan, bahkan ada yang kehilangan tanah akibat penjualan. Dalam konteks ini pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya perluasan kemiskinan di pedesaan. Efek pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tampaknya, ditambah dengan terjadinya perubahan dalam metode bercocok tanam - menggunakan teknologi modern , kemudian mempengaruhi aspek-aspek kelembagaan, terutama menyangkut hubungan kerja di antara penduduk desa yang pada prinsipnya semakin merugikan petani-petani yang tidak memiliki tanah. Akibatnya sebagian besar mereka tersingkir dari pekerjaan-pekerjaan di sektor pertanian. Untuk mempertahankan hidup, mereka mencari peluang kerja dan berusaha di sektor nonpertanian (occupational

¹⁰ Masri Singarimbun dan D.H. Penny, Penduduk dan Kemiskinan : Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1976).

multiplicity), namun hasil kerja yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹

Pada penelitian lain, Siahaan lebih menekankan pada pemilikan dan penguasaan tanah, teknologi pertanian modern dan hubungan komersial yang semakin meluas dalam melihat kemiskinan petani di pedesaan. Studi ini mempelajari akibat-akibat dari distribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak merata terhadap lapisan tertentu di kalangan petani dengan melihat sikap mereka terhadap pembaharuan dari luar, mobilisasi yang timbul dan pergeseran okupasi yang mungkin diraih di luar sektor pertanian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan struktural sebagai akibat miskin tanah, penggunaan teknologi pertanian modern dan hubungan komersial yang semakin meningkat mengakibatkan tersingkirnya lapisan petani miskin dalam proses produksi. Hal ini membuat petani menciptakan suatu mobilitas di dalam usaha mencari alternatif untuk bertahan hidup meskipun alternatif yang masih bisa dijangkau di luar sektor pertanian ternyata tidak lebih baik dari sektor pertanian.¹²

Studi Penny dan Ginting pada tahun 1971/1973 berkaitan dengan pekarangan, petani dan kemiskinan merupakan upaya untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai peran pekarangan dalam perekonomian rumah tangga di desa Sriharjo.

¹¹ Joan Hardjono, Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990).

¹² Hotman M. Siahaan, "Tekanan Struktural dan Mobilisasi Petani di Pedesaan," Prisma, 11/12. Nop/Des. 1983, h. 50-62. Lihat juga Siahaan, Struktur Kemiskinan Masyarakat Petani di Pedesaan, (Surabaya, FISIP UNAIR, 1981).

Studi ini bukan saja mempelajari pekarangan dan petani, akan tetapi kemudian melihat hubungan antar manusia yang terjadi oleh karena atau akibat dari kompleksitas pekarangan dan usaha pekarangan. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa meskipun perhatian kurang kepada pekarangan, namun sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga lebih tinggi dari peran sawah. Kenyataan menunjukkan bahwa di Sriharjo peran pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 49 persen, sedangkan sawah hanya 35 persen dan usaha lain 16 persen.¹³

Suatu studi kasus di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kameo meneliti mengenai sebab-sebab yang menimbulkan kemiskinan petani peternak kecil. Dalam laporannya Kameo menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami petani peternak kecil di daerah ini disebabkan oleh terperangkap hutang dan eksploitasi oleh pedagang pengumpul dan pemberi pinjaman uang lokal. Selain itu lembaga-lembaga yang disponsori pemerintah seperti KUD, menyusutnya populasi ternak yang berkualitas baik untuk penggemukan serta kesulitan air dan pakan hijauan dalam musim kemarau, juga erat kaitannya dengan kemiskinan petani ternak.¹⁴

¹³D.H. Penny dan Meneth Ginting, Pekarangan, Petani dan Kemiskinan: Suatu Studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat Tani di Sriharjo Pedesaan Jawa, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984).

¹⁴Daniel D. Kameo, "Kemiskinan Petani Peternak Kecil di Nusa Tenggara Timur : Studi kasus di Kabupaten Kupang dan Timor tengah Selatan," Analisis CSIS, No. 1 Jan-Peb. 1996 h. 5-12.

Penelitian sebagaimana diuraikan di atas, lebih banyak melihat kemiskinan petani yang berkaitan dengan tekanan-tekanan struktural dan mendasarkan telaah mereka atas fakta-fakta masyarakat pertanian yang mengusahakan lahan basah (dengan sistim irigasi yang baik di dataran rendah). Kecuali penelitian yang dilakukan Siahaan (daerah penelitiannya mencakup pertanian lahan basah dan lahan kering), Penny dan Ginting serta Kameo yang juga berkaitan dengan lahan kering, namun penelitian inipun tidak menjelaskan secara mendalam bagaimana strategi petani di lahan kering melakukan upaya mengatasi kemiskinan dan kelangsungan hidupnya.

Berbeda dari studi-studi terdahulu, fokus penelitian ini menekankan pada upaya petani mengatasi kemiskinannya. Dengan kata lain penelitian yang akan dilakukan ini berusaha untuk mengetahui bagaimana petani miskin yang berada di daerah tadah hujan (lahan kering) menyiasati tekanan-tekanan ekonomi yang dialami. Strategi macam apa yang dilakukan, termasuk alternatif usaha untuk menambah penghasilan.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa : pertama, penelitian tentang kemiskinan petani di daerah tadah hujan (lahan kering) perlu dilanjutkan dan diperdalam untuk mengetahui cara-cara atau strategi petani miskin dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Kedua, penelitian mendalam mengenai tema tersebut jarang dilakukan di luar Jawa . Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk

menambah wawasan ilmiah di bidang sosiologi pedesaan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan pedesaan.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Strategi macam apa yang dilakukan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) untuk menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari, termasuk mengatasi masa-masa krisis ?
2. Bagaimana peran negara /pemerintah melalui program bantuan peningkatan pendapatan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) ?

Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering)
2. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan strategi survival yang dilakukan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari, termasuk mengatasi masa-masa krisis.

3. Mengkaji peran negara/pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering).

Manfaat penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi sosiologi pedesaan
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah atau bagi para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani yang berada di daerah tadah hujan (lahan kering) yang selama ini relatif masih tertinggal.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih mendalam fenomena yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Petani dan Kehidupannya

Salah satu ciri terpenting dari masyarakat pedesaan yang membedakannya dengan masyarakat lain -misalnya dengan masyarakat kota- adalah bahwa sebagian besar menggantungkan kehidupannya sebagai petani. Apa yang dimaksud dengan petani, tampaknya ada perbedaan tertentu di kalangan ilmuwan tergantung dari sudut mana mereka melihatnya.

Kroeber misalnya, tekanannya yang sangat klasik bahwa petani adalah “bagian masyarakat dengan bagian budayanya”.¹⁵

Sejalan dengan hal itu yang juga lebih menitik beratkan pada kultural termasuk nilai-nilai dan persepsi mereka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Everest M. Rogers. Ia mencoba merumuskan karakteristik petani yang dapat diidentifikasi sebagai karakteristik dari kebudayaan masyarakat desa yaitu sebagai berikut :

1. Adanya saling kurang percaya dalam hubungan antara sesama petani, karena harus memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas.
2. Petani memiliki pandangan yang sempit sehingga hal-hal yang baik dan keinginan untuk maju terbatas.
3. Ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah.
4. Petani bersikap familisme atau keakrabannya terjalin dengan orang lain secara akrab dan secara kekerabatan.

¹⁵ Henry A. Landsberger, Yu. G. Alexandov, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, terjemahan : Aswab Mahasin, (Jakarta : CV. Rajawali, 1984), h. 10; lihat juga Robert Redfield, Masyarakat Petani dan Kebudayaan, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), h. 23

5. Adanya kelonggaran untuk menerima atau menciptakan ide-ide atau inovasi baru.
6. Kecenderungan buat memandang dirinya rendah sehingga kurang berkepentingan untuk merencanakan masa depan.
7. Kurang memiliki sifat untuk menahan berbagai kenikmatan saat ini dalam rangka mencapai keuntungan yang lebih besar di masa depan.
8. Memiliki pandangan yang sempit mengenai dunia luar yang kaitannya dengan bagaimana mengabsorpsi sesuatu yang datang dari luar komunitas mereka.
9. Memiliki rasa empati yang rendah.¹⁶

Sementara itu antropolog Robert Redfield memandang petani sebagai masyarakat terbelah artinya meskipun mereka hidup dalam tradisi budaya di pedesaan mereka juga tersentuh oleh kehidupan luar seperti pasar dan kekuasaan. Disisi lain Redfield juga melihat petani sebagai masyarakat bertradisi kecil (rendah), artinya mereka hidup dalam lingkungan tradisi desa yang relatif homogen dan diwarnai oleh adat setempat, berdasarkan pendekatan kajian religi, ritual dan mitos dan umumnya merupakan produsen kelas bawah yang berorientasi subsisten.¹⁷

Serupa dengan itu, dalam konteks Indonesia Koentjaraningrat menganggap petani atau peasant itu rakyat pedesaan yang hidup dari pertanian dengan teknologi lama, tetapi merasakan diri sebagai bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar. Sistem ekonomi dalam masyarakat petani berdasarkan pertanian yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan kesatuan produksi yang tidak berspesifikasi.¹⁸

¹⁶ Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), h. 7-16.

¹⁷ Redfield, *Masyarakat...*, h. 21.

¹⁸ Koentjaraningrat, "Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," dalam Sajagyo dan Pudjiwati Sajagyo, Eds, *Sosiologi Pedesaan*, jilid 1, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993), h. 19-20.

Pekerjaan yang dilakukan petani yaitu tindakan yang diliputi perasaan religius. Tekanan petani terhadap pekerjaan pertanian adalah kewajiban utama dan atas pertimbangan keamanan, rasa hormat dan rasa religius.¹⁹ Di Indonesia sifat religius yang menghinggapi cara berpikir petani di pedesaan telah dihubungkan antara mentalitas seperti itu dengan kelakuan ekonomi dari petani. Namun tindakan seperti itu tidaklah sepenuhnya menerangkan segala pola dan kelakuan mereka dalam kehidupan masyarakat, mereka juga berbuat berdasarkan cara berpikir yang rasional dengan logika yang berdasarkan akal sehat.²⁰ Dalam hubungannya dengan desa, Boeke mengatakan “desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat ketentraman.” Karenanya Boeke menganggap bahwa petani tidak suka bekerja, bersifat statis, tidak mempunyai inisiatif, dan hanya suka meminta kepada orang-orang kaya.²¹

Pendapat ilmuwan sosial seperti di atas pada dasarnya memandang petani dalam citra dan identitas yang negatif dan pesimistis. Pandangan ilmuwan sosial yang menempatkan petani dalam identitas dirinya yang negatif dan pesimistis, tidaklah berarti itulah sosok petani yang sesungguhnya, sebab belakangan muncul pendapat dan pemikiran yang lebih optimis dalam memandang petani. Ini misalnya tampak dari pemikiran yang dikemukakan oleh Popkin, yang lebih memandang petani sebagai sosok masyarakat yang cukup rasional.²²

¹⁹ Redfield, *Masyarakat*....., h. 92-93.

²⁰ Koentjaraningrat, “Rintangan,” h. 21.

²¹ Idem, h. 20.

²² Samuel L. Popkin, *The Rational Peasant : The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, (Berkeley : University of California Press, 1979).

Sementara itu, petani dalam penelitian ini lebih sebagai peasant bukan farmer. Dalam pengertian peasant seperti yang dikemukakan oleh Wolf, petani bukanlah orang bercocok tanam primitif dan bukan pula petani komersial. Kalau yang bercocok tanam primitif di mana bagian terbesar dari produksinya adalah untuk kebutuhan sendiri dan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kekerabatan. Dan bukan pula untuk tujuan komersial atau yang menghasilkan keuntungan berdasarkan perhitungan rugi laba. Sedangkan farmer, mereka sebenarnya adalah pengusaha pertanian yang berorientasi pasar dan bisnis untuk kemudian mencari laba dari usaha taninya.

Petani dalam arti peasant di samping tidak melakukan usaha tani dalam konteks ekonomi (komersial) namun tidak pula tergolongkan komunitas primitif, melainkan melakukan usaha tani dalam konteks pengelolaan rumah tangga. Karena itu yang lebih menonjol dalam budaya peasant ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keamanan subsistensi rumah tangga untuk jangka waktu tertentu. Misalnya mengumpulkan bahan pangan untuk keluarga, perbaikan papan, membeli pakaian, pengadaan alat-alat rumah tangga dan lain-lain.²³

Karakteristik lain dari sistem internal masyarakat petani adalah adanya keinginan untuk bebas mengembangkan pekerjaan sendiri dalam ikatan keluarga

²³ Eric R. Wolf, Petani : Suatu Tinjauan Antropologis, (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), h. 2-5 ; lihat juga Redfield, Masyarakat..., h. 19.

menurut cara dan waktu secara bebas. Menjadi “tuan sendiri” jelas menumbuhkan kekuatan dalam menerima kehidupan dan kerja yang sulit, dan dalam masa susah membatasi diri atau meningkatkan kegiatan usaha.²⁴

Ciri-ciri tersebut akan menunjang kemandirian ekonomi petani dalam hal ekonomi dan politik. Dalam hal situasi politik yang tidak menentu dan bencana ekonomi, kemampuan hidup secara psikis bagi keluarga petani lebih mudah dibandingkan dengan komunitas lain -misalnya orang kota -yang tergantung pada pasar, karena petani bisa hidup dari hasil tanahnya sendiri.

Namun apabila kita berbicara masalah petani, maka pembicaraan akan menyentuh masalah petani di pedesaan yang memiliki sifat tunggal dalam hal mata pencaharian serta bercirikan modal dan teknologi yang sederhana. Karena ketunggalan tumpuan dan sumber kehidupan petani, maka kehidupan mereka amat rawan terhadap krisis subsistensi.

Dengan situasi ini, maka Scott begitu gamblang menggambarkan bahwa sesungguhnya posisi kaum tani “...ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya.”²⁵

Gambaran seperti ini diberikan oleh Scott terhadap nasib kaum tani di Asia Tenggara termasuk Indonesia, di mana lahan yang kecil, keadaan cuaca, cara-cara

²⁴ Peter von Blanckenburg dan Reinhold Sachs, “Masyarakat Tani dalam Pembangunan,” dalam Ulrich Planck, Ed, *Sosiologi Pertanian*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989), h. 41.

²⁵ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, terjemahan : Hasan Basari, (Jakarta : LP3ES, 1994), h.1

tradisional dan pajak oleh negara telah mengakibatkan kekurangan sumber pendapatan atau bahkan kelaparan.

Lebih jauh Scott mengemukakan bahwa pada umumnya petani selalu mendapati dirinya tergantung kepada belas kasihan alam yang banyak ulahnya. Meski banyak alternatif yang ada untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan, akan tetapi karena ia memiliki margin yang kecil, maka dengan alternatif yang paling baik sekalipun ia tetap rawan.²⁶ Ketidakpastian musim akan mendorong mereka berada dalam posisi yang makin rawan terhadap krisis-krisis subsistensi karena hasil usahanya yang sangat tergantung pada keadaan alam membuat penghasilan mereka tidak menentu yang implikasi selanjutnya pada tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga.

Konsep tentang Kemiskinan

Isu yang selalu berkembang dibicarakan dalam berbagai kajian tentang kemiskinan adalah konsep tentang kemiskinan. Sampai sekarang ini belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai hal itu. Hal ini dimungkinkan karena kemiskinan itu sendiri adalah fenomena yang kompleks dan dapat bermakna ganda yaitu absolut dan relatif serta bersifat multidimensional.

²⁶ Idem, h. 39.

Sehubungan dengan makna ganda tersebut, Mas'ood,²⁷ menjelaskan perbedaan konsep absolut dan relatif dengan menggunakan istilah subsistence dan relative deprivation. Konsep kemiskinan subsistence menganggap bahwa kemiskinan adalah persoalan ketidakmampuan memperoleh tingkat penghasilan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kemiskinan dalam konteks ini didasarkan atas income perkapita untuk menentukan standar tertentu seperti garis kemiskinan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lain seperti beras dan gizi.²⁸

Sementara itu, konsep kemiskinan dalam arti relative deprivation merupakan salah satu pendekatan yang lebih luas karena mencakup aspek sosial. Kemiskinan itu sendiri merupakan suatu produk dari persepsi sosial terhadap kebutuhan manusia. Makna kemiskinan ini dikatakan relatif karena berkaitan dan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan antar lapisan sosial dalam suatu daerah.²⁹ Makna yang relatif ini juga karena kemiskinan itu dapat diinterpretasikan secara subyektif, tergantung siapa yang melihatnya. Misalnya miskin tidaknya seseorang tergantung antara lain dari besarnya kepemilikan tanah pertanian dan kepemilikan hewan dalam

²⁷ Mohtar Mas'ood, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994) h. 136.

²⁸ Vidhyandika Moeljarto, "Kemiskinan : Hakekat, Ciri, Dimensi dan Kebijakan " Analisis CSIS No:3, Mei – Juni, 1994, h. 199.

²⁹ Idem

jumlah tertentu, kondisi rumah tertentu, kemampuan menyekolahkan anak, tingkat kesulitan hidup dan jenis makanan yang dikonsumsi.³⁰

Apabila dilihat dari penyebabnya, konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu kemiskinan alamiah (natural poverty), kemiskinan buatan (artificial poverty) dan kemiskinan yang bersumber dari hambatan manusia (kemiskinan kultural).

Kemiskinan alamiah merujuk pada faktor-faktor alami yaitu kondisi keterbatasan jumlah dan mutu sumber daya serta teknologi pelayannya yang membawa kemiskinan bagi penduduk yang mendasarkan nafkah padanya. Kelangkaan sumber daya alam seperti kondisi tanah yang tandus, tidak adanya pengairan dan kelangkaan prasarana lainnya merupakan faktor yang berpengaruh pada kemiskinan.³¹ Sedangkan kemiskinan buatan lebih erat hubungannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan ini terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata.³²

³⁰ Lihat Sayogyo, Ed, Kemiskinan dan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994).

³¹ Rudolf S. Sinaga dan Benyamin White, "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Dalam Hubungannya Dengan Kemiskinan Struktural," dalam Alfian, Eds, Kemiskinan Struktural : Suatu Bunga rampai, (Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980). H. 143; lihat juga Mas'oed, Politik..., h. 138.

³² Sinaga, Idem.

Gejala seperti ini disebut juga kemiskinan struktural.³³

Sejalan dengan pendapat diatas mengenai kemiskinan buatan, Mas'oed,³⁴

juga menjelaskan bahwa:

Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan (sering kali akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Misalnya, walaupun berbagai sumber daya ekonomi, apabila dibagi dengan merata, tersedia cukup untuk semua, nyatanya banyak anggota masyarakat yang sama sekali tidak punya kesempatan untuk memperhatikannya karena struktur yang mendukung mereka tidak memberi kemungkinan untuk itu.

Lebih jauh Siahaan, dalam Soekartawi, menyatakan bahwa kemiskinan struktural terjadi karena kepincangan struktur sistem sosial, sehingga orang tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia, atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki nasibnya selalu terbentur dengan sistem yang berlaku.³⁵

Sementara itu, kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup dan budayanya. Menyangkut kemiskinan kultural ini, menurut Lewis muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, dan disebutnya sebagai kebudayaan kemiskinan. Menurutnya kaum miskin tidak respek dan tidak terintegrasi

³³ Selo Soemardjan, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan : Pengantar," dalam Alfian, Eds, idem, h.5.

³⁴ Mas'oed, Politik..., h.138.

³⁵ Lihat soekartawi dan Mustafa A, "Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan," Buletin Studi Indonesia, No.5, 1995 h.94.

dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga dalam masyarakat. Seseorang atau kelompok masyarakat dalam lingkungan kebudayaan kemiskinan cenderung meresapi nilai-nilai dan kebudayaan tersebut. Mereka memiliki karakter apatis, fatalisme, sinisme, bermotivasi rendah, tidak percaya pada pemerintah, tidak berdaya, rasa rendah diri, berorientasi pada masa sekarang dan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Konsep kebudayaan kemiskinan adalah tipe ideal, tidak semua ciri harus hadir untuk bisa menjelaskan tentang kebudayaan kemiskinan, demikian pula masing-masing belum tentu bisa berdiri sendiri. Hubungan, fungsi dan pola semua ciri itulah yang menentukan kebudayaan kemiskinan. Pola-pola perilaku dan sikap yang ditunjuk oleh kaum miskin merupakan suatu cara untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan yang serba kurang. Cara hidup inilah yang merupakan landasan bagi terbentuknya kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki.³⁶

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensional. Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (material well-being), tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being). Untuk mengetahui seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut. Namun untuk mengetahui

³⁶ Oscar Lewis, "Kebudayaan Kemiskinan," dalam Andre Bayo Ala, Ed, Kemiskinan dan Strategi Memerangi kemiskinan, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.17-24; lihat juga Leen Boer, "Mutiar Dalam Lumpur : "Tinjauan Kembali Terhadap Budaya Kemiskinan," Transformasi, seri IV, h 34; Persudi Suparlan, Ed, Kemiskinan di Perkotaan : Pendahuluan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), h.xviii.

berapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi relatif (kualitatif).³⁷

Sehubungan dengan hal itu, Effendi³⁸ mengemukakan, ada tiga dimensi yang menyertai kemiskinan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi politik. Kemiskinan berdimensi ekonomi diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang. Sumberdaya yang dimaksud mencakup semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut pengertian ini, kemiskinan dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok minimum untuk hidup secara layak dan kebutuhan minimum ini dijadikan sebagai standar garis kemiskinan yang mana cara demikian merupakan pengukuran kemiskinan absolut. Di dalam dimensi ekonomi ini termasuk pula pengertian kemiskinan relatif. Kemiskinan berdimensi sosial diartikan sebagai kekurangan dukungan jaringan sosial dan struktur sosial untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan bagi peningkatan produktivitas seseorang. Dalam pengertian ini, kemiskinan juga disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang dapat menghalangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Faktor penghambat bisa datang dari luar kemampuan seseorang. Misalnya birokrasi

³⁷ Moeljarto, "Kemiskinan...", h.200.

³⁸ Tajudin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h.249-253; bandingkan dengan : G.F.R. Ellis, dalam Moeljarto, Kemiskinan..., h.201.

atau peraturan – peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang sebenarnya tersedia baginya. Kemiskinan ini disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Faktor penghambat bisa juga berasal dari dalam diri seseorang atau kelompok orang. Kemiskinan ini dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kelompok orang itu sendiri. Sedangkan kemiskinan berdimensi politik melihat pada penekanan derajat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah tatanan sistem sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumberdaya.

Secara konseptual, perbedaan wujud kemiskinan dapat dirumuskan sebagaimana yang diuraikan di atas. Namun secara fakta dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah untuk membedakan atau memisahkan wujud kemiskinan itu, karena kadangkala wujud kemiskinan itu hadir secara bersamaan dalam suatu kelompok masyarakat termasuk gejala kemiskinan dalam wujud lainnya.

Lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang miskin, hal ini berkenaan dengan bagaimana mengidentifikasi kemiskinan itu. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan ukuran-ukuran yang dipergunakan dalam menentukan garis batas kemiskinan. Sebelumnya telah diuraikan bahwa terdapat dua konsep kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. .

Operasionalisasi dari kemiskinan absolut mewujudkan berbagai ragam dalam ukuran kuantitatifnya. Di Indonesia ada beberapa cara mengukur garis kemiskinan yaitu : (1) metode yang dikembangkan oleh Sayogyo; (2) metode yang

dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS); (3) Indeks Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).

Garis kemiskinan dengan cara Sayogyo adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi yang disetarakan ke dalam kilogram beras. Dengan cara ini Sayogyo membedakan tiga golongan orang miskin di daerah pedesaan yaitu : (1) paling miskin dengan pengeluaran di bawah 180 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun, (2) miskin sekali = pangan tidak cukup di bawah 240 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun, dan miskin yaitu pengeluaran rumah tangga di bawah 320 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun.³⁹

Biro Pusat Statistik memberikan alternatif untuk mengukur garis kemiskinan dengan menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi setiap orang per hari. Menurut Badan ini setiap orang minimum harus memenuhi 2100 kalori per hari. Namun karena hal-hal lain yang juga diperhitungkan adalah kebutuhan non pangan seperti perumahan, bahan bakar, penerangan, air, sandang, jasa-jasa dan sebagainya, maka kemudian kriteria itu diubah dalam angka rupiah. Karena harga kebutuhan itu berubah ubah, maka garis kemiskinan yang ditetapkan juga mengalami perubahan setiap tahun.

³⁹ Sayogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan," dalam Redaksi Ekonomi Harian Kompas, Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965-1981, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), h.401

Metode indeks Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) diukur dengan nilai barang dan jasa minimum yang diperlukan oleh satu keluarga kota per bulan dan ditetapkan setiap Propinsi.

Sementara itu dalam hubungannya dengan kemiskinan petani, salah satu kriteria untuk melihat petani miskin adalah luas tanah garapan yang diusahakan. Untuk Jawa, luas tanah garapan kurang dari atau sama dengan 0,25 hektar dan di luar Jawa kurang dari 0,50 hektar atas dasar tanah sawah yang tingkat produktivitasnya tinggi (dapat ditanami dua kali setahun). Sementara itu, untuk tanah darat digunakan ukuran yaitu untuk Jawa kurang dari atau sama dengan 0,50 hektar dan luar Jawa kurang dari satu hektar.⁴⁰

Dengan kriteria serupa, Singarimbun dan Penny⁴¹ membedakan istilah petani “cukupan” dengan petani “noncukupan.” Berdasarkan hasil penelitiannya di Sriharjo Jawa Tengah Singarimbun memberikan gambaran bahwa petani dikatakan “cukupan” bila ia dapat mengelola tanah seluas satu hektar dengan perincian 0,7 hektar sawah tadah hujan dan 0,3 hektar tanah darat. Dengan luas tanah satu hektar petani “cukupan” umumnya menghasilkan 900 kg beras (senilai dengan beras) dari sawah tadah hujan ditambah dengan yang didapatnya dari tanah darat senilai 300 kg beras untuk menghidupi 5 orang anggota rumah tangga.

⁴⁰ Lihat Jacob Ampang, Identifikasi dan Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani miskin di Kabupaten Jember dan Tulungagung, (Yogyakarta, PPS UGM, 1984) h.75

⁴¹ Singarimbun, Penduduk ..., h.29.

Ukuran dan kriteria petani miskin dalam penelitian ini, selain standar yang digunakan oleh Sayogyo, juga dilihat dari luas tanah yang dikuasai dan diusahakan (menurut Singarimbun) serta keadaan lingkungan fisik dan perumahan rumah tangga petani secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengidentifikasi petani miskin di desa penelitian.

Paradigma Pembangunan Orde Baru

Berbagai upaya sesungguhnya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama tiga dekade terakhir ini pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan yang secara ideal untuk mendukung ekonomi rakyat – terutama di pedesaan yang umumnya berbasis sektor pertanian.

Agaknya strategi yang dipergunakan pemerintah pada awalnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari investasi (modal dan teknologi), maka proses pertumbuhan ekonomi itu secara linier dengan sendirinya akan “menetes” keseluruh sektor dan lapisan masyarakat.⁴²

⁴² Sumodiningrat dan Kuncoro, :Strategi...” h. 41

Dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia, pendekatan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah orde baru dapat dilihat dalam pembangunan pertanian yang telah menjalankan revolusi hijau dengan mengadopsi inovasi teknologi (pupuk, bibit unggul dan pestisida) ditunjang oleh inovasi kelembagaan (penelitian, perkoperasian, kelompok tani dan perkumpulan petani air-P3A) dan perangkat fisik (perbaikan irigasi) dengan orientasi utama pada pencapaian dan pelestarian swasembada pangan.⁴³

Prestasi nyata revolusi hijau pada satu sisi telah membawa perubahan-perubahan dibidang ekonomi dan komersialisasi pertanian. Namun di balik keberhasilan itu revolusi hijau yang selama ini menjadi pendorong peningkatan produksi tidak hanya bersifat positif melainkan juga dapat berakibat negatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa revolusi hijau--yang notabene merupakan program secara terpusat--telah berakibat membatasi bahkan tersingkirnya golongan petani miskin dan buruh tani dari sistem produksi pertanian. Proses ini menyebabkan pendapatan petani kaya semakin besar sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di pedesaan.⁴⁴

Asumsi trickle down effect yang mendasari pendekatan pertumbuhan ternyata mengalami kegagalan, bahkan kesenjangan yang ada dalam masyarakat justru semakin melebar. Salah satu kelemahan pendekatan pembangunan yang hanya

⁴³ Tjondronegoro, "Revolusi..."

⁴⁴ Lihat William L. Collier dkk., "Sistem Tebasan, Bibit Unggul, dan Pembaharuan Desa di Jawa, *Prisma* 3, No. 6, 1974 h. 13-30. Lihat juga Siahaan, "Tekanan ..."

mementingkan pertumbuhan adalah "ia" biasanya penuh prasangka sehingga dalam banyak hal mengesampingkan potensi, aspirasi dan kemampuan penduduk pinggiran.

Menyadari kelemahan itu, maka untuk menempatkan masyarakat (petani) miskin memperoleh kebebasan berekspresi, model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh Chambers⁴⁵ patut diperhatikan. Dalam pendekatan pembangunan pedesaan sebaiknya bersumber pada potensi masyarakat, memprioritaskan kepentingan golongan miskin dan membangun dari bawah.

Dikaitkan dengan paradigma perencanaan pembangunan, pendekatan model Chambers tersebut identik dengan strategi pemerataan. Menurut Sumodinigrat⁴⁶, dalam strategi yang mengutamakan pemerataan ada tiga hal yang penting, pertama, upaya itu harus terarah. Inilah yang disebut dengan "keberpihakan". Ia di tujukan langsung kepada yang memerlukan, dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya, sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, program itu harus mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan : (a) agar bantuan tersebut efektif, karena sesuai dengan kehendak, kemampuan serta kebutuhan mereka; (b) sekaligus memperkuat (empowering) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

⁴⁵ Chambers, Pembangunan ...

⁴⁶ Lihat Sumodinigrat, Membangun..., h.141

Ketiga, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, juga dari segi penggunaan sumber daya, bisa efisien.

Dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, pendekatan pembangunan yang disebut dua terakhir lebih dikenal sebagai strategi “dari bawah keatas” (bottom up strategies). Menurut pendapat beberapa ahli,⁴⁷ strategi “dari bawah ke atas” penting atas dasar beberapa pertimbangan :

1. Melalui mekanisme “dari bawah ke atas” masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada pihak atas.
2. Melalui mekanisme “dari bawah ke atas” masyarakat dapat menyumbangkan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada pemerintah.
3. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, mupakat atau kompromi.
4. Melalui mekanisme tersebut juga dapat dilakukan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
5. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi proses exchange antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk dapat turut mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anggota masyarakat, kelompok-kelompok yang berpartisipasi harus memiliki kekuasaan yang nyata.

⁴⁷ Lihat Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.127-129.

Petani Miskin dan Strategi Mempertahankan Kelangsungan Hidup

Meskipun petani miskin di pedesaan bergelut dengan kondisi subsisten, terbelit kebutuhan hidup secara sosial ekonomi, mereka tetap memiliki cara atau strategi dan usaha sendiri yang sering kali unik sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Dalam situasi petani di pedesaan yang berkondisi subsisten, maka upaya yang ditempuh adalah menerapkan “etika subsistensi”. Etika ini menurut Scott merupakan suatu yang khas dalam kehidupan petani yang ditandai oleh hubungan moral yang melahirkan “moral ekonomi” yang lebih mengutamakan “dahulukan selamat” dan menjauhkan diri dari garis bahaya. Moral ekonomi ini muncul dari dilema ekonomi yang dihadapi petani. Oleh karena mereka hidup begitu dekat dengan garis subsistensi dan menjadi permainan cuaca serta tuntutan dari pihak luar, maka rumah tangga petani tak mempunyai banyak peluang untuk menerapkan ilmu hitung dalam mencari keuntungan maksimal menurut ekonomi klasik yang tradisional. Suatu hal yang jelas adalah bahwa hal yang dilakukan petani adalah berusaha untuk menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya.⁴⁸

Sejalan dengan yang dikemukakan von Blanckenburg mengenai perilaku petani dalam menghadapi resiko, maka keputusan yang diambil oleh petani ternyata lebih cenderung kepada keamanan daripada hasil. Dengan kata lain, usaha menekan resiko ekonomi sekecil mungkin lebih didahulukan dari keinginan mendapatkan

⁴⁸ Scott, *Moral...*, h. 7

keuntungan dan akhirnya tindakan ini akan membatasi keinginan untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁹

Selanjutnya sebagai strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, petani akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan sumberdaya yang mereka miliki. Strategi tersebut menurut Scott dapat berupa :

1. Usaha mengencangkan ikat pinggang. Strategi ini dilakukan dengan merubah pola konsumsi makanan dari mutu yang lebih baik ke mutu yang lebih sederhana baik yang menyangkut jenis maupun jumlah yang di konsumsi.
2. Memanfaatkan alternatif subsistensi dengan menganekaragamkan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Strategi ini dapat berupa berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi.
3. Membentuk jaringan sosial baik dengan kerabat, tetangga, ataupun dengan hubungan patron-klien. Strategi ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada sanak saudara, kawan-kawan sedesa atau memanfaatkan hubungan dengan pelindung (patron), dimana ikatan patron dan kliennya merupakan bentuk asuransi di kalangan petani.⁵⁰

⁴⁹ von Blanckenburg, "Masyarakat...", h.44.

⁵⁰ Scott, *Moral...*, h. 40-43

Dalam hubungannya dengan perubahan pola konsumsi makanan, Gsanger dan Bottcher mengemukakan bahwa pola konsumsi rumah tangga miskin berjalan sesuai dengan fluktuasi musim panen, sehingga konsumsi bahan makanan bervariasi sebagai fungsi dari musim panen.⁵¹

Sehubungan dengan hal itu, menarik untuk dikaji hasil penelitian Abdoellah, bahwa perubahan pola konsumsi petani di daerah transmigrasi Barambai menurun pada musim paceklik dan terdapat perbedaan antara dua komunitas asal transmigran yaitu transmigran dari Bali dan Jawa. Menurunnya produksi padi memaksa petani dari kelompok etnik Bali merubah makanan pokoknya dari beras kembali ke ketela pohon. Petani asal Bali ini hanya makan nasi pada hari tertentu atau selama musim kerja di sawah di mana mereka pada saat itu banyak energi yang diperlukan. Sedangkan etnik Jawa mengurangi jumlah beras yang dikonsumsi selama musim paceklik dan mencampurnya dengan gaplek. Beberapa petani juga berusaha mengurangi jumlah pengeluaran untuk makan. Pada waktu musim paceklik pengeluaran untuk makan berkurang 8-30 persen. Selain perubahan pola konsumsi, kedua kelompok petani di daerah transmigrasi Barambai juga beradaptasi dengan mencetak sawah baru, menanam ketela pohon pada lahan sawah, merubah lahan menjadi kebun, memelihara ternak, migrasi dan strategi reproduksi.⁵²

⁵¹ Gsanger H. dan D. Bottcher, "Jaminan Pangan dan Kemiskinan di Daerah Pedesaan," dalam Kaarl-Heinz W. Bechtold, Eds, Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988).

⁵² Oekan Soekotjo Abdoellah, "Pemahaman Adaptif Masyarakat Transmigran : Pendekatan Antropologi Ekologi," Prisma, 7, Juli-Agustus 1997, h. 60

Lebih jauh Scott menjelaskan bahwa pilihan sebagai alternatif meskipun mungkin di antaranya tidak menyenangkan dapat berupa mempekerjakan semua anggota keluarga, mengesampingkan kewajiban seremonial, bekerja atas dasar bagi hasil, beremigrasi, menderita kemiskinan, minta belas kasihan orang lain atau menjadi anak buah tuan tanah. Namun menurut Scott pilihan-pilihan itu biasanya meminta pengorbanan-pengorbanan manusiawi yang besar.⁵³

Meskipun demikian, hasil penelitian Carner mencatat bahwa salah satu cara yang dilakukan rumah tangga miskin apabila kebutuhan pangan tidak dapat dipenuhi secara memadai adalah menganekaragamkan kegiatan kerja atau sumber usaha dengan mengerahkan sebanyak mungkin anggota rumah tangga termasuk wanita ke dalam kewajiban ikut mencari penghasilan, walaupun upahnya rendah atau bahkan hanya mendapatkan upah makan.⁵⁴

Mengenai jaringan sosial, Clark mengemukakan bahwa dalam upaya memperbaiki kondisi hidup rumah tangga miskin dapat dilakukan dengan membentuk jaringan sosial yaitu : (a) informal support network, artinya suatu jaringan sosial informal dengan melakukan pertukaran timbal balik yang berupa uang, jasa atau barang kebutuhan pokok, (b) flexible household composition yaitu mengubah komposisi keluarga misalnya menitipkan anak pada neneknya, (c) multiple sources of

⁵³ Scott, *Moral...*, h. 313

⁵⁴ Goerge Carner, "Kelangsungan hidup, saling ketergantungan dan Persaingan dikalangan Kaum Miskin di Filipina," dalam D.C. Korten dan Syahrir. Eds, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988).

income yaitu dengan menganekaragamkan sumber penghasilan, dan (d) un authorize land use yaitu dengan menggunakan tanah yang tidak sah untuk perumahan.⁵⁵

Sementara itu, Heyzer juga menunjukkan tiga bentuk pola jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan keluarga miskin dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yaitu : (a) sistem jaringan sosial yang didasarkan pada bentuk kekerabatan dan kekeluargaan, (b) didasarkan pada kawan senasib, dan (c) sistem sosial dengan pola hubungan yang vertikal yaitu dengan membentuk hubungan dengan orang lain yang dianggap memiliki kelebihan sumberdaya lainnya.⁵⁶ Bentuk hubungan sosial yang disebut terakhir dapat dilakukan dengan pola hubungan patron-klien.

Menurut Scott, pola hubungan patron-klien dapat dipahami karena adanya perbedaan mencolok dalam penguasaan kekayaan, status serta kekuasaan yang paling tidak diakui oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Scott juga menyatakan bahwa persekutuan antara patron-klien merupakan hubungan saling tergantung. Dalam kaitan ini, aspek ketergantungan yang cukup menarik adalah sisi ketergantungan klien kepada patron. Ketergantungan semacam ini karena adanya utang budi klien kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung.⁵⁷

⁵⁵ Mari H. Clark, "Women-Headed Household and Poverty," dalam Gelpi, Barbara C., Et al., Women and Poverty. (Chicago: The University of Chicago Press, 1986).

⁵⁶ Noeleen Heyzer, "Women Migration and Income Generation," dalam Working Women in South East Asia, (Open University Milton Keynes, 1986)

⁵⁷ James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia," dalam Steffen W. Schmid, Et al., Friend, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism, (Los Angeles: University of California Press, 1977), p.132.

Dalam usaha menambah penghasilan agar kebutuhan hidup tercukupi, petani akan mencari pekerjaan sampingan. Ragam pekerjaan sampingan ini dapat dilakukan baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian. Namun untuk berpaling kepada kesempatan kerja di luar sektor pertanian bagi petani yang berlahan sempit dan juga buruh tani ternyata masih menemui banyak hambatan. Sebab kemampuan mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja juga terbatas. Satu-satunya cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, mereka melakukan aktivitas dengan usaha perambahan sumberdaya yang mereka anggap sebagai milik bersama (common property) seperti pengambilan batu, batu kapur di daerah lahan kering, bukit, atau penebangan kayu di hutan sekitarnya.⁵⁸

Bagi petani miskin di daerah lahan kering, hal semacam ini adalah upaya adaptasi yang mereka lakukan karena pola ekologi lahan kering (baca = ladang) yang tidak memungkinkan untuk diusahakan lebih intensip. Sebab keseimbangan regim ladang itu sangat rawan sehingga apabila penanaman terlalu cepat (intensip), maka akan terjadi kemerosotan yang mengakibatkan terjadinya proses sabanah dan keadaan ladang itu sukar dipertahankan. Berbeda dengan sistem sawah yang dapat diintensipkan pengusahaannya sehingga mampu menyerap penggarap yang bertambah tanpa menimbulkan penurunan produktifitas.⁵⁹

Kemudian dari hasil studinya Siahaan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara semakin miskinnya petani dengan semakin besarnya sumbangan

⁵⁸ Lihat Suryana dan Pasandaran, "Pembangunan...",

⁵⁹ Lihat Geertz, Involusi...

sektor nonpertanian bagi penghasilan keluarga. Siahaan juga menjelaskan semakin miskin petani dalam luas pemilikan lahan, semakin banyak keterlibatan mereka di luar sektor pertanian. Namun masalahnya tingkat penghasilan rata-rata dari sektor nonpertanian bukan merupakan penghasilan yang memadai atau "cukup." ⁶⁰

Menurut Scott, suatu konsekuensi yang terjadi dari kenyataan ini adalah munculnya suatu pola migrasi jangka pendek yang semi permanen, atau yang dapat disebut "menyerbu ekonomi uang".

Ciri khas dari pola ini adalah semakin tergantungnya penduduk desa kepada kemungkinan-kemungkinan marginal dalam perekonomian di luar desa. Yang terjadi bukanlah migrasi yang sesungguhnya dimana orang yang bersangkutan lantas diserap oleh sektor modern, melainkan merupakan suatu upaya untuk menutupi kekurangan sumber subsistensi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. ⁶¹

Pola migrasi ini dapat dilakukan dalam bentuk nglaju dan merantau. Menurut Mantra nglaju merupakan bentuk perpindahan penduduk yang melintasi suatu batas wilayah dalam jangka waktu minimal enam jam dan kembali pada hari yang sama. Sedangkan merantau membutuhkan jangka waktu lebih dari satu hari dan kurang dari satu tahun. ⁶²

Selanjutnya Todaro dan Lee menjelaskan bahwa motivasi utama seseorang untuk bermigrasi adalah motif ekonomi. Motif ini oleh Todaro disebut sebagai

⁶⁰ Lihat Siahaan, "Tekanan...", h. 57-58.

⁶¹ Scott, *Moral...*, h. 326-327.

⁶² I.D. Mantra, *Mobilitas Sirkuler di Indonesia*, (Yogyakarta, PPSK UGM, 1979).

pertimbangan ekonomi yang rasional, di mana mobilitas ke luar wilayah mempunyai dua harapan yaitu harapan untuk memperoleh pekerjaan dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di daerah asal.⁶³

Hasil penelitian Adam pada masyarakat Madura dan Bawean menyebutkan bahwa tujuan migrasi bagi masyarakat Madura dan merantau bagi masyarakat Bawean adalah untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Faktor utama yang mendorong mereka bermigrasi dan merantau adalah karena desakan ekonomi sebagai akibat keadaan tanah di daerah asal yang kurang subur.⁶⁴

Tanah yang kurang subur bagi petani di lahan kering adalah hal yang biasa dan merupakan pekerjaan rutin bagi mereka. Akan tetapi apabila tanah yang kurang subur itu disertai kekeringan yang berkepanjangan dan mereka harus menunggu musim hujan yang tidak pasti maka situasi sulitlah yang mereka hadapi. Dalam situasi yang sulit ini prinsip "dahulukan selamat" itu terputus. Oleh karena itu wajar bagi mereka untuk mengambil resiko dengan upaya-upaya nekad demi subsistensi. Sebagaimana Scott mengatakan:⁶⁵

"Petani-petani yang rumus-rumus subsistensinya sedang mengalami desintegrasi akibat iklim, kekurangan tanah, atau sewa-sewa yang meningkat, akan berbuat apa saja untuk mempertahankan kehidupan mereka-mereka mungkin akan beralih ke tanaman komersil, membuat hutang baru dan menanam padi ajaib yang banyak resikonya, atau juga mungkin mereka jadi perampok."

⁶³ Ristini dan Wasis Budiarto, "Migrasi dan Urbanisasi : Masalah, Hubungan dan Kebijakan Pengendalian Perpindahan Penduduk," *Majalah Demografi Indonesia*, No. 32, Desember 1989, h. 3.

⁶⁴ Subagyo Adam, *Pola Migrasi Masyarakat Madura dan Masyarakat Bawean*. (Surabaya : Lemabaga Penelitian UNAIR, 1991).

⁶⁵ Scott, *Moral...*, h. 39.

Upaya-upaya nekad seperti itu kata Scott, banyak melahirkan inovasi bagi petani. Keputusan petani untuk membuka usaha baru meskipun belum pasti hasilnya dilihat dari segi ekonomi adalah sesuatu yang masuk akal dan implikasinya sama seperti sikap mereka yang biasa yakni hati-hati dan skeptis.

Untuk memahami dan menganalisis strategi survival petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) secara sosiologis dapat dipergunakan uraian dari Talcott Parsons dalam analisisnya tentang prasyarat fungsional (functional imperative) sistem sosial.

Dalam analisisnya Parsons,⁶⁶ menjelaskan bahwa ciri-ciri umum yang ada dalam seluruh sistem yang hidup—termasuk petani miskin —ialah prasyarat atau functional imperative. Dalam sistem sosial terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dan ditanggulangi secara memadai supaya keseimbangan atau keberadaan sistem itu terjamin yaitu empat kebutuhan fungsional yang kemudian disingkat menjadi AGIL meliputi Adaption (A), Goal Attainment (G), Integration (I) dan Latent Pattern – maintenance (L).

Lebih jauh Parsons menjelaskan bahwa Adaptation menunjuk pada keharusan dan kemampuan sistem sosial menghadapi lingkungannya dengan menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber tersebut

⁶⁶ Lihat Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) h. 181 – 183; Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, (Jakarta, PT. Gramedia, 1986) h. 130 – 136; K.J. Veeger, Realitas Sosial, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 206 209; Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern : Dari Parsons sampai Habermas. (Jakarta : Rajawali Press, 1992). H. 63- 66.

kedalam seluruh sistem. Untuk maksud tersebut sistem sosial (petani miskin) harus menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan supaya mereka dapat tetap hidup. Hanya dengan adanya sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas suatu sistem (petani miskin) dapat menguasai lingkungannya. Goal Attainment, menunjuk pada pemenuhan tujuan sistem dan setiap sistem sosial harus memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dalam sistem sosial (petani miskin) harus senantiasa mampu mengerahkan anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan itu dan setiap anggota lebih mengutamakan tujuan atau kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri. Integration menunjuk pada interelasi antara para anggota dalam sistem sosial. Supaya sistem sosial berfungsi secara efektif solidaritas di antara anggota/individu yang ada didalamnya harus ada. Kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup yang menghasilkan solidaritas untuk kerjasama dikembangkan dan dipertahankan. Sedangkan Latent Pattern maintenance menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan dalam sistem sesuai dengan aturan dan norma-norma .

Empat prasyarat fungsional itu tertanam kuat di dalam setiap sistem yang hidup – sistem sosial. Dengan demikian rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) – sebagai sistem sosial – harus mampu memenuhi prasyarat fungsional tersebut supaya mereka tetap survive/bertahan hidup. Kalau tidak, keluarga petani miskin mesti berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini akan diuraikan mengenai sifat penelitian, definisi operasional, lokasi penelitian, penentuan responden, pengumpulan data, dan analisis data .

Penelitian ini dilakukan dalam sifatnya yang deskriptif dalam field research. Dengan sifatnya yang demikian, penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan secara detail dan mendalam berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang menyangkut realitas sosial tentang kondisi sosial ekonomi petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) dan strategi yang dilakukan petani tersebut dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari serta peran negara/pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin.

Definisi Operasional

Penelitian ini mengkaji karakteristik sosial ekonomi dan strategi mempertahankan kelangsungan hidup petani miskin serta peran negara/pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering). Oleh karena itu bagian-bagian yang berkaitan dengan asumsi maupun konsep dalam penelitian ini didefinisikan terlebih dahulu, dengan maksud agar ada persamaan pemahaman dalam menginterpretasikan data dan informasi yang dikaji.

Petani miskin adalah rumah tangga petani yang menggarap lahan tadah hujan (lahan kering) dengan luas kurang dari satu hektar, sehingga dikategorikan miskin menurut klasifikasi Sayogyo,⁶⁷ yaitu paling miskin apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 180 kilogram beras; miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 240 kilogram beras, dan miskin apabila pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kilogram beras.

Petani miskin lahan kering adalah rumah tangga petani miskin dengan pekerjaan pokok sebagai petani lahan kering yang mengusahakan tanaman pangan seperti padi, palawija, dan hortikultura..

Strategi mempertahankan kelangsungan hidup adalah upaya yang dilakukan oleh rumah tangga petani miskin di daerah lahan kering untuk menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari, termasuk mengatasi masa-masa krisis.

Diversifikasi usaha adalah jenis atau ragam pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh rumah tangga petani miskin lahan kering untuk menambah penghasilan dalam upaya menyiasati tekanan-tekanan ekonomi baik yang dilakukan di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian.

Karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, bentuk keluarga, kekayaan, dan pendapatan.

Program bantuan peningkatan pendapatan adalah program terpadu subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan yang dilakukan di daerah tadah hujan

⁶⁷ Lihat Sayogyo, "Garis..."

(lahan kering)) berupa pemberian bantuan modal ternak sapi dan sarana produksi tanaman pangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Pemongkong Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan terhadap desa penelitian dilakukan secara purposive. Dalam hal ini pemilihan terhadap desa Pemongkong didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Sebagian besar tanah pertanian di desa tersebut merupakan tanah kering berupa tegalan dan tanah persawahan nonteknis yang mencerminkan pola pertanian dengan sistem tadah hujan.
2. Mata pencaharian utama penduduk desa tersebut sebagian besar bertani, dan dilihat dari distribusi pemilikan tanah pertanian sebagian besar petani memiliki/menguasai tanah di bawah satu hektar yaitu sebanyak 2850 petani atau 74 persen dari seluruh petani yang ada sebanyak 3850 orang.
3. Desa tersebut diklasifikasikan sebagai desa tertinggal (IDT). Hal ini memberi kesan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakatnya secara keseluruhan masih rendah. Salah satu gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial ekonomi yang masih rendah di desa tersebut dapat dilihat dari kondisi lingkungan fisik perumahan yang kurang memadai. Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah kondisi lantai rumah penduduk. Pada tahun 1999 dilaporkan bahwa sebanyak 1949 keluarga menempati rumah

yang lantainya terbuat dari tanah, atau 69 persen dari jumlah keluarga keseluruhan sebanyak 2950 keluarga.

4. Sebagian wilayah desa tersebut berupa hutan dan daerah pantai sehingga kemungkinan ditemukan adanya petani selain berpenghasilan dari usaha tani mereka juga memanfaatkan potensi tersebut untuk menambah penghasilan.
5. Di desa tersebut program pembangunan telah relatif banyak dilakukan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Penentuan Responden

Subyek dalam penelitian ini mencakup masyarakat petani yang berdomisili di desa penelitian. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya petani yang menguasai atau mengusahakan tanah pertanian di desa tersebut tetapi tidak berdomisili di situ.

Subyek dalam penelitian ini adalah petani bukan pengusaha pertanian (farmer) yang mengelola usaha tani sebagai sebuah perusahaan bisnis, melainkan petani yang melakukan usaha tani dalam konteks pengelolaan rumahtangga. Petani yang dimaksud adalah petani miskin dengan sumber penghasilan utama dari hasil bercocok tanam di lahan kering, yang menguasai atau mengusahakan lahan kering kurang dari satu hektar.

Unit analisis dalam penelitian ini rumah tangga. Demikian pula unit pengamatannya adalah rumah tangga petani yang dicerminkan oleh kepala keluarga.

Sementara itu responden yang dijadikan sampel penelitian semula akan dipilih dengan menggunakan teknik random, tetapi data mengenai pemilikan tanah di lokasi penelitian tidak diperoleh karena terbentur birokrasi, maka peneliti memutuskan dalam pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh responden yang relevan dengan tema penelitian. Informasi awal tentang petani tersebut diperoleh dari kepala dusun atau ketua RT setempat. Pemilihan responden yang diwawancarai didasarkan atas kriteria (a)memilki/menguasai lahan kering kurang dari satu hektar, (b) sudah berkeluarga dan (c) pernah menerima bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sebanyak 60 responden untuk dijadikan sampel dan diwawancarai selama penelitian.

Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dilakukan beberapa teknik pengumpulan data sesuai jenis data yang dikumpulkan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan memakai perangkat kuesioner yang disiapkan untuk itu. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner diperoleh dari rumah tangga petani miskin yang dipilih sebagai responden. Data yang diperoleh dari responden berupa karakteristik sosial ekonomi petani miskin lahan kering meliputi: umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, bentuk keluarga, pendapatan dan kekayaan, serta strategi yang dilakukan untuk menyiasati tekanan-

tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain itu data primer yang diperoleh dari responden, juga menyangkut sikap mereka terhadap program bantuan peningkatan pendapatan. Data ini perlu diketahui untuk melihat bagaimana peran negara/pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering).

Selain wawancara dengan responden, data primer juga diperoleh dari informan yang terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah responden yang terpilih. Data yang diperoleh dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview). Untuk tahap pertama pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini, peneliti mengikuti fokus masalah melalui pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya. Namun dalam kegiatan wawancara, peneliti cenderung terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dikembangkan di lapangan sesuai dengan informasi yang diperoleh selama kegiatan wawancara.

Pengumpulan data primer melalui in depth interview ini menggunakan tape recorder. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti mengkaji ulang pembicaraan pada tahap analisis data dan menampilkan hasil wawancara sesuai dengan yang diberikan informan. Sebelum perekaman data melalui tape recorder, peneliti meminta persetujuan informan terlebih dahulu. Di samping itu selama wawancara peneliti juga membuat catatan untuk membantu peneliti mengajukan pertanyaan baru yang penting selain dari pedoman yang telah disiapkan. Selain interview, data primer juga dikumpulkan dengan melakukan observasi yang sifatnya

partisipasi pasif guna melengkapi data dan informasi yang kurang lengkap yang dituangkan dalam catatan lapangan (field notes). Observasi ini dilakukan untuk melihat realitas yang ada termasuk kondisi sosial ekonomi dan aktivitas sehari-hari masyarakat (petani) di lokasi penelitian.

Data sekunder dikumpulkan melalui koleksi dokumen-dokumen resmi baik melalui data sekunder dari lapangan (catatan, monografi desa /kecamatan ,dan instansi terkait) maupun bersumber dari data kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan ini berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu berupa data statistik tentang demografis dan geografis daerah penelitian dan data dan informasi yang sesuai dengan aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Meskipun peneliti seringkali menggunakan pendamping selama pengumpulan data, namun perannya tidak lebih sebagai penunjuk jalan, bukan pengumpul data. Pendamping tersebut biasanya menunjukkan atau menginformasikan lokasi rumah responden. Setelah peneliti mengetahui lokasi rumah responden, kegiatan pengumpulan data dilakukan sendiri pada hari-hari berikutnya. Kegiatan wawancara dilakukan dari pagi sampai sore hari, bahkan wawancara dengan informan lainnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dilakukan pada malam hari. Wawancara dengan responden dilakukan di rumah atau di tempat lain setelah ada perjanjian sebelumnya. Apabila pada hari itu peneliti tidak bertemu dengan responden atau wawancara belum selesai atau ditemukan kekurangan data dan informasi yang diberikan maka, kegiatan wawancara dilakukan pada hari berikutnya atau pada kesempatan lain.

Selama proses pengumpulan data ada beberapa kesulitan yang muncul, karena masih ada responden yang tidak atau enggan memberikan jawaban secara terbuka, terutama beberapa pertanyaan yang dianggapnya “kurang aman”. Data tersebut menyangkut luas tanah/lahan dan kekayaan lainnya karena, responden agak curiga sehingga sulit diajak kerjasama. Kesulitan ini diatasi dengan berbagai pendekatan dan mencari informasi melalui informan lainnya, baik melalui pamong desa maupun para tetangganya.

Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, setelah diedit diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang mana bentuk kategori-kategori tersebut berdasar dan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan strategi mempertahankan kelangsungan hidup petani miskin serta peran negara/pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin, maka data tersebut dikategorikan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan fenomena kehidupan petani miskin sebagaimana tujuan penelitian tersebut. Interpretasi terhadap data yang ada dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan analisis kuantitatif yang dimaksud meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan data kuantitatif yang disajikan berupa tabel frekuensi.

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan bentuk analisis dengan bantuan tabulasi silang karena peneliti memang tidak bermaksud mencari hubungan antar variabel guna menguji kebenaran hipotesis tertentu. Yang lebih banyak dikerjakan adalah upaya untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi, strategi mempertahankan kelangsungan hidup serta peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani miskin di daerah tadah hujan(lahan kering)

Dalam analisis data dipertajam dengan mengacu kepada teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Dengan cara tersebut diharapkan dapat memberikan deskripsi menyeluruh terhadap hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab gambaran umum ini diuraikan tentang kondisi geografis desa Pemongkong, kondisi demografis, pendidikan, mata pencaharian, kondisi perumahan dan bagaimana akses terhadap fasilitas publik serta kondisi sekitar pertanian dan masalah kemiskinan.

Kondisi Geografis

Pemongkong adalah nama sebuah desa di Kecamatan Keruak, sekaligus merupakan desa yang terletak paling selatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pada mulanya Pemongkong adalah bagian dari desa tetangganya—desa Jerowaru—dan pada tahun 1991 secara resmi terpisah menjadi desa persiapan. Setelah tiga tahun menjadi desa persiapan, barulah pada tanggal 16 Februari 1994 diresmikan menjadi desa definitif. Tidak ada bumi Sasak⁶⁸ lagi di sebelah selatan desa Pemongkong. Di sebelah barat dan timur desa tersebut hanya dikelilingi oleh laut. Di bagian utara terdapat tanah persawahan tadah hujan (nonteknis) yang berbatasan dengan desa Jerowaru.

Secara geografis, desa Pemongkong tidak termasuk daerah terpencil – letaknya sekitar 7 kilometer dari ibukota kecamatan dan bisa ditempuh dalam waktu

⁶⁸ Sasak adalah nama suku bangsa asli yang mendiami sebagian besar pulau Lombok

25 menit. Untuk memasuki desa Pemongkong, mula-mula melewati jalan beraspal yang cukup baik. Beberapa kilometer sebelum memasuki desa tersebut kondisi jalan mulai berubah. Meskipun sudah diaspal, namun di banyak tempat mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada musim kemarau kondisi jalan berdebu, tetapi ketika musim hujan, di tempat-tempat yang rusak berlumpur dan sangat licin. Kendaraan -- baik roda empat maupun roda dua -- bila tidak hati-hati bukan tidak mungkin akan terperosok. Musim kemarau adalah masa kehancuran jalan desa. Truk atau kendaraan roda empat yang keluar masuk mengangkut hasil alam desa, seperti alang-alang, batu kapur, batu, garam, kayu bakar, dan lain sebagainya membuat jalan-jalan desa semakin rusak. Tak jarang terlihat anak-anak kecil-- laki atau perempuan-- menimbuni jalan-jalan yang rusak dengan tanah, sekaligus minta imbalan jasa dari pemakai jalan.

Luas desa Pemongkong secara keseluruhan 8397 hektar. Kondisi topografis desa adalah bergelombang/ berbukit, sebagian lagi datar terutama di wilayah utara pusat desa dan bagian selatan yang berbatasan dengan pantai. Sebagian besar lahan/tanah berupa hutan terutama di wilayah bagian timur, dan tegalan yang merata di semua wilayah. Sedangkan sisanya berupa tanah persawahan (nonteknis), untuk permukiman dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Tabel 1
Luas wilayah Desa Pemongkong menurut
Jenis Pemanfaatan Tanah

No.	Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
1.	Sawah non teknis	210
2.	Tegalan / ladang	3,941,80
3.	Hutan	2.834
4.	Perikanan darat / air tawar	60
5.	Permukiman	70,55
6.	Fasilitas umum	17,16
7.	Lain – lain	1.263,49
Jumlah		8.397

Sumber : Profil Desa 1999

Kondisi tanahnya yang berbukit dengan ketinggian sampai 150 meter dari permukaan laut, ditambah lagi curah hujan yang relatif sedikit (1.041 mm / tahun) menyebabkan daerah ini, diklasifikasikan daerah kritis. Lahan hutan yang ada merupakan hutan semak belukar , bukan hutan belantara. Di tegalan tumbuh alang-alang dan rumput dengan sendirinya. Sebagian lagi dimanfaatkan untuk padi, palawija, hortikultura, dan tanaman tahunan (tanaman keras). Untuk persawahan hampir seluruhnya merupakan sawah nonteknis berupa tanah liat. Musim kemarau tanahnya pecah-pecah dan keras sehingga sulit untuk ditanami.

Kondisi Demografis

Menurut data terakhir, jumlah penduduk desa Pemongkong sebanyak 11.377 jiwa yang terdiri dari 3250 kepala keluarga dan mendiami 2950 rumah tangga. Dilihat dari jenis kelamin, komposisi penduduk relatif seimbang antara jumlah penduduk

laki-laki (49%) dan perempuan (51%). Untuk lebih jelas kondisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Pemongkong
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	311	314	625
2	13 bulan – 4 tahun	435	450	885
3	5 – 6 tahun	510	514	1.024
4	7 – 15 tahun	1.232	1.243	2.475
5	16 – 18 tahun	1.120	1.135	2.260
6	19 – 25 tahun	275	300	575
7	26 – 35 tahun	223	227	450
8	36 – 45 tahun	325	400	725
9	46 – 50 tahun	624	626	1.250
10	51 – 60 tahun	403	410	813
11	61 – 75 tahun	145	155	300
12	diatas 75 tahun	–	–	–
Jumlah		5.603 (49 %)	5.774 (51 %)	11.377

Sumber: Profil Desa 1999

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, dari tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar penduduk desa Pemongkong termasuk usia produktif yaitu sebanyak 6.068 jiwa atau 53 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, sedangkan anak-anak (usia wajib sekolah dan balita) sebanyak 5.009 jiwa (44 persen), dan berusia lanjut hanya 300 jiwa atau 3 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Melihat jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke bawah, itu bisa diduga adanya indikasi untuk mempercepat laju pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

Berdasarkan luas wilayah, maka kepadatan penduduk desa Pemongkong sebesar 135 jiwa perkilometer persegi. Dibanding dengan desa-desa lain di Kecamatan Keruak, desa Pemongkong memiliki kepadatan penduduk paling kecil, sedangkan desa lain di wilayah Kecamatan Keruak ada yang mencapai kepadatan sampai 3.832 jiwa per kilometer persegi.

Pendidikan

Agak sulit untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat desa Pemongkong karena tidak adanya data-- baik di kantor desa maupun di kecamatan-- yang pasti tentang jumlah orang yang sekolah maupun tidak sekolah dari jenjang pendidikan secara umum.

Meskipun tidak ada catatan resmi yang pasti mengenai gambaran tingkat pendidikan penduduk, akan tetapi dapat dipastikan tingkat pendidikan penduduk desa Pemongkong relatif rendah. Menurut keterangan seorang tokoh masyarakat ,pada umumnya masalah pendidikan di Pemongkong masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan di desa Pemongkong dilakukan melalui pembangunan sarana pendidikan. Jumlah Sekolah Dasar sebanyak 14 buah, rata-rata satu buah untuk setiap dusun. Bahkan beberapa tahun lalu telah dibangun SMTP Umum untuk menampung tamtan SD dari sekitar wilayah desa.

Selain mengikuti pendidikan umum, sebagian penduduk juga mengikuti pendidikan khusus, terutama yang terkait dengan keagamaan, yaitu sekolah di Madrasah dan pendidikan agama lainnya. Seorang tokoh agama dari desa tetangga – desa Jerowaru– beberapa tahun lalu membuka pendidikan sekolah Madrasah di lokasi yang agak jauh dari jangkauan sarana pendidikan umum.

Meskipun upaya – baik dari pemerintah maupun pihak swasta– untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Pemongkong begitu antusias, namun besarnya biaya pendidikan dan masih berfungsinya anak sebagai tenaga kerja produktif bagi keluarga adalah beberapa faktor yang menjadi kendala bagi penduduk desa untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Mata Pencaharian

Secara umum desa Pemongkong menunjukkan ciri-ciri desa agraris. Sesuai dengan kondisi desa yang agraris sudah dapat dipahami bahwa mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Menurut angka statistik yang ada di kantor desa, sebanyak 3850 orang mengaku bermata pencaharian sebagai petani. Selebihnya 2700 peternak, 1800 nelayan, 160 tukang, 135 pegawai negeri/swasta/ABRI, 4 jasa transportasi, 20 pedagang dan 561 pengrajin. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa angka-angka ini masih belum memberikan gambaran tentang spesialisasi pekerjaan karena penduduk yang bekerja sebagai petani, juga melakukan pekerjaan lain– buruh tani, peternak, petani penggarap atau penyakap, tukang, pengrajin, jasa bahkan sebagai pegawai negeri. Pekerjaan pokok sebagai nelayan biasanya bermukim di

wilayah pantai. Petani penggarap biasanya menggarap lahan penduduk yang menguasai tanah cukup luas-- banyak dari luar desa. Kadang-kadang penggarap hanya disuruh menggarap lahan, tanpa ada kewajiban menyerahkan hasil produksi-- meskipun hanya sebagian-- kepada pemiliknya. Yang terpenting bagi pemilik lahan adalah terpeliharanya lahan yang ada di desa itu. Sebab, kalau tidak demikian, lahannya kembali menjadi hutan semak yang sulit ditanami.

Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor pemerintah/nonpemerintah adalah sebagai guru, perangkat desa, swasta, dan ABRI. Sedangkan sektor jasa transportasi biasanya sebagai sopir dan ojek. Untuk pengrajin, penduduk membuat anyam-anyaman dari rotan dan ketak yang menurut penduduk setempat disebut kecupu, yang bekerja sebagai tukang umumnya tukang batu, tukang kayu, dan tukang jahit. Untuk sektor perdagangan berupa dagang kecil-kecilan atau warung.

Petani yang jumlahnya 3850 orang, apabila ditelusuri, sesungguhnya tidak seluruhnya memiliki tanah "cukupan." Menurut data statistik desa, distribusi pemilikan tanah di Pemongkong adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Distribusi Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Pemongkong

Luas Pemilikan (Hektar)	Jenis Tanah			%
	Sawah non Teknis	Tegalan/ladang	Jumlah	
0,1 – 0,5	350	500	850	22
0,6 – 1,0	-	2000	2000	52
> 1,0	-	1000	1000	26
Jumlah	350	3500	3850	100
%	9	91	100	

Sumber : Profil Desa 1999

Meskipun data di atas masih kasar, namun cukup memberikan gambaran bahwa distribusi pemilikan tanah di desa Pemongkong ternyata tidak merata. Bila dilihat dari karakteristik pemilikan tanah pertanian secara keseluruhan, rata-rata petani memiliki/menguasai lahan di atas satu hektar (rata-rata 1,08 hektar). Akan tetapi dilihat dari distribusi pemilikan, sebagian besar petani menguasai tanah dari satu hektar ke bawah yaitu sebanyak 2.850 orang atau 74 % dari seluruh pemilik yang ada. Sedangkan tanah yang luasnya di atas satu hektar dikuasai sejumlah kecil petani, termasuk para elit desa dan elit dari luar desa. Elit luar desa tidak menggarap lahannya dan mereka inilah yang biasa menyerahkan lahannya kepada orang lain (petani) untuk dikerjakan baik petani dari dalam desa maupun luar desa.

Kondisi Rumah dan Akses Terhadap Fasilitas Publik

Untuk melihat stratifikasi ekonomi (kesejahteraan/kemiskinan) sebuah rumah tangga, selain mata pencaharian, pendidikan maupun pemilikan tanah, sebenarnya bisa pula dilihat dari indikator fisik bangunan rumah dan akses mereka terhadap fasilitas publik. Secara umum kondisi perumahan masyarakat desa Pemongkong relatif homogen dan jarang ditemui ada keluarga yang menonjol dilihat dari kondisi bangunan rumah.

Tabel 4
Jumlah Bangunan Tempat Tinggal
Di desa Pemongkong Menurut Jenisnya

No	Jenis Rumah	Jumlah	%
1	Permanen	65	2
2	Semi Permanen	1.750	58
3	Sederhana	1.200	40
	Jumlah	3.015	100

Sumber : Statistik Kecamatan 1997

Dari 3.015 bangunan rumah yang ada, hanya 65 buah atau 2% merupakan rumah permanen. Sebagian besar perumahan masih semi permanen yaitu sebanyak 1.750 buah atau 58 persen. Banyak pula ditemukan rumah sederhana atau sangat sederhana dindingnya terbuat dari gedek, lantainya tanah dan beratap alang-alang atau daun kelapa. Tidak kurang dari 1200 rumah atau 40 % rumah seperti ini ditempati oleh masyarakat Pemongkong.

Mengenai kondisi bangunan rumah penduduk yang perlu mendapat perhatian di sini adalah kondisi lantai rumah. Menurut standar yang dipergunakan BKKBN sebuah keluarga dikatakan sejahtera—selain kondisi pangan, sandang, kesehatan, dan agama—adalah bila lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Dari segi kesehatan jelas kondisi rumah seperti ini kurang memadai dan tak mustahil menjadi faktor bagi berkembangnya anggota rumah tangga yang tidak sehat.

Di Pemongkong menurut data terakhir (BKKBN 1999) dilaporkan bahwa jumlah keluarga yang menempati rumah yang lantainya terbuat dari tanah sebanyak 1949 atau 65,86 persen dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 2959 keluarga. Angka ini artinya bahwa sebagian besar keluarga di Pemongkong termasuk keluarga

pra sejahtera karena alasan ekonomi. Keluarga-keluarga seperti ini dikatakan sebagai keluarga miskin.

Mengingat kondisi perumahan masyarakat Pemongkong relatif memperhatikan, maka pemerintah berupaya meningkatkan kualitas perumahan penduduk melalui program pemukiman. Pada tahun 1994 pemerintah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat Pemongkong sebanyak 850 unit rumah dalam program pemukiman di lima lokasi. Sebelum program pemukiman ini dilaksanakan, sebagian besar perumahan penduduk terpencah pada kantong-kantong pemukiman secara tidak terencana pada seluruh kawasan desa yang dikelilingi oleh lahan pertanian. Kantong-kantong pemukiman tersebut dihuni oleh sejumlah penduduk dengan ciri-ciri tingkat pendidikan relatif rendah, memegang prinsip adat-istiadat yang kuat, keterampilan tidak bervariasi dan sebagian besar bekerja sebagai petani dan perikanan laut.

Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan pemukiman yang diharapkan dapat menstimulus bagi peningkatan kualitas perumahan penduduk di masa yang akan datang, namun kondisinya belakangan banyak yang semakin buruk dan mengawatirkan. Masalah ini disebabkan oleh keadaan ekonomi penduduk yang relatif rendah, sehingga jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk kebutuhan hidup sehari-haripun mengalami banyak kendala. Bahkan ditemukan ada warga tidak lagi menempati rumah bantuan tersebut karena khawatir roboh.

Selain bantuan stimulan, perumahan penduduk telah mendapat penerangan listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara melalui program listrik masuk

desa. Tetapi belum semua rumah tangga mendapatkan fasilitas listrik, karena biaya pemasangan listrik yang ditetapkan oleh pihak PLN tidak mampu dijangkau oleh sebagian besar penduduk. Menurut data statistik di kantor desa Pemongkong tercatat hanya 600 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai penerangan atau 20 % dari 2950 rumah tangga yang ada. Itupun tidak seluruhnya memasang sambungan langsung (memakai kilometer) tapi sebagian hanya mengalir dari tetangga, sedangkan selebihnya masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan rumah tangga. Itupun masih banyak warga yang memakai lampu hanya terbuat dari sisa-sisa kaleng yang dibuat sendiri sekedar penerangan beberapa saat di malam hari.

Di samping itu, desa Pemongkong juga telah memperoleh fasilitas air bersih dari bantuan lembaga swasta kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekarang ini pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Namun belum seluruh rumah tangga dapat memanfaatkan fasilitas air bersih tersebut karena di samping belum menjangkau ke seluruh pemukiman penduduk, airnya juga seringkali mengalami kemacetan. Dari 2 950 rumah tangga, baru 899 (30%) rumah tangga yang terjangkau oleh air bersih. Selama ini atau masyarakat yang belum memakai fasilitas air bersih tersebut harus mengambil air ke sumber-sumber mata air di daerah sekitarnya dengan menggunakan angkutan umum atau memakai sampan/jukung kalau melalui laut. Sebelum sarana transportasi lancar penduduk harus jalan kaki sampai sejauh 7 kilometer berangkat sehabis sholat subuh dan baru kembali sampai di rumah siang hari, bahkan sore hari karena harus antri menunggu giliran. Pada musim kemarau air pipa (air bersih) seringkali macet cukup lama (lebih dari satu bulan)

terutama wilayah-wilayah yang jauh dari pusat desa. Pada saat ini penduduk harus membeli air pada pengusaha-pengusaha swasta dari luar desa dengan memakai truk tangki air seharga Rp 500 per ember sekedar untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk mandi/wudhu terpaksa menggunakan air dari kantong-kantong air yang masih tersisa yang seharusnya tidak digunakan untuk kebutuhan manusia.

Seringnya air bersih macet dan sedikitnya volume air yang bisa sampai ke Pemongkong, menyebabkan pemanfaatan fasilitas—yang telah menghabiskan biaya relatif besar untuk pembangunannya—tidak optimal, bahkan di sana-sini banyak bak penampungan air tidak dimanfaatkan lagi. Ditemukan warga mengambil air untuk keuntungan sendiri. Kenyataan ini tampak dari banyaknya pipa-pipa yang bocor karena dibobol warga baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya (misalnya mengairi/menyiram tanaman, untuk minum ternak, membuat bata, dan bangunan). Keadaan ini mengakibatkan kekurangan air bagi warga yang lain, bahkan tidak memperoleh sama sekali.

Kondisi Sektor Pertanian dan Masalah Kemiskinan

Sesuai kondisi alamnya yang bergelombang, kering dan tandus, ditambah tidak adanya sistem irigasi maka tak mengherankan bila desa Pemongkong memiliki tanah yang kurang subur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagian besar tanah di desa ini berupa tegalan dan hutan, meskipun ada tanah sawah akan tetapi luasnya relatif sedikit dan itupun hanya berupa sawah tadah hujan. Kondisi yang

demikian menyebabkan petani yang memiliki sawah menggarap sawahnya dengan sistem sawah tadah hujan.

Petani di Pemongkong umumnya menggarap lahannya rata-rata satu kali dalam setahun akibat curah hujan yang relatif sedikit, waktu hujan pendek dan sifatnya tidak menentu. Pada musim kemarau lahan-lahan banyak yang kosong tidak ditanami karena persediaan air untuk pertanian tidak ada. Meskipun ada embung, baik embung rakyat maupun embung umum, pada musim kemarau sering kali airnya kering karena jenis tanahnya tidak bisa lama menampung air. Kalaupun ada airnya hanya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar lokasi embung untuk kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus).

Jenis tanaman yang banyak ditanam di tegalan adalah padi (gogo), palawija (jagung, kedelai, ketela, kacang panjang, kacang hijau) dan tanaman hortikultura (cabe merah dan bawang merah). Sedangkan untuk sawah biasanya hanya menanam padi (gogo). Sistem pertanian di tegalan umumnya dilakukan sebagaimana sistem pertanian lahan kering yaitu sistem tanaman tumpang sari, dimana ketiga jenis tanaman pangan tersebut—padi, palawija dan hortikultura—di tanam bersamaan pada awal musim hujan. Secara teknis dari petunjuk yang ada, penanaman dilakukan setelah curah hujan mencapai 60 mm. Namun kebiasaan petani di daerah ini begitu hujan pertama atau paling tidak dua kali hujan penanaman langsung dilakukan. Alasannya cukup rasional, apabila menunggu curah hujan sampai 60 mm agak lama, rumput sudah tumbuh lebih besar sehingga penanaman tidak bisa dilakukan dan ini membutuhkan biaya untuk penyiangan kembali. Sementara itu apabila menanam

lebih awal sebelum rumput mendahului, setelah tumbuh beberapa hari pada saat tanaman membutuhkan banyak air seringkali hujan tidak ada, akibatnya tanaman kekeringan.

Dalam kondisi pertanahan dan pengairan seperti diuraikan di atas, maka hasil produksi pertanianpun menjadi terbatas untuk mencukupi kebutuhan pangan di desa ini. Umumnya hasil pertanian berupa padi oleh petani hanya dapat dipergunakan untuk konsumsi sehari-hari tanpa mampu menjualnya oleh karena sedikitnya hasil yang diperoleh dari tanahnya yang gersang. Hal itu terlebih terjadi pada petani yang berlahan sempit dan juga petani penggarap yang tidak memiliki tanah pertanian. Demikian pula halnya dengan hasil produksi tanaman palawija, misalnya jagung, kacang tanah, ubi, dan sebagainya biasanya juga hanya untuk konsumsi sehari-hari atau dibagikan kepada kerabat atau tetangga. Petani akan menjual hasil produksi apabila memerlukan uang tunai. Kenyataan yang dialami adalah harga per satuan hasil produksi dianggap relatif rendah dan tidak sebanding dengan jerih payahnya selama mengolah dan menanam tanaman tersebut.

Petani di desa Pemongkong memang tidak seberuntung seperti rekan-rekannya di desa lain di wilayah sekitarnya. Walaupun telah menganekaragamkan tanaman pertanian, akan tetapi hasilnya masih belum dapat dikatakan baik. Untuk tanaman padi misalnya, hasil produksinya sekitar 1.73 ton per hektar per tahun, jauh dari hasil produksi padi rata-rata per hektar di desa lain di Kecamatan Keruak yaitu sebesar 4,99 ton per hektar per tahun. Demikian pula untuk tanaman pertanian yang lain masih jauh dari rata-rata kecamatan. Hal tersebut terjadi karena tanaman tidak

tumbuh dengan baik. Di samping masalah pupuk dan obat-obatan, rendahnya produktivitas lahan di desa ini juga diakibatkan oleh terbatasnya air bagi pertumbuhan tanaman dan sifatnya tidak menentu.

Tabel 5
Produktivitas Lahan Per Jenis Tanaman
Di desa Pemongkong dan Kecamatan Keruak
(ton / ha)

Jenis tanaman	Desa Pemongkong *	Kecamatan Keruak **
Padi	1,73	4,99
Jagung	0,01	2,29
Kedelai	0,06	0,86
Kacang tanah	0,06	1,02
Kacang hijau	0,15	0,77
Ubi kayu	-	11,83
Bawang merah	-	13,5
Cabe	-	42,95
Kacang panjang	-	12,65

Keterangan : * Data tahun 1999

** Data tahun 1997

- Tidak ada data

Sumber : Data Sekunder diolah

Kondisi seperti di atas merupakan masalah rutin yang menimpa petani di desa Pemongkong dan seringkali mengalami gagal panen. Pada musim kemarau tidak banyak yang bisa diharapkan dari usaha tani di desa ini, kecuali apabila curah hujan cukup banyak dan serta-merta memiliki kantong penampungan air (embung) barang kali itu sudah cukup untuk dapat bercocok tanam di lahannya sendiri. Belakangan ini petani yang memiliki embung bisa menanam tembakau atau tanaman palawija yang lain pada awal musim kemarau, tetapi pertumbuhannya tidak optimal karena tidak

cukup air. Walaupun curah hujan mencukupi dan tanaman tumbuh dengan baik, secara bersamaan hama juga berkembang dengan cepat dan oleh petani seringkali sulit untuk diberantas.

Selain perilaku alam yang tidak bersahabat itu, kemampuan ekonomi (modal) yang lemah dari petani ikut menyumbangkan ketidakberhasilan dalam usaha taninya. Petani di daerah ini sebenarnya punya inisiatif besar untuk memanfaatkan teknologi unggul dalam menangani masalah tersebut. Akan tetapi tidak dimilikinya modal yang cukup untuk membeli saprodi(pupuk dan obat-obatan) menyebabkan tanamannya tidak dipelihara dengan baik. Sering kali petani kembali ke pola tradisional membiarkan tanamannya begitu saja tanpa dipelihara. Bahkan untuk memberantas hama yang menyerang tanaman tidak jarang petani melakukan cara-cara “halus”, karena mereka masih percaya terhadap keberadaan makhluk halus yang dapat mengganggu kehidupan termasuk tanaman. Pada umumnya hama yang banyak mengganggu tanaman di desa Pemongkong antara lain babi, tikus, belalang dan ulat. Untuk memberantas hama tersebut petani tidak melakukan tindakan “kekerasan”-- misalnya babi diusir atau dibunuh dan penyemprotan dengan obat/racun pembunuh hama-- akan tetapi dihalau dengan cara “halus” karena hama-hama tersebut dianggapnya sebagai makhluk halus. Kalau tidak demikian hama-hama tersebut akan menyerang lebih parah lagi sampai semua tanaman rusak, bahkan pemilik lahan juga bisa diganggu.

Melihat situasi yang demikian petani di Pemongkong cenderung untuk tidak menanam tanaman tertentu yakni tanaman yang paling suka dijarah hama itu,

misalnya jagung dan ketela pohon. Begitu pula untuk jenis tanaman lainnya banyak terserang penyakit yang oleh sebagian petani tidak mampu berbuat banyak karena kurangnya modal untuk membiayai pemeliharaan tanaman.

Kurangnya modal ini di satu sisi menyebabkan pengelolaan usaha tani tidak dilakukan secara optimal, di sisi lain pemanfaatan lahan yang tersedia tidak maksimal. Kecuali petani yang berlahan sempit, petani yang memiliki lahan relatif luas sering kali tidak menggarap keseluruhan lahannya. Sebagian lahannya tidak ditanami dan dibiarkan menghutun kembali. Keadaan ini berlatar belakang dari kurangnya modal yang dimiliki, sehingga kadang-kadang antara petani berlahan sempit dengan petani berlahan luas menggarap lahan yang luasnya sama yakni sama-sama sempit. Semua itu bermuara pada tingkat penghasilan yang relatif rendah dan merupakan kondisi nyata yang mengarah pada kemiskinan. Meskipun program teknologi unggul berupa bantuan sarana produksi pertanian telah diperkenalkan, akan tetapi belum memberikan hasil optimal karena teknologi unggul tersebut masih sangat tergantung pada kondisi alam setempat.

Di samping menanam tanaman pangan, masyarakat (petani) juga memelihara ternak sebagai sumber tambahan penghasilan. Umumnya ternak yang dipelihara seperti kerbau, sapi, domba, kambing, ayam, dan itik. Hal ini sangat memungkinkan karena petani dapat memanfaatkan tanah kosong milik negara untuk tempat penggembalaan. Untuk ternak sapi banyak mengalami kendala, sebab masih banyak penduduk yang memelihara domba yang menurut pengakuan penduduk setempat, sapi tidak baik dipelihara bersama domba karena biasanya sapi akan sakit. Selain itu

kendala yang umum dihadapi petani dalam memelihara ternak di daerah ini, di samping sulitnya mendapatkan pakan ternak di musim kemarau juga masih sering terjadi pencurian (bahkan perampokan) sehingga kadang-kadang petani enggan memelihara ternak terutama kerbau, sapi dan kambing/domba.

Suatu program terpadu juga telah dilaksanakan pemerintah melalui sistem tanaman campuran (agro forestry) yaitu gabungan beberapa sub sistem tanaman dalam bentuk tumpang sari mencakup tanaman pangan dan tanaman keras selain penting untuk konservasi, hasil tanaman ini dapat meningkatkan pendapatan petani. Tetapi satu hal yang perlu dipahami bahwa sekali ia menanam tanaman keras maka akan sulit menanam lagi tanaman pangan disitu. Padahal yang pokok bagi petani saat ini adalah tanaman yang cepat menghasilkan bukan tanaman jangka panjang yang belum tentu prospeknya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab berikut disajikan secara rinci tentang karakteristik sosial ekonomi keluarga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering), yang meliputi umur, kelamin, pendidikan, status perkawinan, bentuk keluarga, , pendapatan dan kekayaan. Uraian tentang masalah ini penting diketahui dan sangat bermanfaat untuk melihat latar belakang responden (petani) sulit berkembang di daerah tadah hujan (lahan kering). Pada sub bab berikutnya di uraikan tentang strategi survival yang dikembangkan rumah tangga petani miskin dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk di saat krisis, dan bagaimana peran negara/pemerintah dalam upaya meningkatkan tarap hidup petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering).

Karakteristik Sosial Ekonomi Responden

Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu – BAB III – jumlah responden yang diambil untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang. Sebagian besar (92 %) responden yang terpilih berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan hanya 8 persen. Semua responden sudah menikah, sebagian besar (88 %) masih berstatus kawin dan selebihnya sudah janda/duda karena ditinggal mati dan/atau diceraikan oleh pasangannya.

Umur responden berkisar antara 20 - 65 tahun, sebagian besar berumur di bawah 59 tahun. Dari 60 responden yang diwawancarai hanya 20 % yang berusia

lanjut. Ini berarti dari segi usia sebagian besar responden tergolong tenaga kerja produktif.

Tabel 6
Umur Responden (n = 60)

Golongan Umur	Frekuensi	%
20 – 39	29	48
40 – 59	19	32
60 +	12	20
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

Tidak jauh beda bahkan sama halnya seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, bahwa sebagian besar responden berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan. Dari 60 responden yang diwawancarai diketahui bahwa sebagian besar buta huruf (tidak pernah sekolah), atau pernah memasuki SD tapi tidak sampai selesai. Secara keseluruhan 53 persen responden buta huruf, 38 persen berpendidikan SD tetapi sebagian (52 persen) tidak tamat, selebihnya 7 persen SLTP seluruhnya tidak sampai tamat dan hanya 2 persen pernah “duduk di bangku” SLTA.

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Responden (n = 60)

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
Buta huruf	32	53
Tidak tamat SD	12	20
Tamat SD	11	18
Tidak tamat SLTP	4	7
Tamat SLTA	1	2
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

Rata-rata keluarga petani terutama yang berusia lanjut tak pernah mengenal bangku sekolah, ataualaupun mengenalnya hanya sampai di bangku SD dan itu pun acapkali tidak tamat. Cukup banyak petani di desa Pemongkong yang tidak bisa membaca dan menulis. Dulu, waktu mereka acapkali habis tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak atau kurang ada waktu untuk sekolah. Demikian pula anak-anak mereka sering tidak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tua atau keluarga bekerja di lahan dan membantu mencari nafkah tambahan. Seorang informan A. SD (62 tahun) menuturkan :

“Tidak ada waktu sekolah, hanya sekolah linggis, cangkul, menggembala, hanya itu jadi sekolah. Begitu caranya dididik oleh orang tua, kakek, nenek. Tidak pernah diajar sekolah pakai pensil seperti sekarang. Hanya cucu yang pernah sekolah, tapi kalau anak saya tak ada yang pernah sekolah”.

M. YS (55 tahun), tokoh masyarakat di desa Pemongkong menuturkan :

“Anak-anak di sini kadang-kadang SD sudah agak besar, sudah bisa dipakai untuk bekerja, sangat diharapkan tenaganya. Nah itu sebabnya banyak juga yang out. Seperti di kampung sebelah ini bukan out lagi di sana itu, banyak yang belum sekolah. Setelah saya tanya, dibutuhkan untuk menggembala kambing”.

Lemahnya kondisi ekonomi, dan masih berfungsinya anak sebagai tenaga kerja produktif di lahan antara lain merupakan faktor yang menjadi kendala bagi keluarga petani miskin di desa Pemongkong untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat dari bentuk keluarga masyarakat pedesaan yang umumnya merupakan keluarga somah (extended family), gambarannya agak berbeda dengan masyarakat petani miskin yang menjadi responden penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar (63 persen) adalah keluarga batih (nuclear

family), yakni sebuah keluarga yang terdiri atas ayah (suami), Ibu (istri) dan anak-anaknya.

Kondisi ini berkait dengan kultur masyarakat setempat yang mana pola pemilihan tempat tinggal setelah melangsungkan perkawinan tidak lagi bersama orang tua, meskipun rumah yang dibangun masih pada tanah warisan atau tanah pekarangan di sekitar rumah orang tua. Bahkan akhir-akhir ini ada kecendrungan anak yang telah menikah membangun rumah dan tinggal berjauhan dengan orang tua.⁶⁹

Tetapi meskipun demikian, hal itu bukan berarti ikatan kekeluargaan dan kekerabatan di kalangan petani di desa penelitian telah memudar atau lemah. Secara fisik antara orang tua dan anaknya yang sudah menikah kebanyakan memang telah hidup terpisah dan tinggal di rumahnya masing-masing. Namun secara kultural sesungguhnya mereka masih tetap memiliki jalinan hubungan batin yang kuat dan langgeng. Mereka bukan saja masih tetap intensif saling mengunjungi tetapi mereka juga saling menjaga agar hubungan emosioanal tetap terpelihara dengan baik.

Tabel 8
Bentuk Keluarga Responden (n = 60)

Bentuk Keluarga	Frekuensi	%
Somah (extended family)	32	37
Batih (Nuclear family)	38	63
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

⁶⁹ B. Titik Widiari (Peny.), Perubahan Nilai-nilai Budaya pada Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, (Jakarta:Depdikbud, 1998)

Bentuk keluarga somah yang dianggap paling penting dalam masyarakat agraris termasuk di daerah penelitian, meskipun masih terlihat namun cenderung menurun. Pada tipe keluarga seperti ini, unit-unit rumah tangga petani miskin biasanya ditempati oleh beberapa keluarga atau anggota keluarga yang masih berkerabat. Pembentukan keluarga somah modifikasi seperti ini merupakan salah satu strategi atau pola adaptasi mereka dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Ketidakmampuan dan keterbatasan ekonomi mereka untuk membangun pemukiman masing-masing dan atau keharusan untuk menghidupi anggota keluarga yang lain, misalnya orang tua, saudara, keponakan, cucu dan lain sebagainya, mengharuskan mereka hidup bersama dalam satu rumah tempat tinggal.

A.AN (25 tahun), memiliki seorang istri dan dua orang anak masih kecil-kecil. Ayahnya sudah lanjut usia (65 tahun) sedangkan ibunya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia juga mempunyai saudara dua orang. Sampai saat ini dia belum mampu membangun rumah karena dari hasil lahannya seluas 61,88 are yang digarap bersama orang tuanya belum cukup untuk membangun rumah sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari saja selain dari hasil lahan yang tidak begitu diharapkan, dia juga memelihara ternak dan mencari upah buruhan bersama istri dan saudaranya di mana saja ada pekerjaan. Namun penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, apalagi untuk membangun sebuah rumah. Karena itu sejak menikah, dia tinggal serumah bersama istri, anak, orang tua dan saudara-saudaranya. Karena orang tuanya sudah tua, malah dia menjadi "tulang punggung" dalam keluarganya.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering). Tingkat kehidupan mereka boleh dikatakan setaraf dengan nelayan tradisional yang mana dari hari ke hari selalu hidup dengan pendapatan pas-pasan bahkan mengalami kekurangan.

Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi ekonomi yang rendah (miskin) dalam kehidupan rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) adalah fakta yang bersifat fisik berupa kondisi lingkungan rumah. Kampung-kampung mereka mudah diidentifikasi dari kondisi rumah huniannya. Rumah-rumah yang sederhana bahkan sangat sederhana : berdinding anyaman bambu (gedek), berlantai tanah dan beratap alang-alang adalah tempat tinggal keluarga responden. Meskipun sebagian besar (95 persen) telah memiliki rumah sendiri namun kondisinya sangat memperhatikan dan jauh dari standar rumah layak. Tidak hanya karena sebagian besar (82 persen) rumah responden lantainya masih banyak yang terbuat dari tanah dan sebagian yang lain cuma semen (18 persen), tapi lebih dari itu umumnya juga dinding-dinding rumahnya sebagian besar (95 persen) hanya terbuat dari anyaman bambu (gedek). Dalam penelitian ini dari hasil pengamatan terhadap kondisi rumah responden, hanya 3 persen responden yang rumahnya berdinding tembok/bata, bahkan masih dijumpai responden yang rumahnya berdinding alang-alang (2 persen). Selain itu yang cukup memperhatikan juga adalah atap rumahnya masih banyak (57 persen) terbuat dari alang-alang. Hal ini tidak mengherankan, karena alang-alang tidak sulit didapatkan, bahkan cukup banyak responden yang memiliki lahan sebagiannya ditumbuhi alang-alang.

Tabel 9
Kondisi Rumah Responden (n = 60)

Kondisi rumah						
Lantai		Dinding			Atap	
Semen	Tanah	Bata	Gedek	Ilalang	Genteng	Ilalang
11 (18 %)	49 (82 %)	2 (3 %)	57 (95 %)	1 (2 %)	26 (43 %)	34 (57 %)
60 (100 %)		60 (100 %)			60 (100 %)	

Sumber : Data Primer

Memang relatif sulit bagi petani di lokasi penelitian untuk membangun sebuah rumah permanen, apalagi hanya mengharapkan hasil dari bercocok tanam di lahannya yang kering yang seringkali mengalami kegagalan karena kurang hujan atau pun hama penyakit. Meski ada pekerjaan sampingan, hasilnya lebih diutamakan bagi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Untuk dapat memiliki sebuah rumah yang dikatakan permanen, paling tidak-- meski tidak harus-- seseorang mesti mencari penghasilan tambahan dan rela bekerja ke luar daerah. Seorang tokoh masyarakat di lokasi penelitian A. MN (55 tahun) menjelaskan :

“Nah, yang yang pergi ke Malaysia, dia yang putih rumahnya (rumah bata/tembok, pen). Kalau semata-mata hasil usaha di kawasan, tidak dapat, ya sekedar sampai beratap genteng tapi masih berdinding gedek”.

Tidak berbeda dengan penjelasan H. M. NH (60 tahun), tokoh agama dari desa tetangga yang sejak lama mendirikan yayasan di desa tersebut.

“-- perumahannya kira-kira sepuluh persen baru ada peningkatannya. Ini gara-gara bantuan Malaysia (hasil kerja di Malaysia, pen) baru bisa berubah keadaan rumahnya. Seandainya tidak ada hasil dari Malaysia, mungkin akan tetap seperti dulu ketika ada bantuan pemukiman sampai sekarang”.

Melihat kondisi perumahan responden yang sebagian besar masih sederhana, sudah bisa diduga bahwa perabotan yang dimiliki termasuk aset yang

lain tentu relatif sederhana pula. Sangat jarang ditemukan sebuah rumah yang lantainya tanah, berdinding gedek dan beratap alang-alang di desa penelitian berisi perabotan dan barang-barang lainnya yang relatif memadai baik dari segi nilai, kualitas maupun jumlahnya. Barang-barang pecah belah merupakan perabotan yang paling utama dimiliki, sebab selain untuk kebutuhan sehari-hari, harganya relatif bisa terjangkau oleh responden.

Tabel 10
Pemilikan Benda-benda Ekonomis (n = 60)

Jenis Barang	Punya	Tak Punya	Jumlah
Barang Pecah Belah	60 (100%)	0 (0%)	60 (100%)
Mebel	25 (42%)	35 (58%)	60 (100%)
Elektronik	23 (38%)	37 (62%)	60 (100%)
Sepeda	10 (17%)	50 (83%)	60 (100%)
Pershiasan	7 (12%)	53 (88%)	60 (100%)
Lainnya	5 (8%)	55 (95%)	60 (100%)
Sepeda motor	1 (2%)	59 (98%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer

Secara umum masyarakat petani di pedesaan cenderung untuk menyimpan barang-barang yang gampang diuangkan untuk berjaga-jaga bila keadaan terjepit. Karena itu tidak mengherankan apabila dalam penelitian ini seluruh responden memiliki atau menyimpan barang-barang semacam itu, misalnya piring, gelas dan sebagainya. Akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh, tidak sedikit responden memiliki piring, gelas ataupun benda untuk keperluan makan-minum lainnya hanya cukup untuk makan-minum bagi sejumlah anggota keluarga yang ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa barang-barang yang harganya relatif tinggi

kebanyakan tidak mampu dibeli oleh responden. Dari 60 responden yang diwawancarai, hanya satu orang (2 persen) yang mampu membeli sepeda motor.

I.SR (50 tahun), seorang janda yang terpilih menjadi responden dalam penelitian ini, dia tinggal bersama dua orang anak perempuannya yang sudah remaja di sebuah rumah sangat sederhana : lantainya tanah, dindingnya dari gedek dan atapnya alang-alang. Di rumahnya tak ada apa-apa kecuali seekor ayam yang dipelihara dan beberapa buah perabotan hanya untuk keperluan makan-minum sehari-hari. Tidak ada untuk disimpan. "Pekerjaan saya setiap hari hanya keliling jua! es, bagaimanana saya bisa membeli emas," katanya.

Di samping harta-benda di atas, lebih dari separuh rumah tangga petani miskin memelihara hewan/ternak , terutama ayam/itik (58 %), sebagai sumber tambahan penghasilan.

Tabel 11
Pemilikan Hewan Ternak (n = 60)

Jenis Ternak	Punya	Tak Punya	Jumlah
Ayam/itik	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
Kambing/domba	18 (30%)	42 (70%)	60 (100%)
Sapi	4 (7 %)	56 (93%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer

Hewan / ternak milik rumah tangga petani tersebut pada musim di mana rejeki sudah menipis biasanya akan sangat bermanfaat sebagai penyambung hidup atau bila ada keperluan-keperluan lain, misalnya untuk hajatan , bisa disembelih atau dijual.

Selain gambaran fisik dan harta benda yang dimiliki tersebut, untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan dapat dilihat dari tingkat pendapatan keluarga.

Tabel 12
Penghasilan Keluarga Responden (n = 60)

Penghasilan (Ribuan) *	Frekuensi	%
< 396	32	53
396-792	27	45
> 792	1	2
Jumlah	60	100

Ket. * Pendapatan bersih dari usaha tani lahan kering dalam satu tahun terakhir (1998)

Sumber : Data Primer diolah

Dilihat dari besarnya penghasilan keluarga dari sektor usaha tani lahan kering, tingkat pendapatan yang diperoleh relatif rendah. Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa sebagian besar (53 %) responden berpenghasilan di bawah Rp 396000. Bahkan jika dihubungkan dengan besarnya tanggungan keluarga, maka rata-rata pendapatan perkapita mereka menjadi lebih rendah lagi.

Apabila dilakukan perhitungan menurut standar yang dikembangkan oleh Sayogyo dan Singarimbun dan Penny⁷⁰ melalui perhitungan ekuivalen beras perkapita pertahun yaitu 240 kg setara beras perkapita pertahun dengan standar harga beras setempat sebesar Rp 2200 per kilogram pada tahun 1998, maka dari 60 responden yang diteliti seluruhnya (100 %) merupakan golongan petani di bawah "cukupan" Artinya pendapatan (dari usaha tani lahan kering) yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

⁷⁰ Lihat Sayogyo, "Garis..."; Singarimbun dan Penny, Penduduk...

Seorang responden A. SM (52 tahun) menuturkan :

“Hasilnya ya apa boleh buat, istri saya mencukupi cukupkan sendiri apa adanya. Kalau saya turuti cukup Pak, saya tidak pernah cukup, tidak pernah”.

Kenyataan ini juga dibenarkan oleh informan MH (45 tahun) :

“Kalau berbicara masalah cukup, ya sulit. Kalau tidak dibantu dengan utang, mereka akan kesulitan, istilahnya gali lobang tutup lobang, tapi kadang-kadang utangnya tidak bisa dibayar. Mereka juga cari pekerjaan lain, ya berburuh.”

Seorang responden MD (28 tahun) juga menuturkan :

“Penghasilan saya tidak mencukupi kebutuhan, dasarnya karena berutang lebih dulu. Bisa dapat Rp 5000 sehari tapi pakai juga bayar utang habis Rp 6000 karena sudah kita ambil duluan, saya biasa berutang di warung-warung. Saya bayar utang tiap hari. Ada hasil yang tiap hari saya bayar, ada lebihnya untuk beli beras satu kilogram. Tidak cukup berutang lagi nanti kita tutupi”.

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa penghasilan rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) cukup memperhatikan, kendati telah berupaya mendiversifikasikan usaha/ pekerjaan, toh masih banyak di antara mereka yang relatif belum mampu mencukupi kebutuhan primer. Apalagi sebuah rumah tangga petani yang hanya mengandalkan hidup dari satu mata pencaharian, mereka dalam banyak hal akan relatif lebih sulit untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Ketidakberhasilan petani dalam mendiversifikasikan usaha/ pekerjaannya disebabkan oleh kondisi alam yang tidak menguntungkan, tidak dimilikinya modal atau aset produksi yang memadai, tingkat keterampilan yang rendah, dan kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang lemah.

Strategi Mempertahankan Kelangsungan Hidup

Sebagaimana telah diungkapkan pada sub bab terdahulu bahwa fakta yang umum dialami petani di daerah tadah hujan (lahan kering), khususnya di desa penelitian, bahwa kehidupan petani dari hari ke hari sangat fluktuatif, karena pendapatan dari usaha taninya relatif tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kondisi ini yang menyebabkan petani di daerah tadah hujan (lahan kering) tetap menjadi petani miskin dan rawan terhadap krisis-krisis subsistensi sehingga sulit bisa berkembang secara optimal.

Yang unik, meski petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) tetap terlibat dalam kemiskinannya, umumnya rumah tangga petani masih dapat berbuat sesuatu agar mereka tetap bertahan untuk hidup (*survive*). Pada dasarnya setiap rumah tangga petani miskin memiliki strategi atau cara tersendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, mengatasi tekanan-tekanan ekonomi di saat krisis maupun untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Berbagai strategi dan cara yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, selain bisa dilakukan sendiri-sendiri juga bisa dilakukan secara serentak, cara mana ditentukan oleh kondisi dan krisis yang dialami masing-masing rumah tangga petani. Semakin berat tekanan-tekanan ekonomi dan krisis yang dialami sebuah rumah tangga petani semakin banyak pula strategi atau cara, tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasinya, tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan anggota keluarga sendiri saja, melainkan juga menciptakan ketergantungan pada kelompok sosial lain yang lingkupnya lebih besar, yang ada di wilayah sekitarnya.

Sebelum sebuah rumah tangga petani miskin memutuskan untuk berpaling pada sistem sosial yang lebih besar tersebut, langkah awal yang ditempuh dalam mengatasi tekanan ekonomi agar mereka tetap survive adalah mengandalkan kemampuan mandiri. Kemampuan mandiri untuk menambah arus pendapatan dalam rumah tangga petani sebagian besar (98 %) dengan berusaha mencari sumber-sumber penghasilan (diversifikasi usaha) baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian (pola nafkah ganda), mengerahkan anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga (82 %) dan mencari pekerjaan ke luar desa (47 %).

Tabel 13
Cara Responden Menambah Penghasilan (n =60)

Cara Menambah Penghasilan	Ya	Tidak	Jumlah
Diversifikasi usaha	59 (98%)	1 (2 %)	60 (100%)
Memfaatkan anggota keluarga	49 (82%)	11 (18%)	60 (100%)
Mencari kerja ke luar desa	28 (47%)	32 (53%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer

Penganekaragaman usaha/pekerjaan dilakukan petani karena disadari bahwa hasil optimal dari bercocok tanam di lahan kering sulit diharapkan dan mau tidak mau harus mencari usaha/pekerjaan apa saja yang penting rumah tangga petani bisa tetap bertahan hidup. Seorang responden A.AR (42 tahun) menuturkan

“Untuk dapat hidup, berbagai macam cara saya lakukan. Pergi menangkap ikan, madak, untuk ditukar dengan beras, pergi mencangkul, mencari kayu, batu untuk dijual dan segala pekerjaan yang dilakukan kebanyakan orang asalkan bisa untuk makan, saya kerjakan”.

Dalam masyarakat pertanian lahan kering kegiatan bercocok tanam jarang menjadi pekerjaan yang eksklusif. Bercocok tanam selalu dikombinasikan dengan usaha atau pekerjaan lain di luar usaha taninya. Hal ini berkaitan dengan

kemampuan lahan kering yang sulit diharapkan bagi peningkatan produksi. Sebagaimana dikemukakan Geertz,⁷¹ bahwa pola ekologi lahan kering (ladang) tidak dimungkinkan untuk mengintensipkan penggarapannya. Berbeda dengan sawah (beririgasi) dengan kemampuannya menyerap jumlah penggarap yang bertambah tanpa menimbulkan penurunan produktifitas melalui intensifikasi—meskipun dewasa ini kecenderungannya sudah jenuh⁷²—pada umumnya hal semacam itu tidak mungkin ditempuh oleh petani lahan kering, sebab keseimbangan ekologisnya tidak stabil. Karena itu upaya yang dilakukan rumah tangga petani lahan kering untuk memperoleh penghasilan tambahan adalah mencari usaha sampingan di luar usaha taninya (diversifikasi usaha).

Tabel 14
Jenis Usaha / Pekerjaan Sampingan Responden (n = 59)

Jenis Usaha / Pekerjaan Sampingan	Ya	Tidak	Jumlah
Berkebun	59 (100%)	0 (0%)	59 (100%)
Buruh / kerja serabutan	57 (97%)	2 (3%)	59 (100%)
Peternak	48 (81%)	11 (19%)	59 (100%)
Memelihara alang alang	20 (34%)	39 (66%)	59 (100%)
Nelayan	16 (28%)	43 (72%)	59 (100%)
Perdagangan	6 (10%)	53 (90%)	59 (100%)
Tukang	3 (5%)	56 (95%)	59 (100%)
Industri kecil	3 (5%)	56 (95%)	59 (100%)
Dukun	2 (3%)	57 (97%)	59 (100%)
Jasa angkutan	1(2%)	58 (98%)	59 (100%)

Sumber : Data Primer

⁷¹ Lihat Geertz, *Involusi...*

⁷² Lihat Siahaan, "Tekanan..."

Di Pemongkong -- desa penelitian-- jenis usaha / pekerjaan sampingan yang umumnya banyak dilakukan untuk memperoleh tambahan penghasilan adalah berkebun (menanam tanaman perkebunan antara lain : jambu mete, jarak, kapas, pisang, kelapa, dan tembakau). Selain itu kerja sampingan yang banyak dilakukan adalah kerja serabutan (97 persen). Pekerjaan ini tak dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu saja melainkan semua jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan uang bagi rumah tangga petani. Sekalipun pekerjaan-pekerjaan yang upahnya rendah tidak hanya diterima, tetapi disyukuri sebagai suatu rejeki tersendiri. Ketika musim penghujan tiba di mana lahan-lahan mulai dikerjakan, petani biasanya tidak menggarap lahannya secara terus-menerus. Akan tetapi diselingi dengan kerja upahan di luar lahannya. Hal itu dilakukan karena rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) tidak memiliki simpanan yang cukup sampai musim penghujan tiba. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kerja di lahan para petani mencari kerja upahan pada tetangga atau penduduk yang lebih mampu di wilayah sekitarnya, seperti dituturkan oleh seorang responden A. AN (25 tahun):

“Keadaan kita di sini kalau musim hujan kita kerja di ladang. Sementara itu tak ada sango (simpanan bahan konsumsi atau uang, pen.) kan. Walaupun sibuk kerja di ladang, tapi sango tidak ada, kita lepas pekerjaan di ladang. Kita terlebih dahulu mencari upah pada orang lain. Ada hasil (upah) satu hari baru kita kerjakan ladang, merawat tanaman. Setelah kerja 2-3 hari diladang tak ada lagi sango untuk menanam, simpanan tak ada. Lagi kita mencari upah 1-2 hari cukup untuk beli beras, lagi kita kerjakan ladang. Begitu saja caranya, kalau tidak demikian kita tidak dapat makan”.

Pada musim kemarau waktu luang bagi petani di daerah tadah hujan (lahan kering) cukup panjang, mengingat musim kerja di lahan sudah selesai karena

lahan-lahan yang ada tidak digarap lagi. Ada usaha atau pekerjaan dimana pada musim hujan sulit dilakukan, setelah musim kemarau bisa menghasilkan peningkatan pendapatan bagi petani. Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan tidak membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus, tapi lebih banyak mengandalkan kekuatan otot dan tenaga. Meskipun usaha/pekerjaan yang dilakukan sifatnya temporer (tergantung orang yang membutuhkan), akan tetapi bagi petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) memiliki arti ganda : tidak hanya menambah penghasilan, tapi pada saat tidak ada pekerjaan, waktu luang mereka dipergunakan untuk merawat lahannya. Seorang responden A SM (52 tahun) menuturkan :

“Selain berladang, saya berkuli batu, menebang kayu seperti sekarang ini saya sedang berkuli menebang kayu di ladangnya A. Arep (tetangga responden, pen.), Rp 40000 per truk. Seandainya dapat dua truk sehari berarti teman empat sama-sama Rp 20000 kalau sedang ada, tapi kan tidak menentu. Setelah habis kayunya di A. Arep saya menunggu lagi sementara ada orang yang menyuruh, kalau tidak ada orang yang menyuruh, mulai ambil linggis pergi gali batu. Pada saat tidak ber-kuli saya kerja di ladang meskipun belum waktunya. Saya membersihkan rumput agar waktu akan mengolah tanah, langsung dicangkul”.

Selain kerja serabutan, rumah tangga petani lahan kering mengisi waktu luang-- setelah musim tanam dan sambil menunggu musim panen tiba-- dengan usaha-usaha produktif. Pekerjaan tersebut telah menjadi bagian integral dari aktifitas ekonomi mereka dan tidak mengganggu pekerjaan pokok sebagai petani. Usaha-usaha produktif yang banyak dilakukan adalah memelihara ternak, mengingat masih tersedianya lahan yang relatif luas untuk penggembalaan. Selain lahannya sendiri, lahan tetangga dan tanah-tanah kosong (milik negara) tidak

jarang juga dimanfaatkan sebagai tempat mengembala ternaknya, kecuali ayam/itik dipelihara di sekitar tempat tinggal.

Di sektor yang membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus seperti tukang, dukun, pengrajin industri kecil meskipun dilakukan namun belum banyak yang menekuni. Demikian pula sektor yang memerlukan modal besar seperti jasa transportasi masih relatif sulit untuk bisa berkembang, bahkan dari sektor jasa tidak lebih dari 2 persen. Sementara dagang kecil-kecilan hanya sebesar 10 persen.

Selain melakukan usaha-usaha di desa, alternatif selanjutnya yang di tempuh rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) untuk menambah penghasilannya adalah terpaksa mencari nafkah dari sumber-sumber di luar desa yang masih bisa dijangkau (47 persen), entah desa-desa tetangga sekitarnya, maupun ke kota atau daerah lain yang belum tentu memberikan penghasilan yang memadai.

Kenyataan ini nampak di desa penelitian di mana banyaknya hari-hari kosong di sektor usaha tani lahan kering dimanfaatkan untuk mencari upah buruhan di desa tetangga yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah persawahan dengan irigasi yang relatif baik. Pada umumnya jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mencangkul lahan-lahan milik petani daerah setempat. Disamping kerja sendiri-sendiri ada juga secara berkelompok 5-10 orang. Musim panen—padi—merontokkan bulir-bulir padi (ngerampek) di pemilik panen dengan sistem berkelompok/ borongan. Setiap 11 kwintal hasil panen, kelompok memperoleh 1 kwintal dibagi bersama.

Apabila usaha-usaha di desa sekitarnya masih belum memadai, maka alternatif lain yang dilakukan oleh rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan adalah dengan melakukan migrasi meskipun hal itu membutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang relatif besar, terutama soal biaya. Untuk dapat melakukan migrasi ke daerah/tempat yang cukup jauh seringkali harus "ngutang" ke tetangga atau kerabat lainnya bahkan menggadaikan barang yang hanya satu-satunya yang dimiliki, terutama tanah/lahan kering yang tidak seberapa nilainya. Adanya kenalan atau sanak saudara yang sudah terlebih dahulu bekerja dan tinggal di daerah tujuan merupakan salah satu faktor yang acapkali menjadi daya tarik bagi petani untuk mengambil keputusan melakukan migrasi dan cara ini banyak di tempuh oleh rumah tangga petani yang masih relatif muda. Daerah yang banyak menjadi sasaran mencari pekerjaan biasanya ke luar kabupaten sampai luar propinsi. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan biasanya sebagai buruh bangunan dan menjadi kuli di perusahaan. Ketika musim sibuk kerja di lahan (musim penghujan) atau setelah memperoleh sejumlah penghasilan mereka kembali ke desa untuk mengerjakan lahannya.

Gambaran di atas mengindikasikan bahwa meskipun usaha-usaha mencari pekerjaan di luar usaha tani baik di desa maupun di luar desa, namun hal ini tidak berarti bahwa hasil kerja mereka benar-benar mampu menghidupi keluarganya. Banyaknya hari-hari kosong di sektor usaha tani lahan kering, menyebabkan petani terpaksa mencari kerja di luar usaha taninya, yang apabila dikaji sesungguhnya sebagian besar pekerjaan yang masih bisa dijangkau tersebut bukan merupakan alternatif pekerjaan yang memadai. Meskipun secara statistik bukti-

bukti mengenai sumbangan penghasilan yang diperoleh dari luar usaha taninya terhadap penghasilan keluarga tidak nampak dalam penelitian ini, namun dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa penghasilan yang diperoleh relatif belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Kenyataan ini menurut Scott, mencerminkan munculnya konsekuensi suatu pola migrasi jangka pendek yang semi permanen, atau disebut “menyerbu ekonomi uang” (raiding the cash economy). Pola ini bercirikan semakin tergantungnya masyarakat desa (petani) kepada kemungkinan-kemungkinan marginal atau scavenging (mencari sisa-sisa makanan) dalam perekonomian di luar desa. Migrasi yang terjadi bukanlah sesungguhnya dimana orang yang bersangkutan lantas terserap di sektor modern, melainkan pada umumnya merupakan suatu usaha untuk menutup kekurangan sumber subsistensi setempat sebagai sebuah upaya untuk survival.⁷³ Kenyataan di desa penelitian sebagian besar petani mencari alternatif pekerjaan di luar usaha taninya dengan bekerja asal dapat makan, misalnya kerja serabutan, dan yang mencari kerja di luar desa pun pada umumnya sebagai buruh atau kuli yang peranannya tidak besar untuk mengganti penghasilan dari usaha tani lahan kering.

Bahkan tidak jarang warga di daerah penelitian nekat mengadu nasib ke luar negeri. Dari wawancara terhadap responden yang pernah melakukan migrasi tidak sedikit di antara mereka pernah merantau sampai ke luar negeri, terutama

⁷³ Lihat Scott, Moral..., h.326-327

Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. MH (45 tahun) tokoh masyarakat setempat menuturkan:

“Upaya-upaya mereka sementara tidak tinggal diam. Kadang kadang kalau ada pekerjaan lain, kadang-kadang mereka itu ke luar daerah untuk mencari pekerjaan untuk menanggulangi kebutuhannya sehari-hari. Pekerjaan ke luar daerah, pertama kadang-kadang ke Sumbawa, Denpasar, toh juga ke Malaysia ada. Upaya ini dilakukan karena sementara menurut mereka kalau dia kerja di daerahnya sendiri (Pemongkong, pen) kadang-kadang hasilnya itu tidak seimbang. Jadi mereka untuk mencari pekerjaan ke luar daerah dia mengharapkan pendapatannya lebih tinggi daripada di tempatnya sendiri”.

Namun apa yang diharapkan di luar negeri sesungguhnya tidak selalu sesuai dengan kenyataan, seperti yang dialami oleh A. AN (25 tahun) mantan tenaga kerja ilegal di Malaysia. Ia menceritakan:

“Dulu saya pernah ke Malaysia, tapi hasilnya tidak ada. Kalau orang ke Malaysia tergantung nasib. Orang yang bernasib mujur setahun saja di sana langsung bisa bangun rumah batu. Kalau tidak ada nasib seperti saya yang kemarin, permit tidak ada, setiap saat dikejar polisi. Akhirnya tidak ada hasil. Sudah ada pekerjaan tetap, gawat disini polisi datang mencari orang yang tidak punya permit. Kita lari ke kebun yang agak sepi di mana ada toke yang berani bertanggung jawab.”

Sementara itu, tekanan-tekanan ekonomi yang dialami sebuah rumah tangga bukan mutlak menjadi beban kepala keluarga. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, isu substansial yang selalu dihadapi oleh rumah tangga adalah bagaimana individu-individu yang ada di dalamnya dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kelangsungan hidup keluarga tetap terpelihara. Anggota-anggota keluarga harus memiliki kemauan dan kepedulian untuk mencari penghasilan, bagaimana pun kecilnya perolehan penghasilan itu. Setiap anggota rumah tangga bisa memasuki ragam pekerjaan

yang dapat diakses sehingga penghasilan yang diperoleh berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama.

Di Pemongkong-- desa penelitian-- individu-individu dalam rumah tangga petani merupakan sumber daya yang bernilai ekonomis. Oleh sebab itu yang dilakukan adalah bagaimana memobilisasi anggota-anggota yang ada itu memperoleh penghasilan untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga. Suami (kepala keluarga) tidak menjadi pencari nafkah utama, karena istri dan anaknya juga dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan.

Tabel 15
Anggota Keluarga yang Dimanfaatkan
Mencari Tambahan Penghasilan (n = 49)

Anggota keluarga yang mencari tambahan penghasilan	Ya	Tidak	Jumlah
Istri	40 (82%)	9 (18%)	49 (100%)
Anak	15 (31%)	34 (69%)	49 (100%)
Orang tua	8 (16%)	41 (84%)	49 (100%)
Saudara	3 (6%)	46 (94%)	49 (100%)
Cucu	1 (2%)	48 (98%)	49 (100%)

Sumber : Data Primer

Dari tabel 15 dapat disimak bahwa ibu rumah tangga (istri) di daerah tadah hujan (lahan kering) memiliki peran yang sangat penting untuk menambah penghasilan keluarga. Dari tabel yang sama diketahui 82 persen responden yang memanfaatkan anggota rumah tangganya untuk mencari nafkah tambahan melibatkan keberadaan istri. Selain tetap membantu pekerjaan pokok suami di sektor pertanian, ia (istri) biasanya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain secara serabutan.

Ragam pekerjaan yang dimasuki oleh istri untuk memperoleh penghasilan adalah memelihara ternak (kambing, sapi, domba, ayam, itik), berburuh pada proyek-proyek pemerintah, kerja upahan pada lahan petani di sekitarnya, memetik daun tembakau, pedagang bakulan, pengrajin anyam-anyaman ketak yang disebut kecupu, dan dagang kecil-kecilan. Di samping itu ada juga yang mencari rumput laut terutama keluarga yang tinggal tidak jauh dari pantai, mencari kepiting, ikan dan kerang di laut yang oleh masyarakat setempat disebut madak. Mereka turun ke laut ketika air laut sedang surut dan dalam satu bulan hanya beberapa hari saja. Bila keadaan kurang menguntungkan dalam sehari hanya bisa memperoleh kurang lebih 50 biji kerang ditukar dengan 1-2 kilogram beras. Tetapi tidak jarang juga hasilnya cukup memuaskan bagi rumah tangga petani miskin, seperti yang dituturkan oleh M. YS (55 tahun) :

“... agak lumayan juga turun ke laut, saya tanya yang perempuan kadang-kadang memperoleh Rp 20000 – Rp 35000 satu kali turun. Tapi kan waktunya sedikit sekali. Kalau memang pul setiap hari laut itu kering saya kira juga tidak kesulitan. Kadang-kadang satu bulan paling 4 hari turun ke laut”.

Dalam jenis tertentu, macam pekerjaan yang ditekuni kaum ibu/istri di daerah tadah hujan masih terkait dengan usaha sampingan suami. Untuk pekerjaan yang sama, pendapatan istri bisa menyamai penghasilan suami. Dalam hal ini bisa dikatakan kontribusi istri sangat menunjang bagi pendapatan keluarga. Seorang suami yang berburuh pada proyek-proyek pemerintah seringkali istrinya juga ikut bekerja pada proyek yang sama misalnya proyek padat karya di sektor pertanian dan kehutanan. Dalam setengah hari dari proyek padat karya ini baik laki-laki

(suami) maupun wanita (istri) sama-sama memperoleh upah sebanyak 2 kilogram beras.

Di samping istri, anak juga menanggung beban yang sama untuk membantu penghasilan keluarga. Dalam penelitian ini, anak keluarga petani di daerah tadah hujan (lahan kering) terlibat untuk memperoleh penghasilan dan acapkali terpaksa putus sekolah di tengah jalan. Anak laki-laki yang sudah dewasa di samping berburuh serabutan biasanya cenderung memilih mencari pekerjaan ke luar desa. Atas dorongan orang tua dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, terutama orang tua, anak laki-laki dewasa harus rela meninggalkan kampung halamannya merantau ke daerah-daerah yang dianggapnya dapat memberikan harapan lebih baik.

SM (50 tahun), di samping bertani dia sebagai ketua RT di kampungnya. Dia tinggal bersama seorang istri, satu orang anak laki-laki dan dua orang cucunya yang di tinggal kawin oleh ibunya. Anaknya yang laki pernah sekolah sampai tingkat SLTA tetapi tidak sampai selesai. Menurut penuturan SM anak laki-lakinya itu tidak ingin menyusahkannya. Anaknya berpikir mau jadi apa nanti setelah selesai sekolah, lebih baik cari pekerjaan yang bisa mendatangkan uang buat membantu orang tua, katanya. Atas ijinnya, akhirnya anaknya ke luar dari sekolah dan pergi merantau ke Malaysia beberapa tahun yang lalu.

Anak yang masih termasuk usia sekolah sepulang sekolah atau pada saat libur sekolah mengumpulkan buah jarak dan buah kelor di ladang, mengumpulkan garam di lahan di mana orang tuanya berburuh, pergi madak, bahkan ada yang memanfaatkan jalan-jalan desa yang rusak ditimbuni tanah agar bisa lancar

dilewati dan atas jasanya diberikan sejumlah uang dari pemakai jalan. Menurut keterangan salah seorang anak, di mana peneliti juga pernah memberikan uang ketika melewati jalan tersebut, sehari bisa memperoleh Rp 200 – Rp 300. Hasil yang diperoleh dari pekerjaannya itu meskipun sebagian besar dimanfaatkan sendiri, paling tidak mereka telah mengurangi beban orang tuanya, yang seharusnya uang belanja untuk jatah mereka bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau buat uang jajan mereka pada hari-hari berikutnya. Bagi rumah tangga petani miskin potensi anak-anak tersebut sangat membantu dalam meringankan beban orang tua.

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa tindakan kolektif dari anggota-anggota rumah tangga memang sangat diperlukan, meski hal itu bukan jaminan bagi rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) bebas dari belenggu kemiskinan. Akan tetapi sumbangan penghasilan dari anggota-anggota yang ada di dalamnya entah itu istri, anak bahkan orang tua atau pun saudara bagaimanapun kecilnya tetap memiliki arti yang fungsional bagi rumah tangga miskin untuk dapat tetap survive dari tekanan-tekanan ekonomi ataupun kebutuhan-kebutuhan mendadak ketika mengalami krisis subsistensi.

Upaya-upaya mandiri yang dilakukan rumah tangga petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) untuk menyiasati tekanan-tekanan ekonomi agar tetap survive, selain mencari tambahan penghasilan, bentuk strategi yang banyak dikembangkan adalah adaptasi pola konsumsi sehari-hari yakni mengatur pola konsumsi disesuaikan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Bagi rumah tangga petani miskin pada umumnya mengubah pola konsumsi menurut musim dan

keadaan ekonomi merupakan kiat untuk mempertahankan hidup. Ketika mereka merasa memperoleh hasil lebih, pola konsumsi mereka relatif lebih baik. Akan tetapi pada saat terjadi tekanan-tekanan terhadap kebutuhan subsistensi, biasanya strategi pengetatan ikat pinggang menjadi suatu alternatif. Yang dimaksud dengan pengetatan ikat pinggang di sini adalah pengetatan dalam pengeluaran anggaran dalam hal konsumsi sehari-hari.

Tabel 16
Cara Pengetatan Konsumsi Sehari-hari (n = 60)

Cara Pengetatan Konsumsi	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Jumlah
Menu makanan disederhanakan	58 (97 %)	2 (3 %)	0 (0 %)	60 (100%)
Frekuensi makan dikurangi	40 (67 %)	17 (28 %)	3 (5 %)	60 (100%)
Uang jajan anak dikurangi	30 (50 %)	19 (32 %)	11 (18 %)	60 (100%)
Uang jajan orang tua dikurangi	12 (20 %)	20 (33 %)	28 (47 %)	60 (100%)

Sumber : Data Primer

Dari tabel 16 di atas nampak bahwa, sebagian besar petani miskin lahan kering yang menjadi responden penelitian ini sering mengatur menu makanan sehari-hari (97 persen). Bahkan ditemukan bahwa tidak ada responden yang tidak pernah mengurangi kualitas makannya. Jatah makan yang sesungguhnya sudah sederhana, dicoba untuk lebih disederhanakan lagi dengan mengkonsumsi apa saja yang ada tanpa mampu menjamin apakah menu yang dimakan bergizi. Pada musim-musim tidak ada pekerjaan seringkali rumah tangga petani miskin di daerah lahan kering mengkonsumsi nasi dicampur dengan jagung atau sayurinya hanya berupa hasil dari tanaman di lahan sendiri; misalnya daun / buah kelor,

kacang panjang, kedelai, jagung dan sebagainya , yang tidak sempat dijual

di pasaran. Seorang responden MY (30 tahun) menuturkan :

“Kalau saya sedang nganggur, saya tidak berani berutang, lebih baik saya makan pakai sayur garam. Istri saya cari daun-daunan di ladang seperti kacang panjang, daun turi. Tahun kemarin saya menanam kacang panjang, tapi hasilnya, ya sekedar untuk sayur”.

Sebagian lagi tidak dengan menurunkan standar gizi, tetapi dengan cara mengurangi frekuensi makan. Dalam penelitian ini sebagian besar (67 persen) responden mengaku sering mengurangi frekuensi makan. Pola makan biasanya 3 hari sehari terpaksa dirubah menjadi 2 kali, makan siang dan makan malam. Jatah untuk sarapan (makan pagi) diganti hanya dengan minum kopi atau rokok atau makan singkong, jagung rebus sekedar “pengganjal” perut sementara menunggu makan siang. Tidak jarang juga dilakukan dengan membatasi atau mengurangi jumlah beras yang dikonsumsi, seperti penuturan A. SM (52 tahun) sebagai berikut :

“Sekarang istri saya menanam 3 kg perhari, yang 3 kg itu, 1 kilogram disisihkan untuk mengirit. Tidak saya turuti napsu makan sebagaimana keinginan. Harus saya batasi diri, yang penting tetap ada tiap saat. Sekarang saya mau menambah nasi untuk makan, tapi nasi tidak ada. Ya cukup dengan satu piring saja agar bisa untuk nanti. Saya juga sering makan dua kali sehari. Ketika istri saya agak kurang menanam nasi berarti beras sudah menipis. Diberitahu oleh istri saya, besok tak usah sarapan karena beras tinggal sedikit”.

Selain mengurangi frekuensi atau jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi strategi berikutnya adalah mengurangi uang jajan untuk anak dan orang tua sendiri juga mengurangi uang belanja ; misalnya mengurangi jatah rokok atau kopi, meskipun yang disebut terakhir dalam penelitian ini sebagian besar (47 persen) responden mengaku tak pernah melakukannya. Menurut

penuturan responden kalau sekali saja tidak ngopi (minum kopi, pen.) pada waktunya, kepala suka pusing-pusing dan justru membawa akibat tertundanya berbagai pekerjaan.

Upaya mengencangkan ikat pinggang seperti diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi petani miskin atau kaum miskin pada umumnya dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Untuk tetap bertahan mereka harus mau makan apa adanya, layaknya pola hidup miskin.

Menurut Scott,⁷⁴ strategi semacam itu merupakan satu strategi “mengalah” karena menyangkut usaha untuk “mencukup-cukupkan” sumber-sumber yang ada yang meskipun mungkin dalam jangka pendek mampu meredam ancaman krisis, dalam jangka panjang sesungguhnya tidak baik dipertahankan. Tidak jarang akibat pengetatan konsumsi yang dilakukan kadang-kadang justru membawa efek pengeluaran biaya yang lebih besar karena ada anggota keluarga yang sakit akibat kurang gizi maupun tidak memadainya kalori yang dibutuhkan tubuh dibandingkan tenaga yang harus dikeluarkan untuk bekerja.

Di samping pengetatan konsumsi sehari-hari, pengetatan lain yang dilakukan petani miskin di daerah tadah hujan (lahan kering) adalah pengetatan pengeluaran untuk proses produksi usaha tani dan membatasi pengeluaran untuk kebutuhan sandang. Pada saat sedikitnya penyangga ekonomi yang tersedia, pada umumnya para petani tidak memburuhkan pengerjaan lahan selama proses

⁷⁴ Idem, h.317

produksi melainkan seluruh anggota keluarga yang ada dikerahkan untuk membantu proses produksi, atau mencari orang lain untuk membantu mengerjakan proses produksi dengan syarat dia (pemilik lahan) juga akan membantu orang lain tersebut untuk pekerjaan yang sama setelah pekerjaan di lahan selesai. Sistem tersebut umumnya banyak dilakukan di daerah penelitian yang disebut dengan istilah besiru, meskipun hal ini dapat menunda pekerjaan lain di lahan karena harus membantu bekerja pada orang yang telah membantunya.

Sementara itu pengetahuan dalam hal sandang, umumnya keluarga petani miskin membeli pakaian diwaktu-waktu tertentu saja -- misalnya pada hari raya-- atau membeli pakaian yang lebih murah bahkan pakaian bekas pun tidak menjadi masalah. Seorang responden RH (45 tahun) menuturkan :

“Sudah dua tahun saya tidak pernah membeli sarung. Ini (sarung, pen) saya beli dulu Rp 15000 sama-sama satu dengan istri saya, waktu itu masih murah. Lebaran kemarin saya pakai ini juga. Sekarang harga pakaian mahal. Baju yang saya pakai ini beli di rombongan di pasar Keruak, yang penting murah”.

Di antara strategi-strategi melalui pengetahuan pengeluaran rumah tangga petani miskin masih ditemukan strategi yang bentuknya sederhana yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban seremonial, yakni dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan. Sudah merupakan kebiasaan di daerah penelitian bahwa setiap ada kegiatan hari-hari besar keagamaan -- Lebaran, Isro' Mi'roj dan Maulid Nabi--setiap rumah tangga memberikan / menyumbangkan sejumlah konsumsi (makanan) untuk dinikmati bersama-sama dalam acara tersebut. Namun ketika kondisi ekonomi rumah tangga tidak memungkinkan untuk disisihkan bagi kegiatan itu, tidak jarang rumah

tangga petani tidak dapat (dan tidak dipaksakan) memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebagaimana informasi M. YS (55 tahun) tokoh masyarakat di daerah penelitian :

“Kami di sini lain-lain prinsip, karena rowah di sini artinya kalau secara bahasa dasarnya mengingat arwah. Jadi kalau ada semacam tekanan tidak ada. Jadi kami memberikan kelonggaran kalau memang ada rejeki misalnya sesudah selesai panen tergantung keadaan masyarakat. Kalau keadaan seperti ini kami juga memberikan batasan sesuai dengan keadaan sehari-hari itu”.

Strategi-strategi semacam itu meskipun tidak dimaksudkan untuk menanggulangi secara total masa krisis, tetapi dapat mengurangi beban rumah tangga petani miskin atau paling tidak, tidak menggoyahkan tiang penyangga ekonomi rumah tangga karena makanan yang seharusnya diperuntukkan untuk acara tersebut dapat digunakan bagi pemenuhan konsumsi keluarga pada hari berikutnya.

Kemudian bentuk strategi lain yang dikembangkan rumah tangga petani miskin di daerah hujan (lahan kering) agar tetap survive dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi selain usaha-usaha mandiri di lingkup keluarga adalah dengan mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan dengan sistem penunjang yang ada di desa yang terbentuk dalam suatu jaringan sosial. Jaringan sosial dapat berbasis kerabat, tetangga atau teman, baik yang bersifat horizontal maupun jaringan sosial vertikal. Isi dari jaringan sosial tersebut berupa tukar-menukar dan pinjam-meminjam sumber daya ekonomi seperti uang, barang atau jasa.

Kerabat merupakan pilihan pertama yang dapat diandalkan sebagai tempat menggantungkan harapan untuk menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam penelitian ini kecenderungan tersebut nampak dari lebih dominannya rumah tangga petani memanfaatkan jaringan keluarga dekat (kerabat) ketimbang keberadaan tetangga atau teman.

Tabel 17
Pihak Yang Sering Diminta Bantuannya
Oleh Responden (n = 30)

Pihak yang diminta bantuan	Ya	Tidak	Jumlah
Saudara	19 (63%)	11 (37%)	30 (100%)
Anak	11 (37%)	19 (63%)	30 (100%)
Orang tua	7 (23%)	23 (77%)	30 (100%)
Tetangga / teman	6 (20%)	24 (80%)	30 (100%)

Sumber : Data Primer

Meskipun jika dilihat bentuk keluarga dari rumah tangga petani miskin di daerah penelitian sudah cenderung berpola keluarga batih (nuclear family), tetapi pada umumnya mereka tak akan membiarkan begitu saja anggota kerabatnya ketika menghadapi suatu masalah. Terutama tekanan-tekanan ekonomi yang memberatkan, rasa kebersamaan antar anggota keluarga/kerabat muncul dengan kadar yang lebih kuat. Orang tua acap masih dianggap sebagai tempat mengadu dan menyelesaikan berbagai masalah keluarga. Seperti diakui oleh sejumlah responden yang pernah meminta bantuan orang lain, 23 persen berpaling kepada dukungan orang tua. Di samping itu anak juga seringkali dijadikan tumpuan apabila mengalami kesulitan-kesulitan (37 persen) dan anggota kerabat lainnya yang lebih mapan, seperti saudara.

Ikatan yang kuat dengan orang tua, anak atau kerabatnya bukan hanya menguntungkan secara ekonomi tapi juga dapat menimbulkan rasa aman. Bahkan bagi orang tua masih berpandangan bahwa anak memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber jaminan masa depan ketika berusia senja. Seperti pandangan seorang responden AT (42 tahun) :

“Seperti katanya orang tua semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Sekarang waktu kecil-kecil kita lelah, nanti setelah tua senang. Satu orang tak bisa membantu kita, mungkin dua orang bisa. Yang satu tidak bisa, yang lain mungkin bisa. Ada yang membelikan kita sirih ada yang membelikan kita tembakau”.

Begitu pula apa yang dialami oleh A. SD (62 tahun) :

“... kalau sedang tidak ada terpaksa nganggur. Tidak makan kadang-kadang setengah hari, tidak sampai satu hari. Kemudian saya sibuk cari sama anak, cucu karena banyak anak dan cucu saya disini. Saya tidak di berikan tidak makan sampai satu hari karena anak cucu banyak. Anak saya delapan, Pak. Laki-laki empat, perempuan empat sudah kawin semua, sudah punya anak semua. Anak saya banyak karena senjata (alat kelamin, pen) saya ampuh. Satu kali tancap langsung jadi, ha ha ha. Dia saja yang membantu bila sedang tidak ada, saya diantarkan sayur apa yang dia masak, ada daun kelor, daun kacang panjang ...”

Rumah tangga petani miskin yang tidak meminta bantuan ke kerabatnya, namun ke tetangga, umumnya terjadi jika rumah tangga petani itu punya kerabat tapi tidak tinggal berdekatan/sedesa, atau walaupun punya tapi kondisi sosial-ekonomi kerabatnya tidak memungkinkan untuk diminta bantuannya. Bantuan-bantuan yang diterima dari tetangga umumnya sama baiknya dengan bantuan dan bentuk pertolongan yang diterima dari kerabatnya dan harapan tetangga yang telah membantunya itu akan memperoleh perlakuan setimpal di kemudian hari apabila mereka dalam kesulitan. Para tetangga itu biasanya menyediakan bantuan

dalam bentuk utang tanpa bunga (biasanya berupa uang atau barang konsumsi yang jumlahnya tidak banyak cukup untuk kebutuhan beberapa waktu saja), atau memberi bantuan lauk-pauk sekedarnya. Prinsip yang sama nampak sekali apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan rumah tangga petani di daerah penelitian, misalnya peristiwa kematian pada suatu keluarga tanpa diminta, kerabat maupun tetangga/teman memberikan bantuan apa saja sesuai kemampuan masing-masing, apakah itu kemampuannya lebih mapan ataukah lebih buruk dari keluarga yang mengalami musibah. Kerabat atau tetangga laki-laki biasanya memberikan uang, yang perempuan membawa barang-barang konsumsi, bahkan menyelesaikan kegiatan secara gotong-royong dalam hal tenaga kerja, di mana semua yang terlibat di dalamnya paling tidak diperlakukan sama di kemudian hari.

Pola-pola yang demikian menurut Gouldner⁷⁵ merupakan prinsip resiprositas yang merembesi kehidupan petani dan mungkin kehidupan sosial pada umumnya. Prinsip tersebut memiliki gagasan bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan sampai merugikannya. Di daerah penelitian pada dasarnya prinsip tersebut masih kuat bersandar dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam skala kebutuhan yang mungkin lebih besar, apabila perlindungan yang dilakukan oleh lingkungan terdekatnya tidak mencukupi, maka alternatif yang bisa ditempuh adalah melalui transaksi utang kepada pihak-pihak yang secara ekonomi relatif mampu. Pihak-pihak itu tidak saja para kerabat dan

⁷⁵ Idem, h. 255

tetangga/teman sedesa, akan tetapi sampai ke luar desa mencari sumber-sumber yang bisa diandalkan.

Tabel 18
Pihak Yang Sering Menjadi
Tempat Berutang (n = 58)

Pihak tempat berutang	Ya	Tidak	Jumlah
Kerabat	34 (59%)	24 (41%)	58 (100%)
Tetangga	30 (52%)	28 (48%)	58 (100%)
Pedagang	20 (34%)	38 (66%)	58 (100%)
Majikan	7 (12%)	51 (88%)	58 (100%)

Sumber : Data Primer

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa pihak kerabat atau tetangga masih menjadi andalan utama rumah tangga petani miskin sebagai sumber mendapatkan utang. Hal ini karena di samping lebih gampang untuk memperolehnya juga masih kuatnya rasa solidaritas di antara mereka untuk saling membantu meski hanya soal utang piutang. Namun demikian masih dijumpai penduduk desa yang membungakan uang seperti seorang rentenir, suatu istilah yang biasanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, misalnya para pemilik tanah. Bagi rumah tangga petani miskin yang sangat membutuhkan tidak ada jalan keluar selain ia harus menerimanya agar rumah tangganya tetap survive.

Seorang informan A. SH (36 tahun) menuturkan :

“Sekarang tetangga yang mampu ada kesadaran. Kalau duluan tetangga yang mampu semakin tinggi. Kenapa, satu jadi dua kita berhutang, 10 kembali 20. Sekarang agak sedikit satu menjadi satu setengah. Walaupun tinggal sebulan kita akan panen satu menjadi satu setengah. Tidak kita ambil tak ada untuk makan. Kita ambil tapi menyakitkan, keadaan terpaksa ...”

Rumah tangga petani yang cenderung berutang ke pedagang-pedagang/kios memang telah menjadi langganan tetap dan memiliki hubungan baik. Para petani biasanya mengambil barang-barang -- bahan konsumsi, kadang-kadang juga saprodi-- untuk kebutuhan selama musim tanam sampai panen. Utang tersebut baru dibayar setelah selesai panen dengan harga melebihi dari harga semula, dan para petani bisa berutang kembali bagi kebutuhan berikutnya. Namun sering terjadi di daerah penelitian, karena keberhasilan usaha tani lahan kering tidak menentu utang tidak terbayar bahkan acapkali ditunda sampai beberapa tahun dengan bunga semakin berlipat.

Selain mengembangkan jaringan sosial antar kerabat atau tetangga terdekatnya, para petani juga memanfaatkan dan menciptakan pranata-pranata tradisional yang merupakan upaya kreatif dari petani setempat. Upaya seperti itu menurut Norman Uphoff, ⁷⁶ disebutnya sebagai potensi energi sosial budaya kreatif. Energi sosial itu sendiri menurutnya merupakan gagasan konstruktif yang diupayakan masyarakat (petani) untuk memenuhi harapan dan cita-cita bersama yang dalam prosesnya ditempuh dengan mengembangkan sifat-sifat persahabatan antar pelaku. Dalam konteks penelitian ini potensi energi sosial budaya kreatif menunjuk pada pranata tradisional yang diciptakan sendiri oleh para petani.

⁷⁶ Norman Uphoff, *Learning from Gal Oya* (Ithaca University Press, 1990)

Tabel 19
Pemanfaatan Pranata Tradisional (n = 46)

Jenis Pranata Tradisional	Ya	Tidak	Jumlah
Simpan Pinjam	4 (9%)	42 (91%)	46 (100%)
Banjar	44 (96%)	2 (4%)	46 (100%)

Sumber : Data Primer

Pranata ini-- terutama yang menonjol adalah kelompok banjar-- menjadi basis yang kuat dari suatu strategi tolong-menolong antar petani di daerah penelitian. Ruang lingkup kelompok banjar bisa menjangkau suatu pemukiman setingkat RT atau dusun. Kelompok ini sangat membantu rumah tangga petani untuk keperluan yang memerlukan biaya besar , seperti peristiwa perkawinan dan kematian, yang mungkin akan sulit diperoleh secara sekaligus. Seorang informan

A. SN (49 tahun) menjelaskan :

“... terbentuknya banjar itu apabila nanti ada acara misalnya masyarakat itu walaupun miskin suatu saat mengalami musibah tidak begitu susah karena dibantu sama teman. Hasil musyawarah dalam satu kepala keluarga harus mengeluarkan sekian sehingga keperluan mereka yang kena musibah itu cukup. Kalau tidak seperti itu kadang-kadang tidak bisa untuk membeli kain putih. Oleh karena itu dengan adanya banjar itu dia tidak susah meskipun dia tidak punya simpanan”.

Di Pemongkong -- daerah penelitian ini-- aktifitas pranata ini sangat sederhana dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Karena itu banjar merupakan pranata yang paling populer diminati masyarakat dibandingkan pranata sosial ekonomi lain. Untuk banjar kematian, setiap anggota mengeluarkan beras satu kilogram, uang Rp 1000, gula seperempat kilogram dan satu buah kelapa, dikumpulkan dan dikoordinir oleh seorang pengurus. Ini dilakukan setiap ada musibah kematian anggota kelompok (setiap anggota bisa lebih dari satu kali).

Sedangkan banjar perkawinan sistemnya menyerupai arisan karena setiap anggota hanya mendapat jatah sama-sama sekali ketika ada anggota keluarganya yang kawin, terutama diprioritaskan bagi laki-laki. Biaya yang dikeluarkan bagi masing-masing anggota relatif lebih besar daripada banjar kematian karena acara pesta seringkali dilaksanakan lebih dari sehari dan dimeriahkan oleh kesenian tradisional. Beras sebanyak 5 kilogram, uang Rp 1000, gula setengah kilogram, dua buah kelapa dan satu dulang makanan rata-rata bernilai Rp 15000, ditambah lagi biaya ekstra berupa gula 1 kilogram dan uang Rp 5000, berlaku untuk banjar kematian dan perkawinan.⁷⁷

Kegiatan banjar tersebut tidak saja berwujud soal materi, tetapi lebih dari itu semua urusan dianggap sebagai tanggung jawab bersama sehingga mekanisme tolong-menolong ini akan lebih memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas antar petani. Pesta perkawinan misalnya, bagi kaum miskin merupakan sumber pangan yang cukup berarti karena seluruh anggota keluarga – anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan -- dapat menikmati hidangan secara bersama-sama.

Sementara itu pranata simpan-pinjam yang umumnya berupa koperasi pasar dimanfaatkan sebagai sumber modal usaha kecil-kecilan di desa. Namun seringkali apabila keadaan kepepet modal pinjaman habis untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Selain usaha-usaha mandiri keluarga (melalui apa saja yang dapat meningkatkan penghasilan, penyesuaian-penyesuaian kondisi setempat),

⁷⁷ Hasil wawancara dengan responden A.ST (65 tahun).

pengendalian kepada bentuk-bentuk saling bantu dalam jaringan sosial, strategi yang dikembangkan rumah tangga petani miskin dalam menyiasati tekanan-tekanan ekonomi adalah melepas sedikit tabungan yang masih ada yang sesungguhnya memang sudah sedikit adanya. Upaya itu bisa dilakukan dengan cara menggadaikan barang-barang yang dimilikinya atau (jika terpaksa) menjual barang-barang itu jika kebutuhan yang harus segera dipenuhi relatif besar jumlahnya. Pada umumnya barang-barang yang pernah digadaikan oleh petani yang menjadi responden penelitian ini adalah tanah. Barang tersebut (tanah) umumnya tidak digadaikan pada lembaga formal seperti pegadaian, tetapi barang tersebut umumnya digadaikan kepada kerabat atau tetangga terdekat di sekitarnya. Dengan cara mengadaikan tanah ke kerabat atau tetangga, para petani miskin berharap suatu hari mereka dapat segera menebus kembali tanahnya karena para kerabat atau tetangganya tidak membebani bunga atas tanah itu sehingga memberikan kemudahan untuk memilikinya kembali.

Namun acap terjadi akibat tidak sanggupnya menebus barang (tanah) yang telah digadaikan dan besarnya kebutuhan yang segera dipenuhi, sebagian rumah tangga miskin terpaksa harus merelakan barangnya itu beralih milik kepada pihak dimana barang itu digadai atau menjualnya pada pihak lain yang bisa memberikan penawaran harga yang lebih tinggi, atau menjual barang-barang lainnya yang masih dimilikinya. Lebih jelasnya, seorang informan M.YS (55 tahun) menuturkan :

“... saya lihat secara nyata kadang-kadang dia berutang. Nah ini yang menjadi sasaran yang tidak sehat. Lama-kelamaan artinya utang tidak terbayar akan kembali juga ke masalah tanahnya. Kadang-kadang digadaikan ke orang lain, sulit dikembalikan bisa juga jatuh jual”.

Tabel 20
Jenis Barang yang Pernah Dijual (n = 22)

Jenis barang yang Pernah dijual	Ya	Tidak	Jumlah
Ternak	17 (77%)	5 (23%)	22 (100%)
Tanah	5 (23%)	17 (77%)	22 (100%)
Barang Pecah Belah	4 (18%)	18 (82%)	22 (100%)
Mebel	1 (5%)	21 (95%)	22 (100%)
Perhiasan	1 (5%)	21 (95%)	22 (100%)

Sumber : Data Primer

Dari hasil wawancara terhadap 60 petani yang menjadi responden penelitian ini, terdapat 22 (37 %) petani mengaku pernah menjual barang-barang milik rumah tangganya guna menanggulangi tekanan-tekanan ekonomi terutama memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendadak. Beberapa jenis barang yang pernah dijual responden untuk memenuhi kebutuhan hidup tertera pada tabel 20.

Peran Negara/Pemerintah dalam Program

Bantuan Peningkatan Pendapatan

Program bantuan peningkatan pendapatan yang dilaksanakan melalui program pengembangan wilayah terpadu merupakan suatu program yang diharapkan dapat merangsang perencanaan “dari bawah”, dengan mengikutsertakan masyarakat (petani) untuk berpartisipasi dalam proses menentukan keperluan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian dalam kenyataannya meskipun cara partisipasi sebagian ditempuh oleh pemerintah, akan tetapi karena program tersebut bersifat multisektoral – mengikutsertakan banyak pihak – masih dimungkinkan program bantuan peningkatan pendapatan cenderung dijalankan dengan cara memobilisasi petani. Kenyataan ini dapat dilihat pada tabel 21, di mana dalam tabel tersebut dikemukakan bagaimana

keterlibatan petani miskin di desa Pemongkong dalam program bantuan peningkatan pendapatan.

Dari tabel 21 diketahui bahwa petani miskin yang ikut program bantuan peningkatan pendapatan sebagian besar (53 %) melalui mobilisasi aparat pemerintah, sedangkan yang mengatakan ikut melalui partisipasi hanya sebanyak 47 persen.

Tabel 21
Cara Menggerakkan Petani Miskin
Dalam Program Bantuan Peningkatan Pendapatan (n = 60)

Cara Menggerakkan	Frekuensi	%
- Mobilisasi	32	53
- Partisipasi	28	47
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

Mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan petani miskin untuk ikut terlibat dalam program bantuan peningkatan pendapatan melalui partisipasi petani memang diakui. Seorang responden misalnya menuturkan :

“ ... sebelum diberikan diadakan penyuluhan, ada ketua kelompok. Saya tidak keberatan karena seandainya berhasil yang 5 kilogram berapa kuintal hasilnya dari sana saya berpikir. Jadi tidak keberatan, tidak dipaksa, syukur dibantu.”

Di satu pihak pendekatan partisipasi masyarakat (petani) yang dijalankan seperti diuraikan di atas di mana sebelum program bantuan peningkatan pendapatan diturunkan diberikan penyuluhan agar petani atas kesadaran dan kemampuannya sendiri ikut terlibat dalam program tersebut, tidak keliru, meskipun sebenarnya pendekatan tersebut dirancang untuk membantu petani mengikuti keinginan “dari atas”. Tapi di pihak lain masih dominannya cara

mobilisasi dalam menggerakkan keterlibatan petani – yang berarti peran pemerintah masih relatif dominan – akhirnya proses program bantuan peningkatan pendapatan di desa Pemongkong acap bersifat top down. Dalam banyak hal proses program tersebut lebih banyak dirancang dan ditentukan oleh aparat pemerintah daripada melibatkan masyarakat (petani) setempat dan cenderung kurang menguntungkan kelompok petani miskin.

Dalam penentuan sasaran misalnya, studi ini menemukan bahwa pihak yang melakukan seleksi dan berperan dalam memilih anggota kelompok tani yang berhak menerima bantuan adalah aparat desa. Apabila dilihat dari sasaran yang harus dijangkau oleh program bantuan peningkatan pendapatan, tentu yang seharusnya diprioritaskan adalah keluarga-keluarga petani yang berpenghasilan rendah (miskin). Tetapi aparat pemerintah dalam praktiknya masih menambah sejumlah persyaratan yang lain. Para petani yang didahulukan untuk memperoleh bantuan peningkatan pendapatan tidak hanya tergolong miskin, tetapi juga mereka harus memiliki kejujuran artinya pihak-pihak yang diberikan bantuan adalah mereka yang dapat dipercaya dan sanggup mengembalikan bantuan tersebut meski belum tentu bantuan itu bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik. Misalnya dalam kasus bantuan ternak (sapi) dari Dinas Peternakan yang mana sasarannya masih dipilih-pilih menurut kehendak aparat. Hal ini dengan jujur diakui oleh seorang petugas Dinas Peternakan setempat.

“... sasaran bantuan itu (ternak sapi, pen) menurut aturan, ya petani miskin. Tapi ini tempat anunya kita sehingga kita pilih. Ada juga petani miskin kita berikan, tapi kita harus teliti informasi dari desa atau kadus. Walaupun miskin dia jujur itu yang paling baik jadi sasaran. Ini yang miskin terus tidak jujur, susah kita.”

Tindakan aparat yang mengarahkan bantuan peningkatan pendapatan bagi pihak-pihak tertentu, dimaksudkan agar bantuan itu bisa berkembang dan dikembalikan dengan tepat waktu. Hal ini terkait dengan tanggung jawab aparat untuk menjaga agar bantuan itu tidak lenyap begitu saja, sebab apabila bantuan itu macet atau lenyap akhirnya akan mempengaruhi kondite mereka di mata atasan dan bisa mungkin program bantuan yang lain tidak diberikan lagi. Namun tindakan seperti itu oleh sebagian petani jelas dirasakan kurang/tidak adil. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba bertindak “nakal” dan mengambil keuntungan pribadi dari program bantuan peningkatan pendapatan. Menurut keterangan dari seorang responden, untuk mendapatkan bantuan sapi tetangganya menyerahkan “uang rokok” sebesar Rp 50000 dan hal ini dirasakan sangat berat apalagi bagi petani miskin yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan. Tidak saja dengan meminta “uang rokok” tapi bisa juga dengan mengurangi jatah yang seharusnya merupakan hak penerima bantuan. Seorang tokoh masyarakat menuturkan :

“... nah begitu bantuan disini Pak, tidak begitu datang diterima oleh masyarakat, tidak disalurkan betul-betul ke masyarakat dulu, disanalah kita masih kecewa. Sama juga seperti bantuan pupuk, nanti yang jadi ketua saja yang kenyang. Kadang-kadang dapat sama-sama dua kuintal pupuk, paling-paling yang diterima masyarakat satu kuintal. Nah begitu modelnya di sini, makanya tidak bisa adil”

Model top down yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat (petani) dan kondisi setempat acap tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh petani yang menjadi sasaran program. Benar, hampir seluruh responden yang diwawancarai tidak

pernah menolak program bantuan peningkatan pendapatan, termasuk program pembangunan yang lain.

Namun setelah ditelusuri lebih mendalam ternyata tidak seluruh responden yang menerima bantuan tersebut lantas melaksanakan sesuai petunjuk – yang notabene merupakan keinginan “dari atas”. Dalam tabel 22 berikut dikemukakan bagaimana sikap petani miskin terhadap program bantuan peningkatan pendapatan di desa Pemongkong.

Tabel 22
Sikap Responden Terhadap
Program Bantuan Peningkatan Pendapatan (n = 60)

Sikap petani	Frekuensi	%
Menerima dan melaksanakan	27	45
Menerima, tidak melaksanakan	32	53
Menolak	1	2
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel tersebut diketahui sebagian besar (53 %) petani miskin menerima program bantuan peningkatan pendapatan tapi kemudian tidak dilaksanakan menurut aturan yang ada, bahkan ada yang mengaku menolak bantuan tersebut (2 %). Hanya 45 % petani yang menerima dan mau melaksanakan sesuai keinginan pemerintah.

Sikap petani yang tidak mengikuti petunjuk “dari atas” tidak berarti bahwa petani memiliki sifat menentang atau rasa curiga – meskipun masih ada – terhadap pemerintah. Namun sikap petani yang cenderung menolak itu lebih didorong oleh tidak sesuainya antara keinginan “dari atas” dengan kebutuhan dan kondisi “di

bawah” yang tentu lebih dipahami dan dikuasai oleh petani setempat daripada aparat di atas.

Seorang responden A.BD (59 tahun) memiliki lahan kering seluas 0,66 hektar. Ia menerima bantuan dari pemerintah (Dinas Pertanian) berupa obat-obatan dan bibit jagung setelah lahannya ditanami lebih dulu. Ia tidak mengikuti jadwal tanam yang ditentukan pemerintah sebab apabila mengikuti jadwal tanam yang ditentukan pemerintah maka lahannya lebih dulu penuh dengan rumput, dan ini menyulitkan penanaman. Karena itu A.BD menanam setelah hujan 2-3 kali (sebelum tanah kekenyangan air dan rumput tumbuh), sehingga bibit jagung tumbuh lebih cepat dari rumput. Bibit yang diterima dari pemerintah dijual untuk biaya makan dan membayar utang.

Menurut petunjuk dari Dinas Pertanian (PPL Pertanian) bahwa jadwal tanam untuk lahan kering dilokasi penelitian berkisar antara bulan Desember – Januari setelah curah hujan paling tidak 60 mm – kebasahan tanah sudah mencapai kedalaman tertentu untuk bisa ditanami. Akan tetapi kebiasaan petani untuk menanam sebelum jadwal tersebut menyebabkan apa yang diinginkan pemerintah dalam hal penanaman masih banyak yang tidak menuruti. Adalah rasional bagi petani apabila ia tidak menuruti jadwal pemerintah dengan maksud untuk menghindari resiko yang mungkin akan lebih berat dihadapi daripada keuntungan yang belum tentu diperolehnya. Bahkan apa yang dilakukan oleh A.HD (41 tahun) ketika menolak bantuan ternak (sapi) yang sebenarnya akan diterima, karena ia tahu memelihara sapi di daerah tadah hujan (lahan kering) akan lebih banyak kendalanya dari pada hasilnya terutama soal

pakan pada musim kemarau sulit dicari. Selain itu ia takut dirampok kalau menerima bantuan ternak tersebut.

Lalu bagaimana dengan petani yang menerima bantuan peningkatan pendapatan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Apakah bantuan yang diterimanya bisa dikembangkan dengan baik dan memperoleh keuntungan yang memadai. Apabila bantuan itu benar-benar merupakan keinginan petani dan sesuai dengan kondisi daerah setempat mungkin dengan kesungguhan untuk bekerja keras petani akan bisa mengembangkan dan memperoleh keuntungan yang memadai. Tetapi karena bantuan peningkatan pendapatan itu merupakan daftar keinginan “dari atas” yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi “di bawah” maka tidak mengherankan bila petani tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa petani mengeluh sehingga jangankan memperoleh keuntungan, malah tidak jarang petani mengalami kerugian dan hanya memperoleh lelah saja. Seorang responden A.AT (42 tahun) misalnya menuturkan :

“Saya sudah dapat bantuan dari pemerintah berupa sapi, misalnya sapi itu beranak, anaknya akan diambil oleh pemerintah. Setelah anak yang kedua mungkin baru saya diberikan induknya sebagai milik sendiri. Tapi disini kan daerah kritis dan banyak kawan-kawan yang punya domba. Ya tidak pernah sampai beranak, sekitar dua bulan saya pelihara sapi itu kemudian mati. Saya hanya dapat lelah menyabit rumput saja.”

Apabila ditinjau kembali tujuan dari program peningkatan pendapatan jelas adalah untuk meningkatkan pendapatan/taraf hidup masyarakat pedesaan (petani) – terutama petani miskin – secara langsung melalui keikutsertaannya dalam program tersebut. Apakah setelah ikut dan memperoleh bantuan dari program peningkatan pendapatan, petani miskin di daerah tadah hujan (lahan

kering) kemudian mampu memperbaiki kondisi ekonomi/taraf hidup keluarga.

Dari hasil wawancara terhadap 60 responden, penelitian ini menemukan umumnya kecenderungan yang terjadi adalah sebagian besar (77 %) responden mengaku kondisi ekonomi keluarga mereka relatif tidak berubah. Sementara itu terdapat 18 % mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik dan sebanyak 5 % responden yang mengaku kondisi ekonomi mereka justru menurun setelah memperoleh bantuan peningkatan pendapatan dari pemerintah.

Tabel 23
Kondisi Ekonomi Keluarga Responden
Setelah Memperoleh Bantuan Peningkatan Pendapatan (n = 60)

Kondisi	Frekuensi	%
Meningkat	11	18
Tidak berubah (sama saja)	46	77
Menurun	3	5
Jumlah	60	100

Sumber : Data Primer

Bahwa program bantuan peningkatan pendapatan di daerah tadah hujan (lahan kering) relatif belum mampu merubah kondisi ekonomi keluarga petani miskin tidaklah mengherankan. Sebenarnya banyak faktor yang ikut menyebabkan mengapa program bantuan peningkatan pendapatan di daerah tadah hujan (lahan kering) relatif belum memberikan hasil yang optimal. Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di muka, di satu pihak ada kesan bahwa kondisi struktural memiliki andil yang cukup berarti sehingga bantuan yang diberikan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ekonomi yang rapuh cenderung membuat petani miskin terjatuh hutang dan ketidak berdayaan mereka dengan para

elit diatasnya antara lain kondisi yang menyebabkan bantuan peningkatan pendapatan bagi petani miskin tidak berfungsi optimal.

Di lain pihak kondisi alam yang rapuh dan kurang menguntungkan ditambah situasi sosial yang rawan adalah juga faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan program bantuan tersebut. Meski bantuan peningkatan pendapatan – seperti teknologi unggul berupa sarana produksi -- telah disalurkan ke petani, akan tetapi hasil yang dicapai tidak berkesinambungan karena teknologi unggul tersebut masih sangat tergantung pada kondisi alam. Selain itu situasi keamanan yang sangat rawan sering kali membuat petani penerima bantuan ternak (sapi) tidak hanya imbas dari segi materi bahkan jiwa dikorbankan, seperti dituturkan oleh Kepala Desa Pemongkong :

“Kalau saya lihat bantuan sapi ini, karena pencuri, perampok banyak di sini sehingga petani banyak yang mengembalikan dan sebagian dicuri, dirampok. Masyarakat sudah kewalahan dirampok. Kalau saya lihat di lapangan yang dapat sapi bantuan ini 14 dusun. Sekarang yang masih ada 3 dusun. Yang lain 11 dusun itu saya tak tahu kemana. Perampok pernah masuk ke Semarang (dusun Semarang, pen), habis sapi 6 ekor. Bukan 3-4 orang sampai 40 orang perampok itu, bagaimana masyarakat mengusirnya. Perampok itu tentunya sudah siap dengan segala-galanya. Luka berat ketua kelompoknya, Alhamdulillah bisa sembuh.”

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa program bantuan peningkatan pendapatan mengalami kemacetan dan tidak jarang bantuan modal yang diberikan tidak dapat dikembalikan bukan melulu karena faktor mentalitas petani yang menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa bantuan modal yang diberikan dianggapnya sebagai bantuan percuma (*charity*) dari pemerintah tanpa ada kewajiban mengembalikan dan digulirkan ke petani yang lain. “Seandainya berhasil pasti petani mengembalikan.” tutur seorang tokoh agama di desa

rumah tangga petani miskin memiliki strategi atau cara masing-masing untuk menyalasi tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari termasuk di masa-masa krisis dan kebutuhan-kebutuhan mendesak.

Ketiga, sebelum berpaling kepada pihak lain, strategi yang biasa dikembangkan rumah tangga petani miskin untuk menyalasi tekanan-tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehari-hari adalah dengan mengandalkan kreatifitas dan kemampuan mandiri keluarga, strategi mana diupayakan untuk menambah penghasilan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mendiversifikasikan usaha/pekerjaan baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian. Ragam pekerjaan yang diusahakan oleh keluarga petani miskin di lahan kering adalah beternak, berkebun, nelayan, memelihara alang-alang dan termasuk kerja secara serabutan, dagang kecil-kecilan, tukang, industri kecil, dukun dan jasa angkutan (ojek). Di samping itu upaya menambah penghasilan keluarga dilakukan dengan mencari pekerjaan ke luar desa baik di desa sekitarnya maupun migrasi ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Namun dari alternatif yang masih bisa dijangkau sebagian besar belum memberikan pendapatan yang memadai untuk kebutuhan keluarga. Upaya selanjutnya adalah memanfaatkan anggota keluarga dengan memberdayakan tenaga istri dan anak bahkan orang tua, saudara atau cucu dalam upaya memperkuat penyangga ekonomi dan meringankan beban keluarga.

Keempat, upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga petani miskin pada masa-masa krisis dapat dilakukan dengan mencukup-cukupkan sumber daya yang dimiliki. Upaya ini dilakukan melalui strategi "pengetatan ikat

pinggang” yaitu mengubah pola konsumsi makanan dari mutunya baik ke mutu yang lebih sederhana, baik yang menyangkut jenis maupun jumlah yang dikonsumsi keluarga, bahkan sering kali frekuensi makan pun terpaksa dikurangi. Selain itu, strategi “pengetatan ikat pinggang” dilakukan dengan pengetatan pengeluaran untuk proses produksi dengan cara besiru, kebutuhan sandang dan mengabaikan kewajiban-kewajiban seremonial. Sementara itu tekanan-tekanan ekonomi di masa-masa krisis dan atau kebutuhan-kebutuhan yang segera harus dipenuhi, bagi keluarga petani miskin disiasati dengan mengembangkan hubungan sosial dalam berbagai bentuk tolong-menolong -- antar kerabat maupun tetangga/teman. Bahkan bagi orang tua di kalangan rumah tangga petani miskin, anak memiliki nilai ekonomis dan menjadi jaminan hidup di masa tua. Selain itu untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mendadak seperti perkawinan dan kematian para petani di desa penelitian menciptakan pranata tradisional yang disebut banjar. Apabila strategi ini tidak mencukupi maka yang dilakukan adalah berutang, melepas sedikit demi sedikit tabungan yang masih ada dengan menggadaikannya bukan kepada lembaga formal melainkan ke kerabat atau tetangga. Namun demikian masih ditemukan warga desa yang bertindak demi keuntungan pribadi dengan membungakan uang yang cukup mencekik. Di samping itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang relatif besar tidak jarang petani miskin di lahan kering terpaksa harus menjual barang-barang yang masih tersisa.

Kelima, program bantuan peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat merangsang perencanaan “dari bawah” ternyata belum mampu memodifikasikan

kepentingan masyarakat (petani miskin) dengan negara, karena dalam pelaksanaannya lebih bersifat mobilisasi – di mana perencanaan dilaksanakan secara terpusat (top down) yang lebih mementingkan kepentingan aparat -- daripada partisipasi masyarakat.

Keenam, dominasi negara yang tercermin secara top down dalam pelaksanaan program peningkatan pendapatan ternyata tidak selalu mendapat respon positif dari petani miskin di daerah lahan kering. Meskipun sikap mereka cenderung menerima, namun kemudian pada umumnya yang terjadi adalah tidak sungguh-sungguh melaksanakan bahkan terjadi resistensi karena apa yang diberikan dan disarankan “dari atas” tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi “di bawah” yang justru lebih dipahami oleh petani daripada aparat di atas.

Ketujuh, pemberian bantuan peningkatan pendapatan kepada petani miskin di lahan kering belum memberikan hasil yang nyata bagi perbaikan ekonomi/ taraf hidup keluarga dan bahkan mengalami kerugian karena mereka gagal mengembangkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi “di bawah”. Kegagalan mereka mengembangkan bantuan yang diberikan disebabkan oleh akumulasi faktor yang sangat kompleks. Kondisi struktural yakni kondisi ekonomi yang rapuh dan ketidakberdayaan, dan kondisi alam yang kurang menguntungkan ditambah lagi situasi sosial yang rawan adalah faktor gabungan yang menyebabkan petani miskin di daerah lahan kering terutama di Pemongkong sulit berkembang secara optimal.

Implikasi

Ada dua implikasi teoritis yang penting diajukan dari hasil penelitian ini.

Pertama, berkaitan dengan teori yang bersangkutan paut dengan isu kelangsungan hidup rumah tangga petani miskin. Kedua, implikasi terhadap pemilihan paradigma pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (pengentasan kemiskinan).

Untuk implikasi teoritis yang berkaitan dengan kelangsungan hidup rumah tangga petani miskin, temuan penelitian ini memperkuat konsep Scott tentang “etika subsistensi” dalam teori moral ekonomi petani, bahwa etika subsistensi ini muncul karena kehidupan petani (miskin) begitu dekat dengan garis bahaya sehingga prinsip “dahulukan selamat” lebih diutamakan. Dalam hal ini juga sekaligus mendukung pendapat Von blanckenburg mengenai perilaku petani dalam mengambil keputusan yang cenderung kepada keamanan daripada hasil.

Berdasarkan hal itu, temuan penelitian ini juga mendukung pendekatan yang menonjolkan swadaya setempat dari Uphoff yang disebutnya sebagai energi sosial budaya kreatif, sebab di dalam suatu masyarakat (petani miskin) terdapat energi sosial, suatu daya internal yang menunjuk pada mekanisme mengatasi masalah sendiri, yang dalam konteks penelitian ini berbentuk ‘banjar’ dan bentuk tolong-menolong lainnya.

Demikian pula, temuan penelitian ini mempunyai implikasi memperkuat temuan-temuan lain sebelumnya. Seperti studi Carner menemukan bahwa strategi kelangsungan hidup rumah tangga miskin dilakukan dengan menganekaragamkan

kegiatan kerja anggota keluarga, memanfaatkan sistem penunjang yang ada di desa, dan bekerja dengan upah yang rendah serta migrasi ke luar desa, dan dalam hal ini juga memperkuat studi Clark dan Heyzer tentang pentingnya hubungan/jaringan sosial untuk kelangsungan hidup kaum miskin.

Seiring dengan itu, temuan penelitian ini juga mendukung temuan Siahaan dan Hardjono mengenai upaya petani miskin mencari alternatif di luar sektor pertanian atau di luar desa, yang ternyata alternatif yang masih bisa dijangkau tidak mampu memberikan pendapatan yang memadai. Kenyataan ini sekaligus juga memperkuat teori Scott soal scavenging (mencari sisa-sisa makanan) dalam perekonomian di luar desa.

Implikasi teoritik yang lain menyangkut kelemahan strategi pembangunan yang selama ini didominasi dan mengacu pada paradigma modernisasi. Proposisi modernisasi ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa unsur-unsur lokal tidak cocok dengan ideologi modernisasi. Karena itu dalam proyek atau program pembangunan tidak ada tempat bagi unsur-unsur lokal – yang tradisional. Dari proposisi ini negara sebagai agen pembangunan merancang dan melaksanakan sendiri pembangunan tanpa melibatkan unsur-unsur atau prakarsa masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan, model ini dikenal sebagai pendekatan “atas bawah” (top down).

Dalam pendekatan top down, program pembangunan dilaksanakan secara terpusat, mensubordinasikan masyarakat terhadap keinginan negara. Akibatnya tidak jarang berbagai program pembangunan tidak selalu bersambung pada kepentingan masyarakat, bahkan apa yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri kadang-

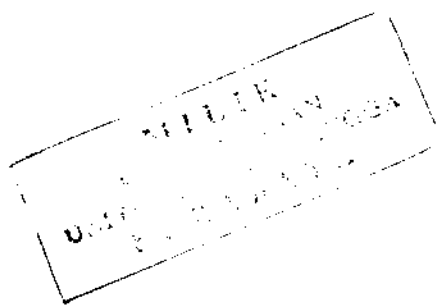
kadang tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masalah ini terjadi karena lebih mementingkan keinginan negara daripada aspirasi masyarakat sehingga pembangunan tidak berlangsung dan melihat pentingnya proses dialog, melainkan proses monolog di mana negara tampil dominan. Dalam proses monolog negara cenderung menekankan sasaran dari atas dan mengabaikan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya lebih memahami kebutuhan-kebutuhannya sesuai masalah-masalah dan kondisi di bawah.⁷⁸

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa paradigma modernisasi yang dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpusat (top down) sesungguhnya tidak netral dan justru masyarakat hanya dijadikan obyek dalam pelaksanaan program. Perencana program (pemerintah) tidak memperhatikan sumber daya pada masyarakat (petani) termasuk potensi/prakarsa dan kondisi lokal. Ini menunjukkan bahwa program pembangunan lebih mengedepankan kepentingan pemerintah daripada kebutuhan masyarakat umum -- terutama upaya untuk meningkatkan penghasilan dan perbaikan ekonomi mereka. Melihat kenyataan itu sangat diperlukan komitmen yang tinggi khususnya pada kalangan pengelola pembangunan -- aparat pemerintahan di semua tingkatan -- untuk benar-benar berpihak kepada mereka yang "kurang beruntung" dan memperhatikan kondisi

⁷⁸ Lihat Bambang Ismawan, "Pendidikan yang Diperlukan Untuk Pengembangan Pedesaan," dalam Hagul, Ed, Pembangunan....

“di bawah”. Untuk itu ajakan Chambers untuk menoleh kepada paradigma pembangunan alternatif patut dan relevan diperhatikan.

Akhirnya bagi kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau para pengambil kebijakan dalam hal pembangunan masyarakat desa – termasuk pembangunan yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (petani). Pengambil kebijakan sebaiknya perlu menyerasikan perencanaan program sesuai potensi, faktor kendala dan sumber pendukung serta kebutuhan masyarakat (petani). Karena dalam kenyataannya masyarakat (petani) sebagai sasaran program memiliki sikap tersendiri untuk menerima atau menolak tergantung sesuai tidaknya program dari “atas” itu dengan kebutuhan dan kondisi “di bawah”.



DAFTAR PUSTAKA

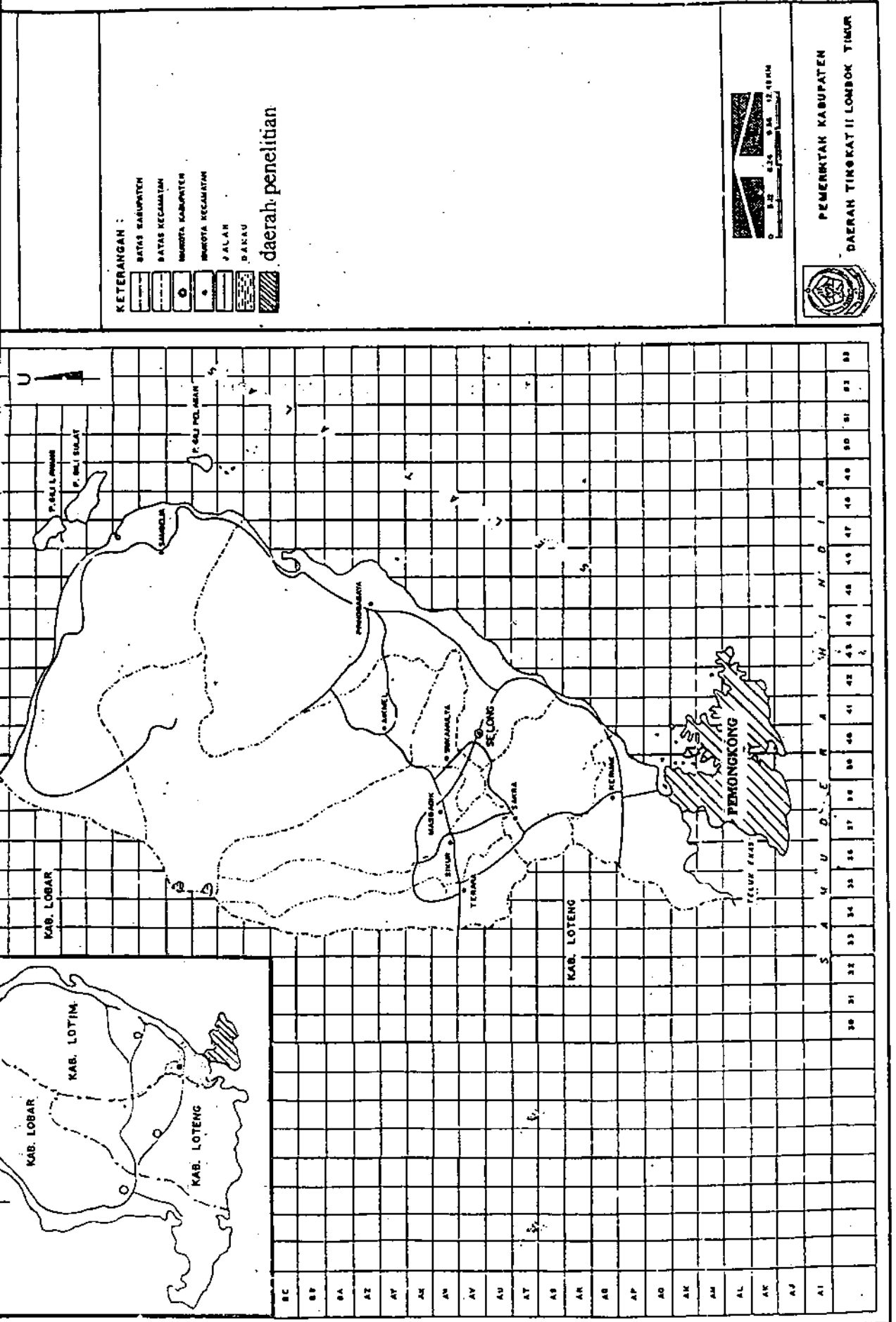
- Abdoellah, Oekan S., "Pemahaman Adaktif Masyarakat Transmigran : Pendekatan Antrologi Ekologi, "Prisma, 7, Juli-Agustus, 1997
- Adam, Subagyo, Pola Migrasi Masyarakat Madura dan Masyarakat Bawean, (Surabaya: Lembaga Penelitian UNAIR, 1991)
- Ampang, Jacob, Identifikasi dan Analisis faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, (Yogyakarta, PPS UGM, 1984).
- Boeke, J.H., Dari Empat Juta Menjadi Empat Puluh Empat Juta, (Jakarta : Bhratara, 1974)
- Boer, Leen, "Mutiara Dalam Lumpur : Tinjauan Kembali Terhadap Budaya Kemiskinan," Transformasi, Seri IV.
- Chambers, Robert, Pembangunan Desa : Mulai dari Belakang, (Jakarta : LP3ES, 1987)
- Carner, George, "Kelangsungan Hidup, Saling Ketergantungan dan Persaingan di Kalangan Kaum Miskin di Filipina," dalam D. C. Korten dan Syahrir, Eds, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988)
- Clark, Mari H., "Women-Headed Household and Poverty," dalam Gelpi, Barbara C., Et al., Women and Poverty, (Chicago: The University of Chicago Press, 1986)
- Collier, W.L., dkk., "Sistem Tebasan Bibit Unggul dan Perubahan Desa di Jawa", Prisma 3 No. 6, 1994
- Craib, Ian, Teori-Teori Sosial Modern : Dari Parsons Sampai Habermas, (Jakarta : Rajawali Press, 1992)
- Dsanger, H dan D.Bottcher, "Jaminan Pangan dan Kemiskinan di Daerah Pedesaan," dalam Karl-Heinz W. Bechtold, Ed, Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988)
- Effendi, Tajudin Noer, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1995).

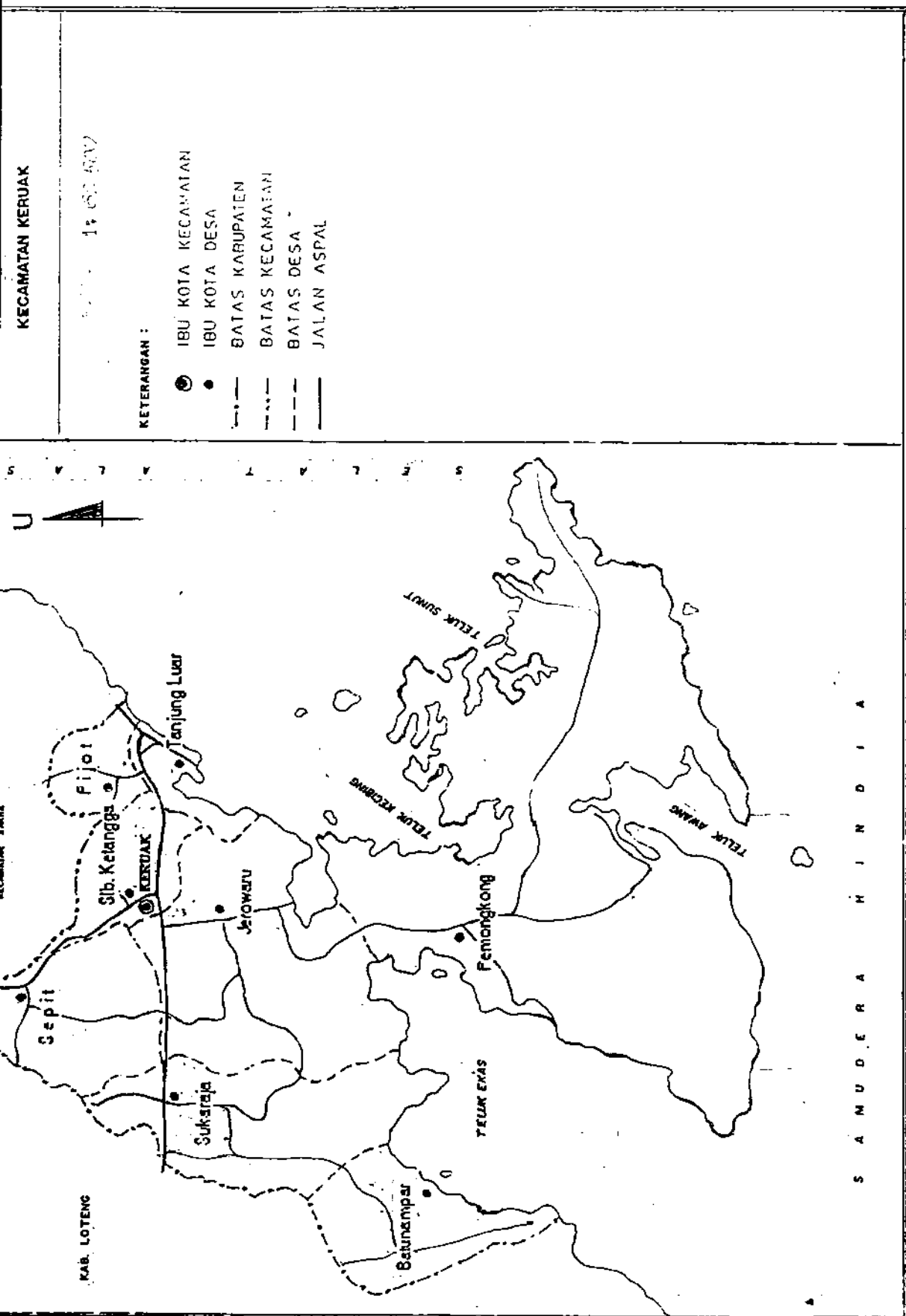
- Geertz, Clifford, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1976)
- Hadiwigeno, Soetatwo dan A. Pakpahan, "Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia," Prisma, no 3, 1993
- Hardjono, Joan, Tanah, Pekerjaan dan Napkah di Pedesaan Jawa Barat, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990).
- Heyzer, Noeleen, "Women Migration and Income Generation," dalam Working Women in South East Asia, (Open University Milton Keynes, 1986)
- Ismawan, B., "Pendidikan yang Diperlukan Untuk Pengembangan Pedesaan", dalam Peter Hagul, Ed, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Jakarta : Rajawali, 1992)
- Johnson, Doyle P., Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II, (Jakarta : PT. Gramedia, 1986)
- Kameo, Daniel D., "Kemiskinan Petani Peternak Kecil di Nusa Tenggara Timur : Studi Kasus di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan," Analisis CSIS, No. 1, Jan-peb, 1996.
- Koentjaraningrat, "Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," dalam Sayogyo dan Fudjiwati Sayogyo, Eds, Sosiologi Pedesaan, Jilid 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, Press, 1983)
- Landsberger, Henry A dan Yu.G.Alexandov, Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, terjemahan : Aswab Mahasim, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)
- Leibo, Jepta, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)
- Lewis, Oscar, "Kebudayaan Kemiskinan," dalam Andre Bayo Ala, Ed, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Mantra, I.B., Mobilitas Sirkuler di Indonesia, (Yogyakarta: PPSK UGM, 1979)
- Mas'oed, Muhtar, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Moeljarto, Vidhyandika, "Kemiskinan: Hakekat, Ciri, Dimensi dan Kebijakan," Analisis CSIS, Tahun XXIII, No.3, Mei-Juni 1994

- Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Penny, D.H., dan Ginting, Meneth, Pekarangan, Petani dan Kemiskinan: Suatu studi Tentang Sifat dan Hakekat Masyarakat di Sriharjo Pedesaan Jawa, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).
- Poloma, Margaret M., Sosiologi Kontemporer (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Popkin, Samuel L., The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam, (Barkeley: University of California Press, 1979)
- Redfield, Robert, Masyarakat Petani dan Kebudayaan, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Ristrini dan W. Budiarto, "Migrasi dan Urbanisasi: Masalah, Hubungan dan Kebijakan Pengendalian Perpindahan Penduduk," Majalah Demografi Indonesia, No.32, Desember, 1989
- Sayogyo, "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan," dalam Redaksi Ekonomi Harian Kompas, Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia : Perkembangan Pemikiran 1965-1981, (Jakarta :PT.Gramedia, 1982)
- Sayogyo, Ed, Kemiskinan dan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).
- Scott, James C., "Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia," dalam Steffen W. Schmid, Et al., Friend, Followers and Faction : A Reader in Political Clientelism, (Los Angeles: University of California Press, 1977).
- Scott, James C., Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, terjemahan: Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES,1994)
- Siahaan, Hotman, Struktur Kemiskinan Masyarakat Petani di Pedesaan, (Surabaya: FISIP UNAIR, 1981)
- Siahaan, Hotman M., "Tekanan Struktural dan Mobilisasi Petani di Pedesaan," Prisma, 11/12, Nov/Des, 1983
- Sinaga, Rudolf S dan B. White, "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural," dalam Alfian, Eds, Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai. (Jakarta: Yayasan Ilmu-IlmuSosial, 1980)

- Singarimbun, Masri dan D.H. Penny, Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa, (Jakarta: Bhrata Karya Aksara, 1976)
- Soekartawi, "Reorientasi Pendekatan Pembangunan Pertanian: Antisipasi Pembangunan Jangka Panjang II," Prisma, No. 11, Nopember 1991.
- Soekartawi dan A., Mustafa, "Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan," Buletin Studi Indonesia, No.5,1995.
- Soemardjan, Selo, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan ": Pengantar, dalam Alfian, Eds, Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980).
- Sumodiningrat, G., "Strategi, Kebijakan dan Pembangunan Pedesaan," Perencanaan Pembangunan, No. 10, Desember, 1997.
- Sumodiningrat, G., Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan IDEA, 1988).
- Sumodiningrat, G., dan Kuncoro, Mudrajat, "Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri: Mencari Pola Simbiosis," Prisma, No.2, 1990.
- Suparlan, Parsudi, Ed, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)
- Suryana, Achmad dan E. Pasandaran, "Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan: Penanggulangan Petani Miskin dan Kemiskinan," Prisma, No 3, 1993
- Sutrisno, Loekman, "Problem Pertanian di Indonesia dan Sumbangan Organisasi Swasta Untuk Memecahkannya," dalam Peter Hagul, Ed, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1992)
- Tjondronegoro, Sediono M.P., "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa," Prisma, No. 2, 1990.
- Uphoff, N., Learning From Gal Oya, (Ithaca University Press, 1990)
- Veeger, K.J., Realitas Sosial, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)

- Von Blanckenburg, Peter dan Reinhold Sachs, "Masyarakat Tani dalam Pembangunan," dalam Ulrich Planck, Ed, Sosiologi Pertanian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989)
- Widiani, B.T., Perubahan Nilai-nilai Pada Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, (Jakarta : Depdikbud, 1998)
- Wolf, Eric R., Petani: Suatu Tinjauan Antropologis, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985)





Kuesioner Penelitian

PETANI DAN KEMISKINAN

**Studi Tentang Kemiskinan dan Strategi
Mempertahankan Kelangsungan Hidup Petani Miskin
Di Daerah Tadah Hujan Desa Pemongkong, Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat**

I. Karakteristik Sosial Ekonomi

1. Umur responden saat ini : tahun
2. Jenis Kelamin Responden
 1. Laki
 2. Perempuan
3. Pendidikan terakhir responden
 1. Buta huruf
 2. Tidak tamat SD/ sederajat
 3. Tamat SD/ sederajat
 4. Tidak tamat SLTP/ sederajat
 5. Tamat SLTP/ sederajat
 6. Tidak tamat SLTA/ sederajat
 7. Tamat SLTA/ sederajat
 8. Tidak tamat PT
 9. Tamat PT
4. Status perkawinan responden
 1. Belum kawin
 2. Kawin
 3. Janda/duda
5. Bentuk keluarga responden
 1. Extended family
 2. Nuclear family

6. Berapakah jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah dengan responden

1. Suami/istri : jiwa
2. Anak : jiwa
3. Orang tua/mertua : jiwa
4. Saudara : jiwa
5. Orang lain : jiwa
6. Total : jiwa

7. Dari sejumlah anggota keluarga dan orang lain yang tinggal serumah, beberapa jiwa yang masih menjadi tanggungan responden :
..... jiwa

8. Status kepemilikan rumah responden

1. Kontrak/sewa
2. Rumah saudara/orang tua
3. Milik sendiri
4. Lainnya,

9. kondisi rumah responden

- | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| Dinding | : 1. Alang-alang | 2. Gedeg | 3. Bata/tembok | 4. Lainnya, |
| Lantai | : 1. Tanah | 2. Semen | 3. Tegel | 4. Lainnya, |
| Atap | : 1. Alang-alang | 2. Seng | 3. Genteng | 4. Lainnya, |

10. Berapa luas tanah/lahan yang di miliki responden

1. Sawah tadah hujan : hektar
2. Tegalan : hektar
3. Total : hektar

11. Dari luas tanah yang di miliki, berapa luas tanah/lahan yang di garap untuk usaha tani.

1. Sawah tadah hujan : hektar
2. Tegalan : hektar
3. Total : hektar

12. Jenis tanaman apa yang diusahakan pada tanah/lahan tersebut

1. Padi
2. Kedelai/kacang hijau
3. Jagung
4. Ubi
5. Palawija. Lainnya,

13. Berapa kali dalam setahun menggarap tanah/lahan yang dimiliki

1. Satu kali
2. Dua kali
3. Tidak menentu

14. Berapa pendapatan bersih yang di peroleh dari usaha tani tersebut dalam tahun terakhir ini : Rp.

15. Apakah responden memiliki barang-barang sbb :

- | | | |
|-----------------------|------------|----------------|
| 1. Barang Pecah belah | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 2. Mebel | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 3. Barang elektronik | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 4. Sepeda | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 5. Mesin jahit | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 6. Sepeda motor | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 7. Perhiasan | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 8. Lainnya, | | |

16. Apakah Responden memiliki hewan ternak sbb :

- | | | |
|------------------|------------|----------------|
| 1. Ayam/itik | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 2. Kambing | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 3. Sapi | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 4. Kerbau | : 1. Punya | 2. Tidak punya |
| 5. Lainnya, | : 1. Punya | 2. Tidak punya |

17. Apakah Responden mempunyai/bisa menyisihkan pendapatannya untuk ditabung

1. Punya
2. Tidak punya

18. Jika punya, berapa jumlah tabungan responden : Rp.....

19. Selain uang tunai, apakah responden mempunyai tabungan dalam bentuk yang lain (natura)

1. Punya
2. Tidak punya

20. Jika punya, apa bentuknya (lihat pertanyaan nomer 16 dan 17)

21. Bagaimana penggunaan tabungan tersebut :

1. Untuk modal usaha
2. Untuk masa depan anak
3. Untuk berjaga-jaga bila ada kebutuhan mendadak
4. Untuk dibelikan barang rumah tangga
5. Untuk membangun rumah
6. Lainnya

II. Strategi Mempertahankan Kelangsungan Hidup

22. Dalam satu tahun terakhir, bila Responden menghadapi kebutuhan kebutuhan dibawah ini, cara apakah yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Macam kebutuhan	Cara yang dilakukan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Konsumsi sehari-hari									
2. Biaya hajat									
3. Biaya berobat									
4. Biaya pendidikan									
5. Biaya saprodi									
6. Bayar hutang									
7. Kewajiban menyumbang									
8. Panen gagal									
9. Perbaikan rumah									
10. Lainnya									

Ket : 1. Minta bantuan orang lain

2. Hutang
3. Mengambil tabungan
4. Menjual barang
5. Menggadaikan barang
6. Mencari tambahan penghasilan
7. Mengurangi konsumsi sehari-hari
8. Memanfaatkan pranata tradisional
9. Lainnya

23. Jika responden pernah minta bantuan orang lain, kepada siapakah biasanya responden meminta bantuan :
1. Orang tua/mertua.
 2. Anak.
 3. Saudara.
 4. Majikan.
 5. Teman/tetangga.
 6. Lainnya,.....
24. Jika responden pernah berhutang, kepada siapakah biasanya responden berhutang :
1. Orang tua/mertua.
 2. Anak.
 3. Saudara.
 4. Majikan.
 5. Teman/tetangga.
 6. Rentenir.
 7. Lainnya,.....
25. Selama pengalaman responden, jika berhutang apakah memakai bunga pinjaman :
1. Tidak pernah.
 2. Jarang.
 3. Kadang-kadang.
 4. Sering.
 5. Selalu memakai bunga.
26. Jika memakai bunga, berapa persen biasanya harus membayar bunga per bulan : persen.
27. Jika responden pernah menjual barang, dalam satu tahun terakhir ini, barang apakah yang pernah dijual :
1. Tanah
 2. Barang pecah belah.
 3. Mebel.
 4. Barang elektronik.
 5. Sepeda.
 6. Mesin jahit.
 7. Sepeda motor.
 8. Perhiasan.
 9. Lainnya,.....

28. Kepada siapa responden biasanya menjual barang tersebut :

1. Keluarga sendiri
2. Majikan
3. Penadah
4. Tetangga/teman
5. Tidak menentu
6. Lainnya,....

29. Apa alasan responden menjual barang-barang tersebut.

.....

30. Jika responden pernah menggadaikan barang, biasanya barang yang digadaikan adalah :

1. Tanah
2. Barang pecah belah
3. Mebel
4. Barang elektronik
5. Sepeda
6. Mesin jahit
7. Sepeda motor
8. Perhiasan
9. Lainnya,.....

31. Kepada siapa biasanya responden menggadaikan barang tersebut :

1. Keluarga sendiri
2. Majikan
3. Renternir
4. Tetangga/teman
5. Pengadaian
6. Tidak tentu
7. Lainnya,.....

32. Apa alasan responden menggadaikan barang tersebut :

.....

33. Jika responden berusaha mencari sumber penghasilan tambahan, bagaimana hal itu dilakukan :

1. Memanfaatkan semua anggota keluarga
2. Bermigrasi/mencari kerja keluar desa
3. Melakukan usaha-usaha produktif

34. Siapakah diantara anggota keluarga yang dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan :

1. Suami/istri
2. Anak
3. Orangtua/mertua
4. Saudara
5. Lainnya,.....

35. Jika responden pernah melakukan pengurangan konsumsi sehari-hari, bagaimana untuk pengurangan itu :

Pengetatan konsumsi	Sering	Kadang -kadang	Tidak pernah
1. Menu makan disederhanakan			
2. Frekuensi makan dikurangi			
3. Uang jajan anak dikurangi			
4. Uang jajan orang tua dikurangi			

36. Selain pengurangan konsumsi diatas, pengetatan lain yang sering dilakukan responden adalah :

.....

37. Jika responden memanfaatkan pranata tradisional, pranata macam apa yang dibentuk/digunakan :

1. Kelompok jimpitan
2. Simpan pinjam
3. Arisan
4. Lainnya,.....

38. Selain bertani (bercocok tanam), apakah responden mempunyai pekerjaan/usaha sampingan :

1. Punya
2. Tidak punya

39. Jika punya, apakah jenis usaha/pekerjaan sampingan responden :

1. Buruh
2. Pembantu rumah tangga
3. Dukun
4. Berdagang
5. Berkebun
6. Pengrajin
7. Nelayan
8. Tukang
9. Peternak
10. Pencari kayu bakar
11. Pelayanan jasa tradisional
12. Ojek
13. Lainnya,

40. Apa alasan responden memilih usaha/pekerjaan sampingan tersebut

.....

III. Peran Negara/ pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani.

41. Apakah Responden pernah menerima bantuan dari pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan.

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

42. Jika pernah, apa bentuknya (khusus untuk ternak sapi dan sarana produksi tanaman pangan).

- a. Ternak sapi
- b. Sarana produksi tanaman pangan

43. Bagaimana cara pemerintah menggerakkan responden dalam program tersebut.
- a. Mobilisasi
 - b. Partisipasi
 - c. Koersi
44. Bagaimana sikap responden terhadap program tersebut.
- a. Menerima dan melaksanakan
 - b. Menerima dan terpaksa melaksanakan
 - c. Menerima, tidak melaksanakan
 - d. Menolak
45. Bagaimana kondisi ekonomi responden setelah mengikuti program tersebut.
- a. Meningkatkan
 - b. Tidak berubah
 - c. Menurun

Pedoman Wawancara

(Untuk petani dan tokoh informal)

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani di lokasi penelitian.
2. Bagaimana usaha tani di lahan kering di lokasi penelitian.
3. Apakah hasil yang diperoleh dari usaha tani tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Bagaimana kesulitan hidup/kemiskinan yang alami petani lahan kering
5. Bagaimana upaya-upaya dalam menghadapi kesulitan hidup/kemiskinan yang dialami.
6. Mengapa upaya-upaya itu (no.5) dilakukan. Apa alasannya.
7. Bagaimana usaha-usaha sampingan yang dilakukan untuk menambah penghasilan. Apa alasan melakukan usaha yang dipilih.
8. Bagaimana penghasilan yang diperoleh dari usaha sampingan itu. Apakah dapat menutupi kekurangan dari hasil usaha tani di lahan kering.
9. Sepengetahuan bapak, program apa saja yang telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani di daerah ini.
10. Menurut bapak, bagaimana mekanisme/cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Apakah mobilisasi, koersi ataukah partisipasi. Bagaimana cara itu dilakukan.

11. Bagaimana respon/sikap petani dalam menanggapi program pemerintah tersebut.
 - Apakah menerima dan melaksanakan program tersebut. Program apa yang dilaksanakan.
 - Apakah menerima, tapi kemudian tidak melaksanakan program tersebut.
 - Apakah menolak program tersebut. Program apa yang ditolak.
 - Apakah bapak melaksanakan dengan terpaksa. Program apa yang terpaksa dilaksanakan.
 - Ataukah bapak bersikap lainnya, misalnya masa bodoh dan lain lain.
12. Bagaimana sikap itu dilaksanakan.
13. Mengapa sikap itu dilakukan. Apa alasannya.
14. Menurut bapak, bagaimana seharusnya program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani (mengatasi kemiskinan) di daerah ini.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP (031) 577935
SURABAYA - 60180

Surabaya 20 MEI 1999

nomor : 072/ 0835 / 303 / 1999
 :
 : Penelitian / Survey
 : Research

Kepada:

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NUSA TENGGARA BARAT
 DI - MATARAM

U.P. KADIT SOSPOL

Menunjuk Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya

tanggal : 17 MEI 1999
 nomor : 1553/J03.11/PP/1999

Hal-hal yang dibicarakan antara:

Nama : S A M A ' A N
 Alamat : d/a. JL. DHARMA WANGSA DALAM SELATAN SURABAYA
 Pekerjaan : MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA
 Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " PETANI DAN KEMISKINAN : Studi tentang Kemiskinan dan Strategi Survival Petani Miskin pada Daerah Tadah Hujan di Desa Pemongkong, Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat."

Waktu : 4 (empat) BULAN.

Lokasi : PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (MATARAM).

Peneliti wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.



REVISI :

1. Sdr. Kapolda Jawa Timur
2. Sdr. Pangdam V Brawijaya
3. Sdr. Ketua Bappeda Prop. Jatim
4. Sdr. ~~Yohanes~~ ~~gkutan~~
5. Sdr. ~~REKTOR UNAIR SURABAYA~~

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Pendidikan No. 2 Telp. (0370) 631714, 631215 Fax. (0370) 631714 Mataram 83126

Mataram, ..29.. Juni.....19.99.

Bospol. 070/0835/REK/VI/99.

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

K e p a d a
 Yth. Sdr. Ketua BAPPEDA TINGKAT I
 Nusa Tenggara Barat

di-

Mataram

Menunjuk surat Kepala Direktorat Sosial Politik Tk. I Jawa Timur.....

No. 072/0835 / 303/1999 tanggal 20 Mei 99

Perihal Penelitian / Survey Research yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tk. I NTB
 Cq. Ketua Bappeda Prop. Dati I NTB dan tembusannya disampaikan kepada kami sesuai surat
 Keputusan Gubernur KDH Tingkat I NTB No. SK.050.7/1 tanggal 1 Juni 1979, kami tidak
 keberatan diberikan izin kepada :

Nama S.A.M.A.'A.N.....
 Alamat Jln. Dharmawangsa, Dalam Sejahtera Surabaya.....
 Pekerjaan Mhs. PPS UMATK Surabaya.....

untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

Judul : * PETANI DAN KEMISKINAN* Studi tentang kemiskinan
 dan strategi survival petani miskin pada Daerah ta
 dah hujan di Desa Pemongkong, Lombok Timur Prop. NTB

Lokasi Penelitian : Kab. Dati II Lotim
 Lamanya Penelitian : 4 (empat) Bulan

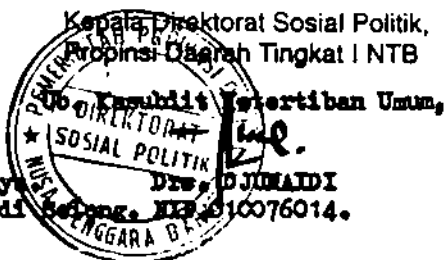
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya ke Bupati KDH
 Tk. II Cq. Kepala Kantor Sosial Politik setempat dengan menunjukkan surat rekomendasi
 ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan
 judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan
 adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlakunya surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan
 penelitian belum selesai diperpanjang harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Rekomendasi ini akan dicabut bila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.
6. Setelah selesai agar menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur KDH Tk. I
 NTB Cq. Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I NTB.

Demikian untuk dimaklumi dan seperiunya.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kalitospol. Tk. I Jatim di Surabaya
2. Kakan Bospol. Kab. Dati II Lotim di Selong. NTB 816076014.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan Flamboyan Nomor 2 Telp. 31581, 32779, 31221 Mataram

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 050.7/ 256/Bappeda/VI.99

Menunjuk surat Kepala Direktorat Sosial Politik TK. I Jawa Timur
Nomor : 072/0835/303/99 tanggal 20 Mei 99 dan surat Rekomendasi Penelitian
dari Kepala Dit. SOSPOL Prop. NTB Nomor : 070 / 388 / REK / VI / tanggal 29 Juni 99
Sospol, dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor : SK.050.7/1
tanggal 1 Juni 1997 dengan ini diberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : S A M A ' A N
Alamat : Jl. Dharmawangsa Salam Sejahtera Surabaya
Pekerjaan / Jabatan : mahasiswa
Badan / Instansi : UNAIR
Tujuan / Keperluan : mengadakan penelitian
Tema / Judul : "PETANI DAN KEMISKINAN" : studi tentang kemiskinan dan
strategi survival petani miskin pada daerah tedah hujan
di desa Pemongkong Lombok Timur Prop. NTB

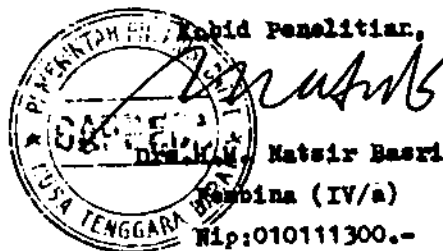
Lokasi : Kab./Kodya Dati II Lotim
Lama Penelitian : 30 Juni s/d 30 Sept 99

setelah laporan penelitian selesai, agar saudara menyerahkan dokumen hasil penelitian dimaksud sebanyak 1
(satu) exemplar kepada Bappeda Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mataram, 29 Juni 99

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NTB,
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Lb.



Salinan pertama disampaikan kepada Yth :

Kepala Direk. Sospol TK I Jawa Timur di Surabaya

Salinan kedua seterusnya disampaikan kepada Yth.

Bupati Kdh. / Wali Kodya Dati II Lotim di Selong

Kepala dinas instansi terkait

Yang berwenang untuk maklum

Arsip.-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TIMUR

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Lalu Muchdar No. 11 Selong Telpn 0376 - 21077, 21161 Kode Post (83612)

Selong 1 Juli 1999

Sospol. 070/ 74/ VII / 1999

Kepada

Pemberitahuan Penelitian.

Yth. Camat Keruak

di -

Keruak

Menunjuk :

1. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : Sospol. 070/388/REK/VI/1999, tanggal 29 Juni 1999 Prihal Rekomendasi Ijin Penelitian.
2. Surat Bappeda Tingkat II Lombok Timur Nomor 070 / 270 / Bappeda / VI / 1999 tanggal 30 Juni 1999 Prihal ijin Penelitian.
Sesuai rujukan tersebut diatas, dengan ini di beritahukan bahwa di wilayah saudara akan dilakukan penelitian tentang : " PETANI DAN KEMISKINAN " : Studi tentang kemiskinan dan Strategi Survival petani miskin pada Daerah Tadah Hujan di Desa Pemongkong Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.

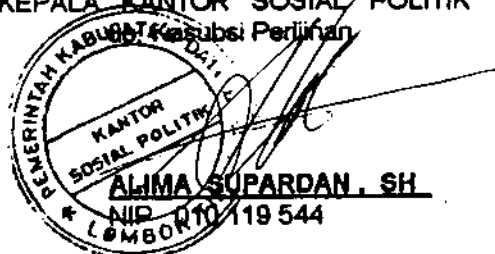
oleh :

NAMA	:	SAMA'AN
PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	Jln.Darmawangsa Salam Sejahtera Surabaya
TUJUAN	:	Mengadakan Penelitian Untuk Memperoleh Data
TEMA/JUDUL	:	"PETANI DAN KEMISKINAN" : Strudi tentang kemiskinan dan Strategi Survival Petani miskin pada Daerah Tadah Hujan di Desa Pemongkong Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

LOKASI	:	di Kabupaten Dati II Lombok Timur
WAKTU	:	30 Juni s/d 30 Desember 1999

Sehubungan dengan rencana penelitian tersebut, diharapkan kepada saudara agar memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penelitian dimaksud.
Demikian untuk maklum dan seperlunya .-

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LOMBOK TIMUR
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
Kasubsi Perlinan



ALIMA SUPARDAN. SH
NIP. 070119544

AN : disampaikan dengan hormat kepada:
a. Direktorat Sospol Prop. Dati I NTB di Mataram,-
b. Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur di Selong,-
c. Sospol Tk. I Jatim di Surabaya,
d. Desa Pemongkong di Pemongkong ;
e. yang bersangkutan;

**PEMERINTAH KABUPATEN DATI II LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Nomor : 070/279/Bappeda/99. Selong, 30 Juni 1999
Lamp : -
Perihal : Permakluman Penelitian K E P A D A

Yth. 1. Camat Keruak
2. Kepala Desa Pemongkong

di -
Tempat

Dengan Hormat,

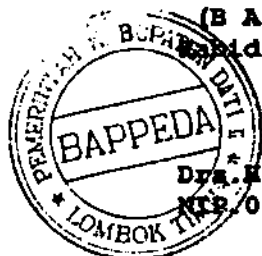
Berdasarkan Surat Ketua Bappeda Tingkat I NTB Nomor :
050.7/256/Bappeda/VI.99 Tanggal : 29 Juni 1999 Perihal : Ijin
Penelitian/Survey, dipermaklumkan bahwa di Wilayah Saudara akan
diadakan Penelitian/Survey Oleh :

Nama : **S A M A ' A N**
Alamat : Jln. Darmawangsa Salam Sejahtera
Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa
Badan/Instansi : UNAIR
Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian
Tema/Judul : **"PETANI DAN KEMISKINAN" : Studi Tentang
Kemiskinan dan Strategi Survival Petani
Miskin pada Daerah Tadah Hujan di Desa
Pemongkong Lombok Timur Propinsi Nusa
Tenggara Barat.**
Waktu : Tgl. 30 Juni s/d 30 Desember 1999.

Untuk kelancaran tugas Penelitian/Survey tersebut diatas diharapkan
untuk membantu yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum dan atas bantuannya disampaikan terima
kasih.

**PEMERINTAH KABUPATEN DATI II LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Bid. Penelitian**



Drs. H. IMRON FAUZI H.
NTP. 010 136 018.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur di Selong;
2. Kakan. Sospol. Kab. Dati II Lombok Timur di Selong;
3. Kadis. Pertapa. Kab. Dati II Lombok Timur di Selong;
4. yang Bersangkutan.